Islam, Perempuan, & Hukum Keluarga

Refleksi Autoetnografi

Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., MA., Ph.D

Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., MA., Ph.D

ISLAM, PEREMPUAN, & HUKUM KELUARGA

Refleksi Autoetnografi

ISLAM, PEREMPUAN, & HUKUM KELUARGA
REFLEKSI AUTOETNOGRAFI

Penulis:
Prof. Hj. Atun Wardatun, M.Ag., MA., Ph.D

ISBN 978-623-8497-35-5

Editor:
Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, M.H.

Layout:
Tim UIN Mataram Press

Desain Sampul:
Tim Creative UIN Mataram Press

Penerbit:
UIN Mataram Press

Redaksi:
Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Center Lt. 1)
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru
Kota Mataram – NTB 83116
Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499
Email: uinmatarampress@gmail.com

Distribusi:
CV. Pustaka Egaliter (Penerbit & Percetakan)
Anggota IKAPI (No. 184/DIY/2023)
E-mail: pustakaegaliter@gmail.com
https://pustakaegaliter.com/

Cetakan Pertama, Desember 2023

PENGANTAR PENULIS

Buku yang berjudul "Islam, Perempuan, dan Hukum Keluarga: Refleksi Autoetnografis" yang berada di depan pembaca ini adalah sebenarnya kumpulan tulisan popular yang telah dilakukan penulis pada tiga tahun terakhir. Tulisan-tulisan pendek tersebut telah dipublikasikan di beberapa platform online, media massa cetak, maupun disampaikan pada beberapa pengajian dan seminar sebelumnya. Setelah dikompilasi dan dilihat benang merahnya, ternyata tulisan-tulisan tersebut terkait satu sama lain. Sayang jika tidak disatukan menjadi "buku"!

Topik tulisan tidak terlepas dari isu yang menjadi *concern* penulis yaitu perempuan dan hukum keluarga Islam. Berbicara tentang hukum keluarga erat kaitannya dengan isu gender dan perempuan. Tentu saja pembahasan dalam buku ini tidak terlepas dari perspektif dan values keislaman. Sebagai tulisan lepas, maka karakter umum dari artikel-artikel ini bersifat reflektif dan berdasarkan pengalaman personal penulis. Maka secara metodologis buku ini dapat disebut sebagai refleksi autoetnografi. Autoetnografi adalah metode penelitian maupun pengkajian fakta-fakta sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data utama adalah refleksi pengalaman dari seorang penulis. Walaupun ini subyektif, tetapi pengalaman siapapun tetap menjadi sumber pengetahuan yang berguna. Untuk mengurangi subyektifitas itu maka pengalaman seseorang harus juga

direlasikan dengan konteks sosial, teori-teori dan penjelasan yang sudah ada pada *existing literatures*.

Akademisi memang didorong untuk menyeimbangkan tulisan akademik dengan tulisan popular-reflektif di dalam tugas-tugas intelektualnya. Masing-masing model tulisan itu memiliki penikmat sendiri. Buku yang berada di hadapan pembaca ini adalah upaya penulis untuk menjembatani keduanya. Penulis mengungkapkan berbagai persoalan teoritik maupun normatif menjadi lebih ringan dan praktis. Hal ini dimaksudkan agar diskusi-diskusi ilmiah tidak menjadi menara gading di satu sisi. Di sisi lain, masyarakat luas bisa meningkatkan literasinya agar permasalahan sosial yang mereka hadapi sehari-hari dapat mereka pahami berdasarkan perspektif yang lebih akademis.

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh mereka yang tertarik melihat isu keperempuanan dan keluarga. Perspektif normatif baik yang bersifat ideologis (Islam) maupun sosio-legal (hukum keluarga) menjadikan pembicaraan tentang perempuan dan keluarga dalam buku ini terkait dengan isu-isu lainnya. Misalnya literasi dan politik.

Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa pemikiran metodologis maupun perspektif gender yang menegaskan bahwa topik perempuan dan keluarga bisa menjadi kajian yang terus menarik dan *up-to-date*. Oleh karena itu, buku ini sangat penting dibaca oleh mahasiswa hukum keluarga Islam sebagai referensi untuk melihat bagaimana Islam menjadi nilai di dalam kehidupan

keluarga dan bagaimana perempuan menjadi subyek yang penting di dalam diskusi hukum keluarga.

Buku ini terdiri dari empat bab besar yaitu: Bab I Operasionalisasi Islam, Bab II Perempuan dan Literasi, Bab III Keluarga dan Parenting, dan Bab IV Metodologi dan Isu Hukum Keluarga Islam. Masing-masing bab itu menunjukkan topik utama yang dihajatkan oleh tulisan yang menjadi sub bab. Namun tidak dapat dihindarkan, beberapa tulisan sebenarnya relevan juga dengan bab yang lain. Hal ini adalah indikasi akan berjalin-kelindannya isu-isu yang di bahas.

Penentuan judul buku ini juga diambil berdasarkan indeksasi kata yang paling banyak muncul di dalam keseluruhan isi buku. Sebagaimana yang dapat dilihat dari indeks di akhir halaman buku ini kata Islam, Perempuan, Hukum, dan Keluarga adalah empat kata yang paling banyak muncul di dalam pembahasan buku.

Topik Islam pada Bab I lebih bermakna operasionalisasi nilai Islam bukan semata Islam sebagai teks normatif. Misalnya bagaimana puasa diimplementasikan dalam sikap kejujuran, bagaimana Haji menegaskan sikap kesetaraan. Islam yang dilihat sebagai agama maupun cara hidup (*way of life*) memang tidak boleh terhenti sebagai sekedar hafalan atau identitas personal. Islam harus diterjemahkan dan dirasakan nyata di dalam semua lini kehidupan dan menjadi kesalehan sosial. Demikian juga Iman. Bukan sekedar percaya tetapi harus dibenarkan oleh lisan dan diwujudkan di dalam perbuatan. Dalam hal ini keluarga juga

menjadi ruang bagi teraplikasinya nilai-nilai keimanan dan keislaman.

Bab II yaitu Perempuan dan Literasi membahas tentang perjuangan perempuan mendobrak bias-bias patriarkhi baik di dunia politik yang dianggap sebagai *male-dominated sphere* maupun di dalam keluarga. Bab ini juga dilengkapi dengan hasil bedah buku karya para Begawan Akademisi Indonesia misalnya Nurcholis Madjid (almarhum), Amin Abdullah, dan Musdah Mulia. Karya-karya mereka menunjukkan dasar pemikiran maupun aksi dan strategi di dalam memperbaiki posisi perempuan di dalam keluarga maupun hukum keluarga.

Bab III yaitu Keluarga dan Parenting menjelaskan hal-hal yang terkait dengan dinamika keluarga termasuk aspek relasi orang tua dan anak. Pada bab ini misalnya diusulkan agar kepemimpinan di dalam rumah tangga menjadi kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan baik laki-laki maupun perempuan. Mengapa ini perlu? Tulisan pertama dalam bab itu bisa dibaca untuk menemukan jawabannya. Selain itu, keluarga juga harus berfungsi untuk menyeimbangkan antara privasi individu dan keintman sosial. Kedua hal ini seringkali terlupakan di dalam pembicaraan mengenai fungsi keluarga padahal keseimbangan keduanya menjadikan keluarga sebagai "rumahku surgaku."

Bab IV yaitu Metodologi dan Isu Hukum Keluarga. Tulisan-tulisan di dalam bab ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa isu keluarga dan hukum keluarga adalah *cross-cutting issues*, yaitu isu yang berhubungan dengan semua lini kehidupan.

Karna keluarga adalah institusi sosial yang paling kecil, dan tidak ada seorangpun di dunia ini yang sesungguhnya tidak memiliki keluarga, maka pembicaraan dan kajian keluarga ini adalah dasar sekaligus tujuan bagi semua aspek kehidupan. Baik aspek struktural yang berwujud pada aturan, kebijakan, program-program pemerintah maupun aspek kultural misalnya pendidikan dan relasi sosial. Hal ini yang belum banyak disadari.

Oleh karena itu, dalam bab ini ditunjukkan bagaimana forum ilmiah seperti AICIS (*Annual International Conference for Islamic Studies*), *gawe* tahunan kementerian Agama seharusnya meletakkan tema "keluarga dan hukum keluarga" sebagai tema yang harus selalu hadir pada pembicaraan apapun. Demikian pula misalnya dengan Industrialisasi yang menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi NTB perlu memasukkan kajian keluarga dan hukum keluarga untuk mempermudah tercapainya tujuan yang dicanangkan. Buku ini tentu selain memberikan kontribusi pemikiran terkait Islam, Perempuan, dan Hukum Keluarga, tentu saja memiliki keterbatasan. Pemikiran akademik tidak absolut dan tidak final tetapi terikat oleh konteks ruang -waktu dan perspektif serta tentu saja subyektifitas. Hal ini harus diakui. Oleh karena itu, buku ini sangat terbuka bagi diskusi, pengayaan, kritik konstruktif, komentar dan sejenisnya. Tentu saja *feedback* tersebut apapun bentuknya adalah bagian dari tanggungjawab insan akademik memperluas wawasan dan fungsi pengetahuan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung lahirnya buku ini. Ang Rizal Anas yang telah bersedia mengedit

dan mengkompilasi tulisan-tulisan. Platform online yang telah menyebarkan tulisan-tulisan dalam buku ini secara terpisah misalnya alamtara.co, ar-Rahim.id, alif.id, silapedia.com, suaraNTB.com, rri.co.id.

Demikian juga kesempatan dari beberapa forum nasional yang mengundang penulis untuk mengisi forum maupun membedah buku adalah motivasi untuk terus membaca dan menulis. Misalnya Nurcholis Madjid Society, Majlis *Hilful Fudhul*, dan Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

LP2M Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bersedia menerbitkan buku sederhana ini juga perlu mendapatkan apresiasi. Semoga semua dukungan ini mendapatkan balasan sebaik-baiknya di hadapan Allah.

Terakhir, penulis juga selalu ingin menggunakan tulisan dan karya sebagai pedoman dan inspirasi bagi diri sendiri, bagi kehidupan keluarga khususnya orang tua, saudara, suami, dan anak-anak. Agar apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang dilakukan. Oleh karena itu terima kasih juga penulis sampaikan kepada dukungan yang tidak pernah pupus dari keluarga, dari Aba Du Wahid (suami), Aqara Waraqain, Ara Wali, Aribal Waqy, dan Anama Waheeba (empat anak kami). Hanya ini, dan belum apa-apa!

DAFTAR ISI

BAB II

PEREMPUAN DAN LITERASI - 51

BAB III

KELUARGA DAN PARENTING - 107

BAB IV

BAB I

Operasionalisasi Nilai Islam

"Dan sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang (senang) berbuat baik"
(Qs. Al Ankabut 29:69)

Islam dan Iman

Meneladani Nilai Rukun Islam dan Rukun Iman untuk Relasi Ideal Pasutri

SEMUA muslim, sejak kecil sudah diajarkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada lima. Rukun iman ada enam. Jika diminta untuk menyebut, mereka hafal di luar kepala. Rukun Islam adalah syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji (bagi yang mampu). Rukun iman adalah percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab suci, hari akhir, *qadha* (takdir baik) dan *qadar* (takdir buruk). Biasanya kedua rukun tersebut dibicarakan dalam konteks hubungan manusia dengan penciptanya. Bahwa melakukan rukun Islam adalah bukti kepatuhan seorang muslim. Sedangkan menjalankan rukun iman adalah bukti kepercayaan terhadap-Nya.

Tidak banyak yang menggunakan nilai-nilai (*moral of the points*) rukun-rukun ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan berislam dan beriman, manusia memiliki dua dimensi yang tidak terpisah. Hubungan dengan Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan dengan sesama (*hablun min an nas*). Bahwa, hubungan dengan Allah adalah pegangan teologis bagi terciptanya hubungan yang baik dengan sesama dan lingkungan. Sebaliknya, hubungan yang baik dengan alam dan manusia adalah implementasi sosiologis dari hubungan yang baik dengan Allah. Oleh karenanya, nilai-nilai dalam kedua rukun tersebut bisa terus

digali untuk menjadi solusi bagi problem keseharian yang dihadapi oleh umat Islam

Dalam tulisan ini, rukun Islam akan ditempatkan sebagai tips menghindari masalah di dalam keluarga. Sedangkan rukun iman untuk menyelesaikan problem yang tetap saja mungkin timbul.

Ketahanan Keluarga dan Relasi Pasutri

Indikator dari relasi ideal pasangan suami istri bukanlah tidak memiliki problem sama sekali. Problem selalu muncul. Diharapkan atau tidak. Tetapi problem sebenarnya bisa dihindari. Problem hendaknya bukan sesuatu yang sengaja dilakukan. Apabila muncul, maka dengan memiliki relasi yang ideal, pasutri biasanya dapat menghadapi masalah-masalah mereka dengan efektif dan kepala dingin. Manajemen problem yang baik inilah yang merupakan indikator utama dari relasi yang ideal tersebut. Relasi yang ideal dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang didambakan oleh semua pasangan.

Dalam konteks kehidupan keluarga, misalnya, terdapat nilai-nilai dari rukun Iman maupun Islam tersebut yang bisa diaplikasikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga (*family resilience*). Ketahanan keluarga menjadi topik yang sangat signifikan dewasa ini. Tak disangkal, keluarga menghadapi *gap* (kesenjangan) yang menganga antara harapan dan kenyataan. Keluarga diharapkan memulai segala kebaikan dalam proses pendidikan dan pembangunan peradaban. Tetapi, keluarga juga menghadapi tantangan yang begitu berat, dari hari ke hari. Alih-

alih menjalankan fungsi baik, keluarga bahkan banyak menjadi sumber ketidakbaikan.

Berbagai fakta sosial, termasuk disrupsi sosial dan pandemi covid-19, berkontribusi bagi semakin banyaknya problema yang dihadapi keluarga. Resistensi dan resiliensi keluarga melemah. Para anggota keluarga tidak memiliki kemampuan menghadapi perubahan yang begitu cepat. Ini mengakibatkan keutuhan keluarga terkorbankan. Tak ayal, dalam masa pandemi covid-19 yang sudah berlangsung dua tahun terakhir ini, jumlah perceraian semakin meninggi.

Penyebab inti dari perceraian adalah ketidakmampuan suami istri yang merupakan nakhoda kehidupan keluarga meretas problem yang dihadapi. Disadari atau tidak, problem adalah bagian tak terpisah dari kehidupan. Di mana pun, kapan pun, dan dalam level apa pun. Kesadaran ini mungkin dimiliki tiap orang. Tetapi tidak semua orang mau mengakui, menghadapi, lalu memenangkannya. Kehidupan rumah tangga pun tidak pernah sepi dari masalah. Perlu disadari bahwa "masalah adalah sesuatu yang bisa engkau carikan jalan keluarnya. Jika tidak ada jalan keluar, namanya bukan masalah, tetapi takdir." Misalnya, dilahirkan sebagai seorang perempuan dan laki-laki, bukan masalah. Menjadi anak dari orang tua yang miskin atau kaya adalah takdir. Seseorang tidak bisa merubah, kecuali menjalaninya.

Tetapi, jika karena menjadi perempuan atau laki-laki menyebabkan seseorang tertindas, ini adalah masalah, yang bisa dicarikan solusinya. Jika karena miskin, tidak bisa bersekolah, atau karena banyak uang cenderung terlibat pada pergaulan bebas, maka ini harus diretas.

Problem yang dihadapi suami istri beragam. Dengan menggunakan pikiran positif, problem bisa dilihat sebagai cara untuk menguji kuatnya ikatan cinta. Juga, sebagai awal untuk memulai cara lain yang berbeda tetapi lebih baik.

Berita baiknya, berbagai masalah keluarga juga bisa dicegah kehadirannya, misalnya kebosanan, perselingkuhan, KDRT, ketidakpuasan dan daftarnya bisa lebih panjang. Nilai-nilai dalam rukun Islam berfungsi mencegah masalah tersebut timbul. Pelajaran dari rukun Iman bisa menjadi tips untuk keluar dari masalah.

Rukun Islam

Tips Menghindari Masalah dari Rukun Islam

RUKUN Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat ini berisi ikrar seseorang bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Dengan ikrar ini orang dianggap menjadi muslim. Syahadat adalah pengakuan akan adanya Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah dan Rasul adalah manusia terpilih. Nilai pengakuan inilah yang ingin diambil.

Dalam relasi suami dan istri atau juga terhadap anak, kita perlu mengakui secara verbal bahwa pasangan adalah satu-satunya orang yang dicintai dan telah kita pilih menjadi pendamping hidup. Pengakuan ini perlu dilakukan berulang-ulang. Fungsinya untuk terus mengingatkan diri. Juga menyatakan betapa berharganya pasangan kita.

Pengakuan inilah yang sering kali kurang ada pada pasangan. Apalagi jika kehidupan bersuami-istri sudah sekian lama. Seakan-akan rasa saling memiliki sudah *taken for granted*, dianggap biasa, dan tidak perlu diikrarkan. Ikrar ini adalah cara untuk terus memperbaharui ikatan perjanjian yang dulu pernah diikrarkan lewat ijab kabul. Siapakah yang harus melakukan? Ya, kedua pasangan.

Rukun Islam yang kedua adalah salat. Salat harus dilakukan dalam jumlah rakaat tertentu dan dalam waktu yang sudah dibatasi. Ukuran yang sesuai kadar inilah yang diambil dari nilai salat. Berkomunikasi, memuji, mengkritik harus dilakukan dalam kadar yang proporsional. Tidak lebih, sehingga terkesan ribut dan resek. Tidak kurang, sehingga terkesan tidak punya waktu dan tidak perhatian. Dalam hidup berpasangan, memuji dan mengkritik perlu juga memilih waktu yang tepat. Perhatikan kondisi, *mood*, cara, dan konteks. Sehingga pesan yang disampaikan akan produktif dan sebisa mungkin tidak terlalu mengangkat atau merendahkan pihak yang lain.

Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat personal. Hanya seorang hamba dan Tuhan yang mengetahui ibadah ini benar-benar dilakukan atau tidak. Untuk mendapatkan pahala puasa, maka seseorang perlu menjaga dirinya dari melakukan hal yang membatalkan benar-benar di hadapan Allah sebagai saksinya. Intinya perlu menahan diri ada atau tidak ada orang yang menyaksikan.

Nilai menahan diri inilah yang perlu diambil. Masalah di dalam keluarga sering muncul karena ketidakmampuan salah seorang pasangan untuk menahan, menjaga diri dari perbuatan yang melampaui batas hanya karena jauh dari kesaksian pasangan atau orang lain.

Kesaksian Allah tidak menjadi perhitungan. Banyak gurauan yang dilontarkan tentang ini. “Boleh selingkuh asal tidak ketahuan”. “Isinya boleh dibuang di luar rumah, yang penting

botolnya kembali”. Nilai menahan diri karena Allah semata yang Maha Melihat perlu dipegang untuk menjaga diri. Demi mempertahankan keharmonisan hubungan keluarga.

Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat adalah memberi mereka yang membutuhkan dalam hal ini memberi harta. Dengan zakat kita diajarkan untuk tidak pelit. Kepada orang lain kita harus mendermakan harta, apalagi kepada pasangan.

Ada suami yang terlewat pelit kepada istrinya karena alasan harus memberi ibunya. Istri juga berhak untuk mendapatkan nafkah sehingga hak dia tidak boleh terkorbankan karena berdalih kewajiban terhadap orang tua. Demikian juga jika istri memiliki harta, tidak usah berdalih “uang suami uang istri, uang istri adalah uangnya sendiri”. Hal ini tidak mengedepankan saling menolong dan bermurah hati di dalam rumah tangga.

Nilai zakat adalah nilai memberi. Berikanlah apa saja yang dimiliki terhadap pasangan, tidak hanya materi. Senyuman, ucapan terima kasih, kata maaf, wajah yang menyejukkan, rasa mengalah dan sebagainya. Sekali lagi ini berjalan dua arah. Bukan istri saja, dan bukan suami saja.

Rukun Islam yang kelima adalah haji (bagi yang mampu). Haji memang hanya bagi mereka yang mampu secara finansial maupun fisikal. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan keislaman, haji perlu diupayakan sedemikian rupa. Haji juga melambangkan solidaritas sosial umat Islam di seluruh dunia. Nilai solidaritas sosial inilah yang diambil dari haji.

Berpasangan adalah bersolidaritas. Ada nilai saling menerima, menghargai, memperbaiki, membanggakan, dan menjadi bagian dari yang lainnya. Istri dan suami adalah dua manusia yang telah menjadi satu untuk menggapai visi yang sama. Rasa solidaritas ini juga akan lebih sempurna jika diperlebar lagi tidak hanya terbatas pada kedua pribadi. Tetapi juga pada kedua keluarga.

Bagi budaya orang Indonesia, atau budaya ke-Timur-an, yang memiliki keluarga besar dan *extended family*, rasa solidaritas antar keluarga ini akan semakin memperkuat ikatan bersuami dan beristri. Ketika terjadi masalah pun, masing-masing bisa menjaga diri dan menutupi aib demi menjaga nama baik keluarga. Tetapi, tentu juga wajar, masalah tetap akan muncul walaupun kita sudah berusaha menghindar. Tetapi manajemen diri seperti yang disampaikan di atas paling tidak bisa memperingan bobot masalah yang timbul. Juga dapat menjernihkan sikap kita terhadap masalah. Nah, jika kita menghadapi masalah, maka nilai-nilai dalam rukun iman perlu menjadi pelajaran untuk menyelesaikannya.

Rukun Iman

Tips Menyelesaikan Masalah dari Rukun Iman

RUKUN Iman yang pertama adalah percaya terhadap Allah sebagai pencipta segala sesuatu dan yang maha berkuasa. Apa pun yang terjadi di dunia adalah kehendak Allah. Ketika kita sudah berupaya dan bersikap untuk menghindari masalah, lalu masalah datang, kita meyakini sebagai orang beriman, itu adalah kuasa Allah. Allah menguji kita dengan masalah, tetapi Allah juga menyediakan solusi.

Dengan akal dan nurani yang dianugerahkan, kita bisa menggunakannya untuk mencari dan menemukan solusi terbaik. Tentu, usaha ini juga diringi dengan memohon kepada Sang Pencipta untuk mempermudah segalanya. Ikhtiar yang dibarengi oleh doa adalah wujud nyata keimanan kita. Dengan cara ini, kita bisa memandang bahwa masalah yang dihadapi adalah kecil jua di hadapan kuasa Allah yang Maha Besar.

Rukun Iman yang kedua adalah mempercayai adanya malaikat- malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat salah dan selalu menaatinya. Pada saat manusia pertama (Adam) diciptakan, malaikat protes. “Untuk apa menciptakan manusia yang akan menghancurkan bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami ini terus bertasbih dan memuji-Mu”. Allah meyakinkan mereka bahwa Allah lebih tahu daripada malaikat tentang apa yang akan Dia lakukan.

Kita perlu mengingat keraguan malaikat ini terhadap penciptaan manusia. Bahwa manusia akan menciptakan masalah di muka bumi. Menumpahkan darah dan bertengkar, serta merusak. Maka ketika menghadapi masalah dalam skala yang paling kecil yaitu dalam keluarga, manusia perlu fokus pada pencarian solusi. Tidak memperbesar masalah. Apalagi sampai melebar sehingga destruktif dan mengorbankan satu sama lain. Tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, apalagi menumpahkan darah. Kepercayaan Allah kepada manusia sampai Dia berdebat dengan makhluk yang paling taat pada-Nya perlu dijaga.

Bagaimana caranya?

Fokus pada masalah yang dihadapi! Jangan kait-kaitkan dengan masa lalu atau hal lain yang sebenarnya justru akan membuat runyam. Contoh, jika masalahnya adalah berawal dari rumah yang tidak bersih karena istri tidak sempat membersihkan atau suami tidak mau membantu. Solusinya adalah manajemen waktu yang lebih ketat oleh istri. Atau menumbuhkan kemauan untuk ikut berpartisipasi pada urusan rumah tangga oleh suami.

Jangan mengkaitkan dengan kondisi istri yang bekerja di luar rumah, atau mengungkit masa lalu suami yang tidak pernah dilatih oleh orang tuanya melakukan pekerjaan rumah. Hal-hal seperti itu yang akan memperbesar masalah. Atau ada keterlibatan orang lain atau lembaga lain yang ikut disalahkan. Apakah bisa kemudian solusinya, istri berhenti bekerja? Apakah lembaga itu yang harus memberi waktu khusus untuk istri membersihkan rumah? Juga, apakah suami harus balik menjadi anak kecil lagi

sehingga dibiasakan lagi dalam lingkungan keluarga asalnya? Beberapa solusi yang lebih kompleks seperti ini sulit diupayakan. Bahkan tidak mungkin.

Masalah kecil yang diperbesar cenderung menjauhkan kita dari solusi. Lalu menumpuk, hanya menunggu waktu untuk meletus (eksplosif). Pada saat itulah kita mengimani adanya malaikat sekaligus membuktikan bahwa prasangka mereka tidak terjadi di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita

Rukun Iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab, salah satunya al-Qur'an, petunjuk tertulis bagi kehidupan manusia yang langsung diturunkan oleh Allah. Al-Qur'an dari segi bahasa adalah sesuatu yang dibaca. Ayat pertama pun adalah perintah membaca. Dari sini kita dapat mengambil ajaran bahwa membaca adalah menemukan petunjuk dan memahami pedoman.

Ketika menghadapi problem, pasutri perlu membaca situasi, membaca tips-tips penanganan. Dewasa ini, sumber banyak sekali yang bisa diakses. Referensi berupa buku elektronik maupun kertas lebih mudah didapatkan. Buku adalah sahabat yang paling jujur. Menasehati pasangan lewat buku juga menjadi cara yang efektif dan romantis. Buku biasanya ditulis oleh para ahli dengan topik terkait. Jangan segan mengkonsultasikan dengan referensi yang relevan ketika merasa buntu menghadapi masalah yang timbul.

Selanjutnya rukun Iman yang keempat adalah iman kepada rasul Allah. Rasul adalah utusan bagi tiap-tiap umat manusia untuk

menjelaskan kitab atau ajaran Allah. Rasul adalah orang-orang yang terpilih. Mereka memiliki kemampuan dan kepribadian yang unggul. Sehingga Allah mengamanahkan tugas berat. Menemani umat dan menjawab permasalahan yang dihadapi. Dari rukun iman yang ini, kita dapat mengambil ajaran bahwa ada orang-orang tertentu yang karena kemampuan dan keahliannya bisa dipercaya. Sekarang, banyak muncul konsultan masalah keluarga yang bisa membantu. Biasanya permasalahan keluarga ditangani dulu oleh orang-orang terdekat. Rembug antar keluarga kedua belah pihak.

Akan tetapi, sering kali, hal ini menjadi tidak efektif ketika masing-masing pihak menilai secara subyektif. Hal ini karena ada ikatan emosional dengan pihak yang sedang bermasalah. Jika tidak mampu menyelesaikan, perlu untuk menghubungi mereka yang ahli untuk bisa berkonsultasi. Karena dalam sebuah konflik, selalu ada dua sisi cerita yang sering berlawanan. Mediator akan berupaya menghadirkan sisi ketiga yang biasanya lebih obyektif dan mengurai persoalan.

Iman yang kelima adalah kepada hari akhir. Akhir adalah ujung dari kehidupan manusia di dunia. Mengimani ini adalah juga mengakui bahwa kehidupan dunia ini tidak ada yang abadi. Masalah yang merupakan bagian terkecil dari kehidupan juga pasti berakhir. *Time heals*. Begitu kata orang. Masalah berlalu atau terlupakan seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi, yang menentukan baiknya hari akhir (*husnulkhatimah*) ialah kita yakni tergantung bagaimana proses hidup yang dilalui. Masalah akan berakhir baik jika proses penyelesaiannya juga dilakukan dengan

baik. Yakin saja, bahwa badai pasti berlalu. Karena itu adalah sunatullah. Keyakinan ini akan memberikan kekuatan menghadapi masalah secara jernih.

Iman yang keenam adalah percaya kepada *qadha*’ (takdir baik) dan *qadar* (takdir buruk). Ada kebaikan dan keburukan yang timbul dalam masalah. Pelajari kedua hal tersebut. Pertahankan yang baik, lalu buang hal yang buruk. Misalnya masalah yang berkaitan dengan kemampuan finansial keluarga yang berubah menurun. Dengan perspektif syukur dan sabar, kita akan melihat itu sebagai ujian untuk memperkuat ikatan cinta. Terlepas dari dampak buruknya yang mengganggu stabilitas pemenuhan kebutuhan keluarga. Fokus dan refleksikan sebab dari semua itu, daripada terlena memikirkan masalah. Apakah karena manajemen keuangan yang tidak baik? Apakah karena etos kerja yang bermasalah? Temukan faktor-faktor penyebab sehingga bisa memutuskan solusi yang tepat. Hindari sikap saling menyalahkan bahwa problem keuangan ini karena istri boros dan suami yang malas. Cukup hal itu diketahui untuk menjadi titik tolak perbaikan. Tentu dengan mengedepankan introspeksi diri.

Jelaslah dari pemaparan di atas, bahwa nilai-nilai rukun iman itu jika dihayati penuh akan mengilhami solusi-solusi praktis bagi kehidupan. Inilah wujud dari berislam dan beriman yang ‘hidup’ dan memperbaiki diri dalam relasi sosial. Tidak berhenti pada kesalehan individual. Atau pada beragama yang formalistik dan kering dari dampak positif terhadap diri dan sesama.

Tips menghindari masalah maupun mencari solusi masalah di atas harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk berhasilnya upaya-upaya tersebut. Suami dan istri dalam posisinya yang setara adalah dua insan yang berkesempatan untuk memperbaiki diri juga saling memperbaiki. Itulah makna yang bisa diambil dari pernyataan bahwa menikah adalah ibadah terlama sebagaimana yang sering kita dengar. Ibadah untuk terus *muhasabah* (menghitung kekurangan diri) dan *islah* (memperbaiki diri).

Untuk melakukan hal ini kita memerlukan bantuan pasangan untuk saling mengingatkan dan menggandeng. Kesalingan inilah yang akan memberikan fondasi yang kuat bagi pernikahan seorang muslim. Sehingga benar-benar ikatan pernikahan bagi mereka adalah ikatan yang kokoh dan kuat (*mitsaqan ghalidza*) sebagaimana digambarkan oleh al-Qur'an. Kitab suci yang mereka percaya (iman) dan tunduk (Islam) pada aturan di dalamnya.

Puasa dan Kejujuran:
Memperkuat Integritas Personal, Mewujudkan Keadilan Sosial

SUDAH menjadi pemahaman bersama bahwa puasa adalah ibadah yang menjadikan kejujuran sebagai pra-syarat utama. Tanpa kejujuran maka syarat dan rukun puasa hanyalah sebuah formalitas yang kering bahkan tidak memiliki substansi. Pada titik ini, puasa sebenarnya sudah berada pada level ihsan, yang lebih tinggi dari iman dan Islam.

Jika iman adalah terutama tentang keyakinan dan Islam adalah tentang ketaatan beramal, sedangkan ihsan adalah tujuan akhir dari keduanya. Yaitu ketika seseorang merasa bahwa tidak ada sejengkal pun dari apa yang seorang hamba lakukan yang luput dari kesaksian dan penilaian Tuhan. Pada level ihsan seorang hamba melakukan sesuatu seakan-akan Allah nyata terlihat di depannya. Walaupun senyatanya hamba tidak bisa melihat karena begitu terbatasnya kemampuan mata di hadapan Allah, maka Allah adalah CCTV 24 jam yang tidak pernah abai dan mati.

Kejujuran pada ibadah puasa adalah kejujuran internal atau kejujuran personal. Kejujuran jenis ini bukan untuk membahagiakan orang lain. Bukan pula terutama untuk menunaikan kewajiban terhadap orang lain. Kejujuran ini memerlukan kesadaran dan keyakinan bahwa kita melakukan sesuatu sebenarnya karena diri sendiri. Bukan pencitraan, bukan

pula karena ingin mendapatkan penghargaan. Semata-mata hanya karena alasan ihsan dalam bentuk integritas.

Perjuangan puasa tidak terutama pada apa yang dilihat oleh orang lain, misalnya pucat karena lapar dan lemas karena rasa haus. Karena penampakan fisik seperti ini sangat bisa dimanipulasi. Puasa adalah ibadah yang paling rahasia yang hanya bisa diketahui dalam relasi hamba dan Tuhan seorang manusia dan pencipta-Nya. Nabi saw bersabda: "*Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan".*

Dalam hadis tersebut secara khusus disebutkan bahwa syarat puasa diterima adalah meninggalkan perkataan dusta atau tidak berbohong. Kebohongan adalah lawan dari kejujuran. Hanya saja bentuk kejujuran sangat beragam, tidak saja terbatas pada tidak berkata dusta. Menurut Mustari (2011: 13-15) jujur adalah perilaku yang ditunjukkan agar seorang individu dapat selalu dipercaya baik pada ucapan, tindakan, pekerjaan, dan arahnya tidak hanya kepada orang lain tetapi juga pada diri sendiri. Definisi ini menggambarkan bahwa kejujuran adalah sikap amanah untuk menyampaikan segala sesuatu apa adanya, melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya, dan menyampaikan hak orang lain sebagaimana aturannya. Sikap amanah sebagai bentuk kejujuran inilah yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini.

`Amanah sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab. Puasa Ramadan yang wajib selama sebulan kita laksanakan tiap tahun adalah latihan untuk terus mengingat, menjalankan,

memperkuat dan terus meningkatkan sikap amanah dan tanggung jawab umat Islam. Amanah terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap makhluk lainnya, dan terhadap lingkungan. Amanah adalah salah satu sikap Nabi yang perlu diteladani. Dengan sikap amanah yang diproyeksikan ke segala arah, selayaknya bisa menjadi fondasi yang utama di dalam menciptakan nilai fundamental Islam yaitu keadilan. Bagaimana hubungan antara sifat amanah dengan keadilan?

Adil sendiri secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya (*wadh'u syai'in fi mahallihi*). Lawan dari kata adil adalah zalim yang berarti tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dari arti kata adil secara bahasa ini, maka sebenarnya keadilan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana yang merupakan *everyday life* dan berawal dari diri sendiri (*ibda' binafsik*). Dikatakan tidak adil jika sesuatu yang seharusnya dipakai oleh kaki diletakkan pada kepala, demikian sebaliknya, karena segala sesuatu memiliki tempat masing-masing.

Kullu sya'iin ala qadrihi, segala sesuatu ada ukuran dan takarannya. Sikap adil adalah meletakkan sesuatu pada takaran dan tempatnya. Ritual puasa mengajarkan kepada kita semua bahwa makan dan minum harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang dibatasi. *Kitaban mauquuta*, sahur dilakukan menjelang masuknya waktu imsak, berbuka yang dilakukan pada waktu salat Maghrib masuk yang menandai awal dan akhirnya waktu menahan diri dari makan dan minum, berhubungan seks yang halal adalah latihan meletakkan sesuatu pada waktunya masing-masing.

Tidak berlebih-lebihan di dalam menyantap makanan pada saat berbuka dan juga sahur adalah juga ajaran atau latihan untuk memberikan hak fisik sesuai dengan ukurannya. Demikian juga menahan diri dari berkata bohong, perbuatan tercela, menghina, dan sebagainya selama melakukan puasa adalah latihan agar tindakan-tindakan terpuji yang merupakan fitrah kemanusiaan diposisikan kembali pada tempatnya.

Bersikap adil terhadap diri sendiri ini diharapkan menjadi pembiasaan bagi seorang hamba agar lebih mudah beranjak ke level berikutnya yaitu adil terhadap sesama. Dimulai dari lingkungan terkecil dan terdekat yang kemudian meningkat pada sistem yang lebih kompleks sehingga tercipta keadilan sosial yang menjadi harapan bersama dan merupakan ejawantah dari ajaran agama.

Keadilan sosial adalah keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Keadilan sosial ini secara sistem mengharuskan berjalannya fungsi-fungsi setiap aspek yang terlibat dalam sebuah sistem. Hanya saja karena sistem terdiri dari individu maka tetap saja titik berangkatnya adalah pada karakter individu yang terbiasa bersikap adil. Dalam hubungannya dengan amanah dan tanggung jawab, keadilan tidak dapat diwujudkan tanpa sikap amanah dan tanggung jawab ini sendiri.

Bersikap adil terhadap diri sendiri misalnya diawali dengan kemauan menerima tanggung jawab sebagai seorang individu yang harus menjaga dirinya semata-mata dalam konteks tujuan penciptaannya untuk beribadah kepada Tuhannya. *Wa ma*

khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun. Maka Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.

Dengan kesadaran menerima amanah penciptaan ini, maka seorang individu akan selalu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, misalnya saja melakukan *time management* yang baik sehingga kewajiban terhadap dirinya sendiri bisa dilakukan secara seimbang. Kapan memberikan hak kepada badannya, kapan badannya diberikan tugas untuk melakukan kewajibannya. Menyeimbangkan hal dan kewajiban ini adalah contoh bersikap adil yang mensyaratkan sikap amanah tadi.

Menurut Plato ada dua teori keadilan yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral adalah ketika seseorang mampu memberi perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, sedangkan keadilan prosedural adalah jika melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan atau moderatisme dalam tingkah laku manusia yaitu ketika mereka terjaga dari kedua ujung yang ekstrim, tidak terlalu banyak atau sedikit.

Dari dua pendapat di atas maka keadilan adalah seimbangnya antara hak dan kewajiban. Ajaran Islam selalu menekankan masalah ini termasuk pada kewajiban puasa. Puasa mewajibkan manusia untuk menahan hawa nafsu yang sering kali manusia biarkan liar tanpa berujung. Hawa nafsu perlu dikebiri

sedemikian rupa sehingga hati nurani lebih tajam terasah. Menahan hawa nafsu ini menjadikan manusia lebih bisa melakukan refleksi atau muhasabah dan kemudian mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ketika manusia lebih dekat kepada Tuhan maka manusia lebih bisa menyerap cahaya Tuhan yang penuh rahman dan rahim, penuh cinta dan sayang.

Menahan makan dan minum yang merupakan kebutuhan fisik yang primer membuat manusia lebih merasakan pengalaman menjadi kaum papa yang kebutuhan primer mereka tidak selalu tersedia. Rasa empati lalu terasah dan yang kemudian manusia bisa secara lebih ringan membantu kaum yang lemah. Pada titik ini, mereka yang menjalankan puasa dituntut untuk jujur mengakui bahwa dalam hartanya ada hak mereka yang tidak beruntung untuk didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan.

Orang yang berpuasa dan menyelami secara mendalam bagaimana puasa seharusnya mengantarkan mereka pada sikap jujur, tidak akan memberi kesempatan sekecil apa pun untuk memanfaatkan, mengambil, atau menikmati segala sesuatu yang bukan merupakan haknya. Ia secara jujur dan bertanggung jawab memisahkan yang hak dan yang batil dalam perilaku hidupnya. Inilah sebenarnya titik tuju yang diperintahkan Allah ketika Dia mengatakan bahwa berpuasa itu dilakukan agar semua kalian bertakwa (*la'allakum tattaquun*). Takwa adalah merasa khawatir dan takut untuk tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama yang telah difirmankan-Nya, di mana menjaga amanah dan bersikap jujur bertanggung jawab adalah salah satunya.

Kita saksikan betapa banyak kasus-kasus di sekitar kita yang melibatkan orang muslim yang tidak bersikap amanah pada tanggung jawab yang diembannya. Kasus korupsi, penipuan, pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan seksual, dan KDRT adalah sebagian saja dari pelanggaran-pelanggaran berat yang kita dengar dalam berita sehari-hari. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini belum juga bisa diberantas, alih-alih menuju titik zero. Yang ada malah semakin kita rasakan kompleksitasnya. Kemajuan informasi dan teknologi menjadikan pelanggaran-pelanggaran tersebut lebih modern lagi cara dan sistemnya.

Kasus afiliator Binomo, kasus pemimpin pondok pesantren menghamili santrinya, kasus korupsi yang melibatkan para Menteri dan sebagainya terpampang jelas. Dan sebagian besar pelakunya adalah mereka yang mendaulat diri dan berpenampilan sangat religius. Kita lalu bisa berasumsi bahwa sebenarnya puasa yang dilakukan belum bisa mengantarkan kita pada sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana keadilan sosial bisa kita raih kalau sikap yang menjadi prasyarat ini belum jua bisa tercipta.

Maka marilah, pada kesempatan berpuasa di bulan Ramadan kali ini kita semua sama-sama bertanya pada diri sendiri! Apa tujuan kita berpuasa? Apakah hanya ritual formal agar gugurnya kewajiban atau lebih menukik lagi pada hal-hal yang lebih substantif? Sepanjang kita masih berkesempatan untuk berbuat baik, membuktikan diri untuk menerima amanah sebagai

hamba Allah yang beribadah dan menyalakan cahaya Tuhan dalam diri untuk memberi terang jalan dan orang lain, mari manfaatkan bulan puasa kali ini untuk bersikap jujur karena tanpa sikap ini, keadilan sosial yang kita damba bersama tidak bisa diwujudkan.

Negosiasi Ruang:

Menjalankan Perintah Agama dan Mewujudkan Keadilan Gender

TULISAN kali ini adalah "*Negosiasi ruang: Upaya menjalankan perintah agama sekaligus mewujudkan keadilan gender*". Konsep negosiasi ruang adalah sebuah ide yang masih terus dielaborasi sehingga dapat menjadi alternatif solusi bagi peminggiran dan ketidakadilan. Konsep negosiasi ruang ini diturunkan dari judul buku saya pada tahun 2007 yang merupakan tesis pada program pascasarjana di bidang sosiologi hukum konsentrasi gender studies di University of Northern Iowa, Amerika Serikat.

Secara metodologis, ketika saya melakukan penelusuran dengan menggunakan pendekatan *autoethnography* pada semua hasil tulisan saya dari 2007 sampai kini, kata kunci yang menjadi benang merah dari semua kajian dan tulisan itu adalah "negosiasi ruang". Dari sini, saya berkesimpulan bahwa term ini bisa menjadi sebuah konsep yang bisa ditawarkan sebagai gagasan yang operasional untuk mewujudkan keadilan sosial, termasuk keadilan gender.

Pada tulisan ini, negosiasi ruang akan dielaborasi dalam tiga bagian. *Pertama*, ilustrasi kasus untuk menggambarkan apa dan bagaimana negosiasi ruang? Sehingga bisa dipahami betapa pentingnya upaya ini dilakukan *Kedua*, landasan filosofis dan

teologis negosiasi ruang yang dimaksud. *Ketiga*, bagaimana negosiasi ruang menjadi alternatif (kalau bukan hal yang utama) dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama, yaitu keadilan sosial termasuk di dalamnya keadilan gender, di mana laki-laki dan perempuan bisa berada pada posisi setara dan meneguk cita rasa keadilan bersama-sama.

Pengertian keadilan sosial sebenarnya mencakup keadilan gender, karena memang gender dan jenis kelamin merupakan klasifikasi sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hanya saja, keadilan sosial dalam perspektif gender perlu dibicarakan secara khusus karena perbedaan jenis kelamin biologis yang melahirkan pembedaan peran sosial (gender) sering kali luput dari pembicaraan tentang maupun praktik keadilan sosial dari dulu sampai sekarang.

Para filosof Yunani, seperti Plato, Aristoteles, dan John Rawls sebenarnya getol berbicara tentang keadilan sosial[1] tetapi menyampingkan isu keperempuanan, bahkan oleh banyak pihak mereka dianggap seksis dan diskriminatif. Demikian pula para filsuf abad 18 seperti JJ. Rousseau, Jhon Milton, dan sebagainya. Pada konteks itulah misalnya muncul gerakan perempuan pertama dari seorang filsuf perempuan Inggris yang bernama Mary Wollstonecraft dalam karyanya yang berjudul "*A Vindication of the rights of women*, pada abad ke 18.[2]

---

[1] http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf
[2] https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-feminisme-dalam-bingkai-filsafat-barat-1qqbDcV48RO.

Bagaimana dengan Islam? Sebelum sampai ke situ, saya ingin kembali ke sistematika awal yang saya sebutkan sebelumnya yaitu ilustrasi, landasan filosofis, dan teologis, serta signifikansi dan metode aplikasi negosiasi ruang ini. Sebagai ilustrasi, kita banyak menghadapi berbagai ketimpangan dalam kehidupan sehari-hari yang menggiring kita menjadi pelaku atau korban atau menjadi pelaku sekaligus korban dari lima bentuk ketidakadilan gender yaitu: perendahan, peminggiran, pelabelan negatif, kekerasan, dan beban berlebih.

Perendahan mewujud dalam anggapan kita melihat seseorang atau sekelompok sebagai pihak yang tidak memiliki kemampuan hanya karena jenis kelaminnya atau status sosialnya. Peminggiran berbentuk menyampingkan mereka dari akses terhadap sumber daya.

Contoh sederhana misalnya di dalam rumah tangga. Kita selalu mengatakan bahwa perempuan adalah pendidik utama bagi anaknya dan generasi, tetapi ketika seorang perempuan yang notabene menjadi istri ingin melanjutkan pendidikan, sekedar mengikuti pengajian, atau bahkan menonton televisi edukatif, mereka tidak memberikan waktu untuk kita. Pembatasan kesempatan ini bisa dilakukan secara sengaja atau karena beban kerja yang berlebih sehingga mereka tidak bisa mengembangkan *skill parenting*-nya sesuai dengan perkembangan zaman dan teori-teori *parenting* terkini. Hal seperti inilah yang kita sebut sebagai peminggiran terhadap perempuan. Tentu masih banyak contoh lain yang bisa kita saksikan atau bahkan kita alami.

Lalu bagaimana peminggiran ini terjadi? Dari ilustrasi di atas, beban berlebih sebagai seorang istri menjadi faktor utama sehingga perempuan tidak memiliki waktu untuk akses terhadap hak-hak dasar mereka misalnya hak pendidikan. Beban berlebih ini terjadi karena masih banyak keluarga yang tidak mempraktikkan apa yang saya sebut sebagai "negosiasi ruang".

Perempuan dimapankan sebagai makhluk domestik yang waktunya habis untuk melayani orang lain sementara laki-laki adalah makhluk publik yang bebas mengeksplorasi hal-hal di luar tembok rumah tangga. Sedangkan perempuan, ketika menjadi istri, cita-cita dan keinginan mereka sering kali pupus dan harus cukup berbahagia disertai dengan iming-iming sebagai wanita salehah ketika harus berdiam diri di rumah, melayani tanpa *reserve* semua kebutuhan anggota keluarga tanpa memikirkan dunia mereka sendiri, bahkan tidak memiliki "*me time*" lagi. Perempuan selalu menjadi media bukan tujuan.

Jika saja tembok tebal yang memisahkan antara dua ruang ini bisa kita jebol dan ruang ini bisa dibagi dan sesekali dipertukarkan, maka kehidupan keluarga tidak lagi menjadi relasi kuasa antara tuan dan majikan, tetapi menjadi relasi setara yang penuh dengan nilai kesalingan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya.

Sedangkan ruang adalah rongga yang berbatas maupun yang tidak berbatas, tempat segala yang ada. Jadi negosiasi ruang secara bahasa adalah kemauan untuk berbincang dan menyepakati pembagian ruang antara kedua belah pihak yang berkepentingan, baik ruang yang berwujud sebagai sebuah bangunan maupun ruang dalam pengertian yang abstrak misalnya ruang sosial, ruang politik, ruang ekonomi, dan sebagainya.

Bisa dimengerti bahwa yang dimaksud negosiasi ruang dalam konteks keadilan sosial yang berperspektif gender adalah kemauan bersama perempuan dan laki-laki menyepakati ranah pengabdian baik sebagai hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial dan juga sebagai individu yang merdeka.

Sebagai keinginan bersama, negosiasi ruang ini mensyaratkan partisipasi aktif kedua belah pihak yang berlangsung secara dialogis (*two-ways*) yang mengandung kerelaan untuk berbagi (*willingness to share*) di satu pihak, dan keteguhan untuk memperjuangkan hak sekaligus melaksanakan tanggung jawab (*assertiveness to fight and accept*) di pihak lain, karena sesungguhnya kedua ruang itu adalah hak sekaligus kewajiban bagi masing-masing pihak. Jika tidak, maka inilah yang menyulitkan kita untuk berbicara bagaimana mewujudkan keadilan yang hakiki atau sejatinya adil.

Negosiasi ruang adalah proses yang berlangsung dua arah, ada kesalingan, ada komunikasi yang sehat dan setara, dan proses ini menjadi sebab sekaligus akibat dari setaranya posisi kedua belah pihak. Negosiasi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa posisi

yang setara dan kalaupun tidak setara, dengan negosiasi ruang yang dilakukan, maka kedua belah pihak dapat lambat laun menyetarakan posisinya.

Gambaran kesetaraan dan proses negosiasi dalam rumah tangga seperti di atas bisa juga dibawa dalam level yang lebih luas, kehidupan sosial maupun tataran berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan penyamarataan distribusi ekonomi, misalnya, perlu adanya negosiasi ruang, keinginan berbagi dari yang memiliki kelebihan dan keteguhan untuk memperjuangkan hak bagi yang merasa kurang maupun oleh sistem yang disetujui bersama sebagai mekanisme mewujudkan keadilan tersebut.

Dalam konteks relasi pemerintah dengan rakyat misalnya, negosiasi ruang ini harus tampak pada bagaimana kedua belah pihak ini bisa saling menyelami kepentingan dan melaksanakan kewajiban masing-masing, saling mendengar, dan saling merasa. Ada ruang-ruang di mana suara masing-masing pihak bisa diperdengarkan sehingga komunikasi lancar dan tidak buntu. Dengan mekanisme ini, maka sikap otoriter dan menang sendiri bisa dikikis habis. Dengan negosiasi ruang, nilai-nilai demokrasi dilapangkan jalannya untuk menjadi sistem kehidupan bersama.

Apakah negosiasi ruang ini memiliki landasan filosofis dan teologis terutama dalam keberagamaan kita sebagai muslim? Secara filosofis, ketika manusia diciptakan sebagai khalifah, baik laki-laki yang dimulai oleh Adam dan perempuan yang diawali oleh Hawa, semua kita punya tanggung jawab untuk membuat kehidupan di bumi aman dan damai. Tidak melakukan kerusakan

ekologis maupun kekerasan sosial. Di sisi lain, masing-masing manusia punya kepentingan individual tertentu yang terkadang destruktif dan egoistis. Agar tidak destruktif, maka kepentingan-kepentingan ini harus sedemikian rupa dinegosiasikan sehingga yang dikedepankan adalah kesepakatan atas dasar kepentingan bersama (*kalimatun sawa'*).

Terjadinya peperangan, penindasan, penghancuran lingkungan karena kepentingan pihak tertentu diekspresikan sedemikian rupa tanpa adanya negosiasi dengan kepentingan-kepentingan pihak lain. Manusia sebagai khalifah menjalankan amanah kepercayaan Allah seperti yang tergambar dalam surat al-Baqarah ayat 30 ketika malaikat-Nya saja memprotes rencana Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, Allah meyakinkan mereka dengan mengatakan bahwa "Saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui".

Selanjutnya, dalam surat al-Hujurat ayat 13 Allah menggambarkan bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku suku. Hal tersebut untuk saling mengenal sebagai langkah awal memiliki keterampilan dan kesempatan bernegosiasi). Perbedaan tersebut tidak sama sekali menandakan pembedaan, karena yang akhirnya menentukan posisi kemuliaan di hadapan-Nya adalah ketakwaan kita masing-masing.

Takwa sederhananya adalah menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah-Nya. Sebagai muslim kita telah memahami bahwa perbuatan adil adalah perintah Allah. Adil adalah lawan dari perbuatan zalim yang merupakan larangan yang berulang kali

ditekankan lewat kitab suci-Nya. Secara khusus, landasan teologis dari konsep negosiasi ruang ini adalah surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:[3]

Tafassahuu fil majalis di sini yang berarti berlapang-lapanglah di dalam suatu majelis bisa kita maknai dengan negosiasi ruang. *Asbab an Nuzul* ayat ini dikisahkan bahwa di sebuah majelis ilmu pada hari Jum'at bertempat di pelataran masjid Nabawi sejumlah sahabat sedang mendengarkan Rasulullah berceramah dan dalam suasana sesak. Di tengah acara tersebut para ahli badar (sahabat yang dimuliakan Nabi karena partisipasinya di Perang Badar) tiba. Mereka mengucapkan salam dan para anggota majelis pun menjawab tetapi tidak ada yang bergerak mempersilahkan mereka untuk ikut duduk atau bergantian. Lalu Nabi saw meminta sebagian anggota majelis itu untuk berdiri dan memberikan tempat kepada sahabat yang baru tiba. Mereka pun protes dan menganggap Nabi tidak adil. Turunlah ayat tersebut untuk menegur sikap para sahabat.

Jadi, dalam memperoleh akses pendidikan kita tidak boleh memonopoli ruang, kesempatan, dan informasi. Ayat tersebut jelas memerintahkan betapa masing-masing kita harus "legowo" berbagi ruang dengan sesama.

Dalam konteks relasi gender, perempuan dan laki-laki harus sama-sama memberikan akses, partisipasi, kesempatan, dan manfaat dari semua mekanisme sosial yang mereka libati. Hal ini

---

3 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

tidak hanya menjamin kehidupan sosial yang lebih egaliter, bermanfaat, dan berkemajuan, tetapi juga merupakan salah satu jalan menaati perintahnya menuju karakteristik *muttaqin* atau bertakwa yang akan menentukan kemuliaan kita di sisi-Nya.

Lalu bagaimanakah negosiasi ruang ini bisa menjadi alternatif bagi perwujudan keadilan dan kesetaraan gender?

Dalam wacana gender, keadilan yang dimaksud tidak harus sama rata, tetapi bersifat *distributive* di mana masing-masing pihak mendapatkan bagian atau perlakuan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Sehingga dikenal juga istilah *affirmative action*, atau kebijakan khusus. Contohnya terhadap orang yang postur tubuhnya tinggi, menengah, dan pendek, kita perlu memberikan *treatment* yang berbeda untuk memastikan bahwa mereka bisa mengakses pertandingan sepak bola di balik tembok pagar yang tinggi. Yang berpostur pendek mungkin diberikan bangku susun, sedangkan yang menengah hanya satu susun sedangkan yang tinggi tidak perlu.

Mengapa kita melakukan ini? Untuk mewujudkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat semua pihak. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa ada kesediaan berbagi, menegosiasikan kepentingan masing-masing pihak agar keadilan menjadi jalan lempang bagi terwujudkan kesamaan yang menimbulkan kebahagiaan bersama.

Negosiasi ruang selayaknya dilakukan di dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Yang pertama sekali, untuk

mewujudkan keadilan sosial itu perlu adanya negosiasi ruang di bidang pendidikan.

Al-Qur'an lewat ayat pertamanya menyebutkan *Iqra'* sebagai perintah membaca bagi semua umat Islam, laki-laki, dan perempuan. Lalu pada ayat keempat, Allah menegaskan bahwa Tuhan mengajarkan manusia dengan tulisan. Lima ayat pertama yang turun sangat syarat dengan aspek literasi, baca-tulis, pendidikan yang merupakan hak semua orang.

Tidak ada lagi sistem atau perlakuan individu yang memperbolehkan terjadinya peminggiran dan diskriminasi bagi manusia untuk memperoleh hak dasarnya, yaitu pendidikan. Tidak terhadap perempuan, tidak terhadap difabel, karena sejatinya pendidikan juga adalah proses berkepanjangan yang hanya terhenti ketika manusia menghadap Allah kembali.

Negosiasi ruang tidak berhenti pada kesamaan akses atau kebijakan khusus pada pihak tertentu. Perlu menjadi catatan juga bahwa walaupun setiap orang sudah diberikan kesempatan dan akses yang sama, karena keunikan masing-masing manusia yang memang memiliki kemampuan, pengalaman, dan *setting* sosial yang berbeda, bisa jadi tidak mendapatkan hasil yang sama. Oleh karena itu, dalam konteks keadilan ekonomi, Islam memperkenalkan institusi zakat, yaitu wahana bagi mereka yang cukup dan memiliki kelebihan sumber daya finansial untuk mendukung mereka yang lebih tidak beruntung. Secara khusus Nurcholish Madjid (2019:167) menyebutkan bahwa zakat dan derma adalah upaya pemerataan kekayaan. Islam melarang

berbagai bentuk kezaliman sehingga di dalam pemerolehan ekonomi dalam konteks persamaan kesempatan juga harus memperhatikan aspek cara yang halal dan haram. Oleh karenanya Islam melarang bentuk riba dan transaksi atas dasar pemaksaan tetapi menghalalkan jual beli dan harus atas dasar *an taradhin* (kesukarelaan).

Dengan negosiasi ruang, masing -masing individu diharapkan untuk menyisakan ruang bersama (ruang publik) dalam dirinya yang bisa saling dimasuki. Tidak bersifat eksklusif dan tertutup, yang memungkinkan merasa menang dan benar sendiri. Nilai kebenaran yang ada dalam tahapan manusia lalu menjadi relatif dan terbuka kesempatan saling nasihat-menasihati, memberi dan menerima, bertolong-tolongan di dalam kebaikan.

Negosiasi ruang ini menjadi dasar bagi terbentuknya ide-ide kesetaraan yang telah lebih dahulu digaungkan oleh para ulama perempuan di Indonesia misalnya *Mubadalah* (kesalingan) ala KH. Faqihuddin Abdul Qadir, Keadilan Haqiqi ala Dr. Nur Rofiah, Muslimah Reformis ala Prof. Musdah Mulia, dan Merebut Tafsir ala Dr. Lies Marcoes.

Konsep negosiasi ruang sebagai perintah agama dan panggilan relasi sosial adalah tawaran solusi untuk mewujudkan keadilan yang ke depan perlu dipertajam terus dan dielaborasi menjadi sebuah pemikiran dan landasan aksi yang berkesinambungan.

Pendidikan, Kesetaraan Gender, dan Pengentasan Kemiskinan

BAGAIMANA pendidikan, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan berhubungan timbal balik? Apakah memang ada hubungan ketiganya?

Tulisan ini akan menguraikan bagaimana ketiganya berhubungan dan bagaimana pembangunan di NTB perlu mengikutkan analisis gender sebagai faktor penentu keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Pendidikan secara filosofis adalah upaya memanusiakan manusia. Dengan pendidikan manusia mengenali dirinya dan apa yang harus ia lakukan untuk manusia lainnya, lingkungannya, dan tuhannya. Secara praktis pendidikan adalah bekal untuk beraktivitas, menemukan pekerjaan, dan membiayai hidup dengan layak. Pengertian yang pertama lebih menekankan aspek ontologis dan epistemologis, sedangkan yang kedua adalah pada aspek aksiologis. Pada akhirnya pendidikan memang diarahkan agar manusia bisa *survive* menghadapi berbagai tantangan kehidupannya.

Manusia, secara umum, terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sikap memanusiakan manusia yang dimaksud adalah termasuk meletakkan kedua jenis kelamin ini dalam posisi yang setara secara adil. Yang membedakan mereka adalah kualitas ketakwaan dan fungsionalisasi posisi mereka. Kedua jenis kelamin ini tidak berada pada relasi hierarkis yang diskriminatif.

Kemampuan manusia memiliki sikap yang setara dan adil ini adalah hasil ideal dari proses pendidikan. Dalam implementasi sosialnya sikap setara ini juga berbentuk pada tidak adanya pembedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan bagi mereka. Tentu saja juga pada bidang-bidang yang lain.

Kemiskinan adalah situasi ketidakmampuan manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini ada yang bersifat pemenuhan individual seperti makanan, pakaian, dan rumah. Ada pula yang berbentuk pelayanan sosial yang memang harus dipersiapkan oleh institusi pelayanan publik misalnya listrik, transportasi, kesehatan, dan pendidikan formal.

Penjelasan di atas cukup menunjukkan keterkaitan antara tiga entitas tersebut. Bahwa pendidikan menentukan sikap manusia yang menjunjung tinggi kesetaraan. Salah satunya berimplikasi pada partisipasi yang sama antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan kontribusi yang imbang terhadap pembangunan. Partisipasi dan kontribusi ini juga berimplikasi pada kualitas ekonomi laki-laki dan perempuan sehingga mereka mandiri di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk memastikan pendidikan itu dapat menciptakan kesetaraan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu *rights **to** education*, *rights **within** education*, and *rights **through** education*. Ketiga hal ini merujuk pada kesamaan hak bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan, kesamaan perlakuan ketika menempuh pendidikan, dan kesamaan partisipasi mereka berdasarkan pendidikan yang mereka peroleh. Jika ini dijadikan

dasar maka pendidikan itu tidak hanya menciptakan individu yang cerdas dan kreatif dan berpikir kritis tetapi juga menciptakan keluarga yang berakhlak dan memiliki empati sosial. Pada gilirannya akan tercipta masyarakat yang beradab dan sejahtera.

Masyarakat yang sejahtera memiliki kesempatan dan pilihan lebih banyak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Semakin tinggi pendidikan semakin besar juga kesempatan dan pilihan bagi manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Semakin banyak warga negara yang mendapatkan pendidikan yang layak semakin baik kontribusinya dalam pembangunan. Lalu semakin banyak pelaku pembangunan di segala bidang semakin baik dan merata sirkulasi ekonomi. Demikian pula, semakin merata sirkulasi ekonomi maka semakin sejahtera anggota masyarakat. Demikianlah gambaran keterhubungan antara pendidikan, kesetaraan dan kesejahteraan.

Hanya saja gambaran tersebut tidak selalu mudah dalam tahap implementasinya. Ada banyak faktor yang memengaruhi. Misalnya pemahaman budaya dan agama yang mengintervensi meningkatnya kualitas pendidikan. Pemahaman budaya ini, misalnya berwujud pada tradisi pernikahan usia anak yang masih tinggi di NTB.

Pernikahan anak ini menjadi sebab sekaligus akibat rendahnya kualitas pendidikan terutama bagi perempuan di daerah pedesaan. Masyarakat NTB mengidap apa yang dinamakan *Cinderella Complex* yang mengimajinasikan perkawinan sebagai

bentuk penyelamatan hidup anak perempuan mereka oleh pangeran yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan. Faktanya, tidak demikian. Cerita indah Cinderella hanyalah dongeng karena fakta dan data menunjukkan pernikahan anak justru memperburuk keadaan. Dari pernikahan ini lalu lahir generasi juga yang lemah di segala bidang dan sering kali sulit terselamatkan.

Tradisi yang masih terus dipertahankan karena masih diragukan bahayanya ini selain berimbas pada rendahnya pendidikan, juga membawa akibat yang lebih buruk pada perempuan daripada laki-laki. Berdasarkan data Susenas, Maret 2023. Pernikahan di bawah umur lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Pada tahun 2022 tercatat 1 dari 6 perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Sementara, 1 dari 50 laki-laki pada usia yang sama menikah sebelum umur 18 tahun. Keluarga seperti ini rentan dan sering kali berujung pada perceraian.

Ketika perceraian terjadi, laki-laki atau suami masih dibenarkan, paling tidak, kurang mendapatkan stigma buruk oleh tradisi untuk meninggalkan begitu saja anak dan istri. Sementara perempuan atau ibu menanggung beban yang *multiple* untuk meneruskan hidupnya termasuk melindungi dan merawat anak-anaknya. Padahal untuk bangkit dan kembali mengenyam pendidikan sungguh tidak mudah. Dengan kualitas pendidikan yang rendah yang miliki, maka lagi-lagi tidak banyak pilihan bagi dia untuk berdaya secara ekonomi. Lalu yang tejadi adalah

kemiskinan yang lebih extreme dialami oleh perempuan (*feminization of poverty*) dibandingkan oleh laki-laki

UN women menyampaikan data bahwa dari 1,5 milyar penduduk yang miskin di dunia yaitu yang berpenghasilan 1 dollar (Rp 14.000) sehari sebagian besarnya adalah perempuan. Gambaran global ini nampaknya juga menjadi fakta sosial di Indonesia dan khususnya di NTB. Oleh karena itu, program pembangunan apa pun yang ada di NTB baik itu menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya perlu mengikutkan analisis gender secara seksama dan memadai. Sehingga benar-benar pembangunan merata dan target SDGs 2030 dapat segera tercapai. Tentu saja ini memerlukan *political will* dan *social empathy* yang betul-betul serius dari pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah NTB pada setiap lini. Jika hal ini ditinggalkan, maka peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan hanya menjadi sekedar utopia tanpa ujung!

Haji

Penguatan Jati Diri Perempuan Merdeka

KAMIS, 30 Juli 2020 lalu terselenggara International Seminar secara virtual yang menghadirkan delapan pembicara perempuan muslim dari delapan negara (Indonesia, Iran, Nigeria, India, Iraq, Turki, Greece, dan Lebanon) dengan tema besar "*Hajj and Women's Role in Promoting the Islamic Lifestyle*". Semua pembicara tersebut sepakat bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dan efektif sebagai *trendsetter* nilai-nilai keislaman. Sementara itu, perkembangan media informasi yang begitu pesat memberikan dampak yang signifikan bagi pembentukan pribadi generasi. Oleh karenanya, perempuan harus terlibat aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dalam mengarahkan perubahan ini ke arah yang positif. Perempuan adalah *agent of social change*, aktor perubahan yang sangat strategis dalam berbagai identitas yang mereka miliki.

Lalu apa kaitannya dengan perjalanan haji?

Haji adalah perjalanan personal yang sarat dengan makna spiritual, juga berfungsi sebagai pembentuk solidaritas sosial sesama muslim. Solidaritas inilah yang akan memperkuat otoritas perempuan di dalam melakukan transformasi sosial. Seminar ini juga mengusung subtema: *Spirituality, Solidarity, and Islamic Authority*. Saya sendiri, mewakili perempuan muslim Indonesia,

menyampaikan pokok-pokok pikiran dan refleksi personal tentang pembentukan spiritualitas perempuan dan gaya hidup Islami melalui haji.

Saya merasa bahwa perjalanan haji mengkonfirmasi kembali kekuatan, nilai, dan derajat keperempuanan saya. Allah telah memberikan ketiga hal tersebut sejak penciptaan perempuan. Sayangnya, ke semua hal yang sejatinya fitrah tersebut mengalami reduksi sedemikian rupa di sepanjang sejarah kehidupan perempuan. Dan haji, menurut pengalaman saya, mengembalikan aspek-aspek fundamental tersebut.

Bagaimana bisa?

Dalam perjalanan haji yang saya tempuh selama lebih kurang 45 hari dari keberangkatan sampai kembali ke tanah air, saya mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa. Haji adalah penemuan kembali jati diri sekaligus menginternalisasi lebih dalam akan eksistensi manusia sebagai hamba Allah. Manusia haji diyakini dan diharapkan sebagai manusia yang terlahir kembali setelah menempuh rukun Islam kelima sebagai penyempurna menjadi muslim ini.

Setiap momen dan tempat serta segala doa yang dipanjatkan selama itu menginspirasi, yang secara sadar atau tidak, memberikan penguatan atau memulihkan ketiga hal di atas dalam diri saya. Menginjakkan kaki di Madinah, tergambar bagaimana dalam sejarahnya, Nabi telah meletakkan peradaban yang

egalitarian terhadap umatnya tanpa sekat-sekat identitas dan status keduniawian.

Kunjungan ke Raudhah yang juga berdampingan dengan *maqbarah* Rasulullah saw menjadi peristiwa yang sangat menyentuh. Setiap pagi, saya menyaksikan bagaimana jemaah perempuan berlomba mendapatkan tempat di depan pintu Raudhah menunggu jam buka karena harus bergiliran dengan jemaah laki-laki. Dalam penantian itu, hati berdebar dan penuh munajat. Ketika pintu dibuka, mereka berhamburan berlomba mencapai tempat tersebut sambil menangis mengharapkan "pertemuan" dengan manusia termulia yang sepanjang hidupnya menjadi contoh ahlak terbaik bagi perempuan dan sesama.

Momen tersebut selalu memberikan suntikan semangat bagi saya bahwa tangisan yang tersampaikan tersebut adalah luapan perasaan yang mengakui kelemahan sekaligus pengharapan agar bisa meneladani sifat Rasulullah. Hal yang saya yakini juga menghinggapi benak semua jemaah yang kurang lebih juga mengalami ekspresi emosional yang sama.

Memperlakukan perempuan dengan sebaik-baiknya menjadi penekanan pesan dalam pidato terakhir Rasulullah ketika haji wada' bahwa "sebaik-baik kalian adalah yang memiliki akhlak yang baik kepada perempuan".

Menelusuri jalan dari Madinah menuju Mekkah, memberikan gambaran betapa heroiknya Rasulullah dengan

umatnya saat itu dalam keadaan khawatir dikejar kaum kafir Quraisy, menempuh perjalanan jauh dengan fasilitas yang terbatas dan medan yang tidak bersahabat. Sebagian dari mereka adalah para perempuan, Ummul Mukminin, perempuan-perempuan mulia yang dengan kekuatan fisik maupun spiritual meninggalkan segala yang dimiliki menuju tempat baru dalam rangka berhijrah. Menemukan kota (Madinah) yang kelak menjadi pusat bagi tersebarnya Islam ke seantero dunia.

Kisah-kisah perempuan dalam sejarah haji juga adalah perpaduan karakter keperkasaan dan kelembutan makhluk-Nya. Siapa yang tidak mengakui kekuatan Sayyidah Hajar, yang berani ditinggal seorang diri bersama bayinya yang masih merah di padang luas nan tandus. Dengan menangis beliau melambaikan tangan merelakan kepergian sang suami, kekasih Allah Nabi Ibrahim, karena memahami bahwa perintah Tuhan adalah segalanya. Ketika bayinya kehausan, ia tidak menemukan air. Lalu berlarilah ia mendaki bukit Shafa dan Marwah bolak-balik sebanyak tujuh kali. Tiba-tiba Allah memancarkan sumber air yang lalu disebut air zamzam dari hentakan kaki sang putra, Ismail, yang kelak menjadi salah seorang Nabi.

Peristiwa maha dahsyat inilah yang terus menyuntikkan kepercayaan diri akan kekuatan perempuan selama melakukan sa'i sebagai perwujudan dari kisah berlarinya Sayyidah Hajar di antara dua bukit tersebut di atas. Menyadari akan nilai dan derajat perempuan yang tinggi sebagai sumber inspirasi bagi salah satu rukun haji dan umrah.

Menziarahi Gua Hira mengingatkan kita pada kekuatan Sayyidah Hadijah yang dengan kelembutan disertai keyakinan memberikan dukungan psikologis, memeluk Nabi Muhammad yang gemetar ketika pertama kali menerima wahyu. Ia adalah perempuan sekaligus manusia pertama yang menyatakan keimanan terhadap wahyu yang pertama diturunkan dan dalam riwayat disampaikan, lalu diikuti oleh 42 perempuan lainnya.

Haji adalah perjalanan kepada dua kota, Makkah al Mukaromah dan Madinah al Munawarah, yang merupakan tempat dimulainya perjuangan Rasulullah membina Islam sebagai agama yang sempurna. Yang dibangun atas keimanan, keislaman dan keihsanan. Tidak cukup dengan percaya, tetapi perlu perwujudan dalam amaliah atau tindakan. Amaliah itu sendiri tidak hanya terhadap Sang Pencipta tetapi juga ditandai dengan akhlak mulia terhadap sesama.

Menghayati sejarah di balik perjalanan haji semakin memberikan keyakinan kepada saya sebagai perempuan, bahwa sejatinya Islam telah memberikan titik pijak dan topangan yang luar biasa akan nilai-nilai ketauhidan dan kemanusiaan. Nilai-nilai yang tidak menyisakan celah sejengkal pun untuk memperlakukan siapa pun, termasuk perempuan sebagai mahluk kelas dua dalam konsep keadilan (*al ‘adalah*). Ajaran yang telah memberikan kemandirian dan kemerdekaan bagi perempuan untuk memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki karena nilai dan derajat mereka sama sekali tidak ada beda di hadapan Allah Sang Pencipta dalam konsep persamaan (*al musawa’*). Petunjuk hidup

yang mengedepankan cinta dan kasih sayang (*al rahmah)* sebagai tali pengikat solidaritas dan pergaulan sosial.

Nilai keadilan, persamaan, dan kasih sayang tersebut adalah jati diri yang harus terus diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup Islami yang dimaksud dalam topik tersebut di atas tidak akan menjadi Islami jika jauh dari nilai-nilai luhur tersebut. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi muslimah, sebagai *trendsetter* gaya hidup Islami, untuk tidak mempraktikkan dan memperjuangkan keluhuran tersebut dalam setiap aspek kehidupan. Dan untuk itu, perempuan muslim hanya butuh kepercayaan diri dan keyakinan bahwa mereka juga adalah manusia yang telah diciptakan dengan bentuk terbaik (Qs: al-Tin: 5) dan memiliki kekuatan, nilai, dan derajat yang sungguh mulia di hadapan Rabb-Nya. Merdeka!

Bukan Hanya Haji

Mudik Lebaran juga Perjalanan Spiritual

BAGI kami, mudik sebenarnya sesuatu yang lumrah. Lima tahun terakhir ini, hampir tiap dua bulan sekali kami mudik. Bahkan bisa lebih sering jika ada acara mendesak, acara keluarga, komunitas, maupun kampus. Tetapi tetap saja mudik lebaran menjadi lebih istimewa. Ia adalah perjalanan spiritual yang bernilai ibadah untuk memperkuat aspek muamalah. Mudik lebaran bagi saya seperti perjalanan haji. Salah satu rukun Islam yang didambakan dan di perjuangkan oleh banyak kaum muslim. Walaupun ibadah tersebut hanya diperintahkan kepada muslim yang mampu baik secara finansial, fisik, maupun psikis. Paling tidak ada lima hal yang membuat mudik lebaran (bisa jadi mudik jenis lain juga) memiliki kesamaan dengan perjalanan haji.

Pertama, mudik memerlukan ketangguhan fisik dan kesiapan emosi. Datang dari berbagai penjuru menuju kampung halaman adalah perjalanan yang melelahkan. Bagi mereka yang memilih perjalanan darat dan laut, mudik biasanya memakan waktu yang lebih panjang dari biasanya. Semua moda transportasi tumpah ruah menyebabkan kemacetan sehingga membuat pemudik lama berada dalam perjalanan. Perjalanan kami misalnya, kemarin dari Kota Mataram ke Kota Bima melalui darat yang seharusnya memakan waktu 10-12 jam menjadi dua kali lipat.

Permasalahan utamanya adalah antrian penyeberangan kapal feri yang panjang. Bukan karena petugas tidak sigap, bukan pula karena feri tidak tersedia. Lebih karena meningkatnya jumlah kendaraan pribadi maupun umum yang harus dilayani.

Belum lagi, karena kondisi cuaca dan hiruk pikuk keramaian di jalan yang sering kali tidak nyaman sangat berpengaruh pada situasi emosi para pemudik yang telah lelah secara fisik. Sesampai di kampung halaman pun, para pemudik memerlukan stamina yang bagus untuk bisa bersilaturahmi dengan sanak famili, baik dengan saling mengunjungi, maupun untuk menghadiri undangan-undangan kerabat yang biasanya selama waktu itu dianggap hari baik untuk melakukan pernikahan, selamatan, dan sebagainya. Perjalanan haji juga memerlukan dua hal tersebut. Berangkat menuju negara yang berbeda dan selama lebih kurang empat puluh lima hari di tanah suci. Menjalankan rukun haji dan memenuhi berbagai syarat sahnya, sangat menyita energi. Walaupun demikian, semua dilakukan dengan gembira karena kedua perjalanan ini dirasakan memberikan "keuntungan" yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan.

Kedua, mudik mengharuskan memiliki kemampuan biaya, sebagaimana perjalanan haji. Hal ini terutama bagi mereka yang memilih mudik melalui jalur penerbangan. Biasanya harga pesawat melambung tinggi. Mudik kemarin misalnya, harga pesawat dari Mataram ke Bima yang biasanya hanya Rp. 600. 000 melonjak menjadi Rp 3.000.000- 4.000. 000. Tidak patut rasanya

mudik ke kampung halaman tanpa membawa buah tangan baik berupa barang untuk hadiah bagi keluarga dan kerabat maupun berupa uang kertas untuk dibagi sebagai *hagla*[4] bagi sanak saudara. Tanpa terasa, tabungan kosong melompong karena mudik yang sebenarnya sangat singkat. Ini semua dilakukan dengan riang gembira, tidak terlalu menjadi beban karena momen lebaran menghadirkan *vibes* yang berbeda bagi semua perantau yang merindukan kampung halaman.

Ketiga, sebagaimana ketika haji, kita juga menziarahi tempat-tempat bersejarah (termasuk *maqbarah*/kuburan), demikian pula mudik. Kalau pada haji, umat Islam menziarahi tempat bersejarah itu untuk menelusuri kembali asal muasal dan sejarah agama mereka juga para Nabi (keluarga dan para sahabatnya). Pada saat mudik, mereka menelusuri kembali sejarah kekerabatan dan nenek moyang mereka. Praktik ziarah ini berfungsi untuk menemukan dan terus memperkuat identitas umat Islam, baik identitas agama pada haji maupun identitas diri dan etnisitas pada saat mudik. Penguatan identitas ini adalah hal yang sangat diperlukan dewasa ini. Tentu saja bukan untuk mempertajam politik identitas, tetapi untuk mengenali jati diri sebagai modal untuk menjalani kehidupan sosial yang lebih terhubung erat.

Empat, mudik dihajatkan untuk berkumpul dan bertemu dengan kerabat, saudara, dan keluarga terdekat. Tidak hanya untuk *reunion* atau mempersatukan kembali, tetapi terutama untuk saling

[4] Bahasa Bima: uang tempel atau THR.

memaafkan. Di dalamnya, ada praktik silaturahmi yang bermakna menyambung kasih sayang antara mereka yang saling bertemu. Dalam proses ini, baik para pemudik maupun keluarga yang menyambut merasa memiliki tali darah yang sama dan duduk sama rendah berdiri sama tinggi dalam suasana yang kekeluargaan.

Tidak masalah betapapun perbedaan status sosial ekonomi mereka. Ini adalah salah satu alasan mengapa para pejuang mudik bersedia mengorbankan materi maupun waktu untuk kembali ke kampung halaman. Demikian pula haji, di sana berkumpul umat muslim dari berbagai belahan dunia dengan latar belakang yang berbeda. Perbedaan mereka disatukan karena kesamaan keyakinan, dan mereka meleburkan diri larut dalam kesatuan itu. Walaupun tentu saja pengalaman spiritual mereka bisa saja berbeda. Kesatuan yang membuat kita merasa bahwa sungguh agama ini memiliki potensi sumber daya manusia yang besar yang sangat mungkin dikelola menjadi umat yang potensial bagi perbaikan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan.

Lima, peristiwa mudik pasca menjalankan ibadah puasa selama tiga puluh hari yang bersamaan dengan merayakan idulfitri adalah momen di mana seseorang merasa – paling tidak dalam pengalaman individu – memenangkan pergulatan di dalam diri. Hawa nafsu terhadap berbagai hal yang berlebihan karena telah dilatih selama sebulan penuh. *Habluminallah* (relasi ketuhanan) yang telah diperkuat selama satu bulan penuh, lalu diikuti oleh peristiwa mudik yang bertujuan untuk memperkuat *habluminannas* (relasi kemanusiaan).

Dalam kondisi seperti ini, spiritualitas individu meningkat, oleh karenanya diharapkan setelah itu derajat ketakwaan seorang individu semakin meningkat. Peningkatan kesadaran spiritualitas ini juga diharapkan pada perjalanan haji. Sebagai rukun Islam yang kelima dan menjadi indikator kesempurnaan kepatuhan seorang hamba, perjalanan haji dihajatkan untuk menjadikan seseorang memegang Islam secara *kaffah*, mendalam, dan menjadi payung dari semua tindak-tanduk baik ibadah maupun muamalah. Kedalaman ini tentu juga menjadi kunci bagi terus meningkatnya derajat ketakwaan manusia untuk meraih tempat termulia di sisi-Nya. Nilai inilah yang menjadi titik temu juga antara perjalanan mudik dan perjalanan haji bagi umat Islam.

Jadi, mudik, sebagaimana haji, adalah pejalanan spiritual yang sarat makna. Perjalanan yang memperkuat dua dimensi kehidupan manusia, yaitu relasi vertikal kepada pencipta, juga relasi horizontal dengan sesama.

BAB II

Perempuan dan Literasi

"Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan,
pandangannya sudah diperluas,
tidak akan sanggup lagi
hidup di dalam dunia nenek moyang"
(Raden Ajeng Kartini)

Bercadar

Agensi, Literasi, dan Narasi Kebangsaan

TIDAK mudah mendayung antara dua karang, yakni memadu-selaraskan antara kepentingan memelihara nilai-nilai agama (Islam) yang dianut dan diwariskan dengan kepentingan merawat kebersamaan sebagai warga negara dari bangsa pluralistik. Tapi identitas dan gaya beragama harus ditentukan dari berbagai pilihan yang ada dan mungkin, sebagai ekspresi dari egalitarianisme budaya yang dianut oleh manusia Indonesia. Dilema atau ambigu pasti muncul, tetapi itu justru memberi tantangan bagi lahirnya individu otonom yang memiliki kapasitas bertindak.

Itulah pergulatan yang dialami sejumlah mahasiswi pengguna cadar di tanah air. Pergulatan itu menjadi lebih intens berlangsung di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), karena di situ bertautan pengetahuan keagamaan dengan kehidupan sosial diperdebatkan, dan para mahasiswa bercadar masuk dalam arena kontes.

Bercadar tidak bisa dipandang secara hitam putih. Praktik itu memiliki lapisan dimensional yang perlu diurai secara jernih. Bagi mahasiswi PTKI bercadar adalah pilihan sadar dari pencerapan pengetahuan tertentu atas budaya dan agama. Pengetahuan dan kesadaran itu tumbuh baik dalam pengasuhan keluarga, proses pendidikan, dan interaksi sosial. Pada gilirannya,

struktur kognitif itu melahirkan kesadaran dan sikap keagamaan tertentu yang diekspresikan melalui gaya beragama, salah satunya lewat *fashion*, berjilbab dengan gaya *niqab* (cadar).

Para pengguna cadar menyadari bahwa pilihan gaya beragama mereka mengandung risiko diperbincangkan, diperdebatkan, dan disalahpahami. Mereka pun merespons dengan cara mereka sendiri, yaitu penguatan intrinsik dan "*speak out*" – mengikuti strategi bicara kaum subaltern ala Gayatri Spivak.

Penguatan internal adalah pemantapan pilihan gaya beragama pada tataran artifisial dengan basis literasi, paling tidak literasi akan budaya berpakaian dalam agama Islam. Menurut mereka, bercadar bukanlah tuntutan agama yang wajib, melainkan sunnah, boleh dilakukan tetapi tidak mutlak harus. Yang wajib dalam agama itu adalah menutup aurat, sedangkan pilihan-pilihan gaya menutup aurat diserahkan kepada perkembangan budaya yang melingkupi kehidupan wanita muslimah kini.

Tidak ditampik bahwa bercadar adalah gaya busana dari kebudayaan tertentu yang merasuk ke dalam moda berpakaian masyarakat Indonesia. Bagi para pengguna cadar di kalangan mahasiswi PTKI (kasus NTB), tiada salah mengambil yang baik dari kebudayaan lain, karena kebudayaan adalah memang pengaruh-mempengaruhi. Atas dasar ini, mereka menganggap cara menutup aurat berbentuk cadar bukanlah final, melainkan masih terbuka transformasi demi transformasi.

Cibiran orang bahwa pilihan bercadar mengindikasikan pengguna cadar sedang menerapkan fanatisme agama, Arabisasi

Islam, dan menjadi simbol penindasan perempuan, semata-mata kesalahpahaman. Mereka sebenarnya sedang mempraktikkan suatu modus menjadi muslimah yang baik. Apa yang mereka sebut sebagai muslimah yang baik adalah mereka yang bisa menangkis fitnah atau pandangan buruk dengan cara halus. Perempuan adalah sumber fitnah, terutama berhubungan dengan tubuh, dan tugas seorang muslimah adalah menjaga dirinya, juga memelihara lingkungan pergaulan dari berkembangnya efek buruk fitnah itu. Mereka menemukan cara itu dalam bercadar.

Bukannya praktik bercadar tanpa kritik. Kritik mengarah kepada basis literasi yang menjadi landasan praktik, berupa sumber pemahaman agama pengguna cadar yang *instant*. Pemahaman agama cepat saji itu kebanyakan diakses melalui sumber anonim dari media sosial dan perangkat modernitas lainnya seperti iklan dan serbuan "pasar" gaya hidup. Pada titik ini terlihat praktik bercadar itu rapuh, tidak memenuhi syarat sebagai perangkat ideologi keagamaan yang mapan. Selain itu, hal ini mencerminkan ambiguitas di kalangan pengguna cadar antara mencerap modernisasi untuk sisi tertentu dan menolak sisi lainnya.

Moda komunikasi cepat saji memungkinkan mereka menyerap ajaran agama – betapapun *instant* dan populisnya di satu sisi, dan mereka memusuhi produk modernitas yang lain seperti kebebasan seks dan degradasi moral di sisi lain. Untuk yang terakhir inilah mereka berdiri dan mengenakan cadar sebagai simbol penolakan atau perlawanan terhadap modernitas. Meskipun tidak secara terbuka dideklarasikan, tetapi begitulah siratan dari tafsir simbolik

praksis sosial mereka, sehingga mereka terkategorikan kaum konservatif.

Di balik cadar memang ada citra konservatisme atau Islamisme, misalnya dengan pandangan sebagian kecil mereka bahwa Indonesia akan lebih baik jika didasarkan pada hukum Islam. Tetapi Pancasila dan toleransi masih menjadi narasi utama di kalangan mereka. Ada visi kebangsaan inklusif dan toleran dalam cara mereka melihat Indonesia.

Pengguna cadar menyadari bangsa Indonesia multikultural adanya, dan mereka bagian dari kewargaan yang *bhinneka* itu. Ada sebagian kecil di antara mereka yang melihat Indonesia bukan negara religius karena tidak menerapkan hukum agama (Islam), atau pemerintah tidak serius menegakkan Islam dalam kehidupan yang *kaffah*.

Di mata sebagian kecil lain lagi Indonesia tidak ideal karena keadilan belum ditegakkan. Tetapi sebagian besar mereka memersepsi Indonesia sebagai negara yang cukup ideal, dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, beragama dan menjalankan agama tidak dibatasi. Dalam pandangan kelompok terakhir ini, multikulturalisme adalah keniscayaan Indonesia. Bergaul dengan orang yang berbeda itu solidaritas kebangsaan yang saling mendewasakan, saling menghormati dan memperkuat identitas tanpa saling mengganggu. Mayoritas perlu mencontohkan praktik yang baik, tetapi minoritas tidak boleh menjadi tiranik.

Perempuan: Kemampuan atau Keturunan?

Refleksi Pemilukada di Nusa Tenggara Barat 2020 (I)

PESTA pemilihan pemimpin daerah sudah berakhir seiring dengan berlalunya tanggal 9 Desember 2020, tetapi nilai demokrasi harus terus menggema. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, kedaulatan rakyat yang mendominasi penyelenggaraan pemerintah adalah yang utama. Demokrasi juga menjamin kesetaraan rakyat tanpa perbedaan apa pun untuk berpartisipasi penuh di dalam pemerintahan baik sebagai yang dipilih maupun pemilih, tentu sesuai dengan aturan main yang disepakati.

Di NTB, Pemilukada serentak dilakukan di tujuh (7) dari sepuluh (10) kabupaten/kota yaitu, berturut-turut dari timur: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar (KSB), Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Mataram. Pendewasaan demokrasi terlihat dengan munculnya lebih banyak calon perempuan, dibandingkan Pemilukada sebelumnya, yang tersebar di beberapa tempat tersebut baik sebagai calon (bupati/walikota) maupun sebagai calon wakil bupati/walikota.

Di Kabupaten Bima, petahana perempuan yang juga bupati perempuan pertama di NTB, periode 2016-2021 yaitu Indah Dhamayanti Putri (IDP) maju lagi periode ini. Di Kabupaten Dompu, untuk pertama kalinya perempuan ikut bertarung, yaitu

Eri Aryani sebagai calon bupati nomor urut 1 dan Ika Rizky Veryani sebagai calon wakil bupati nomor urut 3. Di Kabupaten Sumbawa muncul nama perempuan sebagai calon wakil bupati yaitu Dewi Noviani berpasangan dengan Mahmud Abdullah yang merupakan wakil bupati petahana, 2016-2021. Di Lombok Tengah muncul juga calon bupati perempuan yaitu Lale Prayatni, nomor urut 1 yang oleh para pendukungnya dijuluki Ratu Kosong Satu. Sedangkan di Kota Mataram muncul dua srikandi yang berlaga untuk calon wali kota, Selly Andayani, nomor urut 2 dan calon wakil wali kota nomor urut 4, Baiq Diyah Ratu Ganefi. Secara keseluruhan, perhelatan Pemilukada serentak kali ini, memunculkan empat (4) perempuan sebagai calon kepala daerah, dan tiga (3) orang sebagai calon wakilnya. Jadi ada tujuh (7) perempuan pemberani yang ikut berlaga memenangkan hati rakyat, menghadapi berbagai tantangan dalam prosesnya. Praktis hanya di KSB yang notabene paslonnya melawan kotak kosong, dan di KLU yang tidak dimasuki oleh calon perempuan.

Menurut hasil *real count*, yang diperoleh dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Sabtu, 12 Desember 2020, IDP kemungkinan besar akan melenggang ke kursi kekuasaan dengan perolehan suara, 44. 4%, lebih tinggi 7% dari perolehan terbesar kedua Syafruddin-Adi Mahyudi (Syafaad). Sedangkan pendatang baru, Dewi Noviani di Kabupaten Sumbawa, perolehan suaranya terbesar kedua (24.3%), masih bersaing ketat dengan calon nomor urut lima (5) yang

mendapatkan pemilih terbanyak (25%) dengan selisih yang sangat tipis yaitu 0.7%.

Menarik untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghalangi sampainya para perempuan pemberani ini ke kursi panas kekuasaan. Tentu siapa pun bisa mengajukan berbagai asumsi, tetapi tulisan ini ingin melihat tiga faktor yang kemungkinan besar menjadi faktor utama (*main factor*) bukan hanya sebagai faktor pendukung (*contributing factor*). Asumsi yang perlu dikembangkan adalah, apakah karena faktor jenis kelamin (keperempuanan), keturunan (dinasti), atau memang karena kemampuan. Kemampuan di sini lebih bermakna bobot visi-misi dan komunikasi politik yang dimainkan oleh perempuan itu secara pribadi di dalam memanfaatkan berbagai *resources* yang ada. Tentu ada faktor lain juga misalnya faktor petahana (langsung maju atau mendukung salah satu calon), banyak dan sedikitnya dukungan partai politik (wakil rakyat di DPRD), atau juga *money politics*. Tetapi tidak menjadi aspek yang dilihat pada tulisan singkat ini.

Kurniawati Hastuti Dewi (2015) dalam penelitiannya tentang keberhasilan para perempuan meraih kursi pemimpin daerah dalam konteks budaya Jawa melihat tiga faktor utama sebagai pendukung, yaitu Islam (merepresentasikan simbol-simbol keislaman), gender (keperempuanan dan dukungan kesadaran gender yang semakin meluas), dan jaringan sosial (termasuk organisasi sosial keagamaan yang menjadi afiliasi, NU atau Muhammadiyah). Istilah dinasti atau keturunan masuk menjadi

pendukung terbentuknya jaringan sosial tersebut, misalnya keturunan pesantren. Hasil penelitiannya tertulis dalam buku yang berjudul: *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender, and Networks in Post-Suharto Indonesia*.

Bagaimana dengan konteks NTB? Ketiga faktor yang disebut oleh Kurniawati (2015) di atas, Islam, gender, dan jaringan, menurut hemat saya hanya sebagai *contributing factor*, bukan sebagai *main determinant factor*. Tentu untuk menjawab pertanyaan itu tidaklah sederhana dan tidak bisa di generalisir. Diperlukan penelitian lanjutan untuk membuktikan. Jika IDP dapat diambil sebagai contoh kasus, maka nampaknya *determinant factor*-nya adalah tiga hal yaitu kemampuan komunikasi, keperempuanan, dan keturunan. Urutan di sini menggambarkan level pengaruh masing-masing faktor. Tidak bisa dinafikan, ketika melihat calon perempuan, publik lebih banyak menunjuk faktor-faktor di luar dirinya, terutama faktor keturunan (dinasti) yang menjadi penentu utama kemenangan. Perempuan masih dinilai lemah, kurang memiliki kapasitas bertindak, dan perlu *back up* yang lebih kuat daripada potensi dirinya sendiri. Asumsi ini tidak sama sekali keliru karena memang sebagian besar perempuan yang maju itu adalah istri, anak, atau saudara dari orang-orang yang kuat secara politis.

Calon Wali Kota Mataram misalnya, adalah istri dari ketua partai besar yang juga telah memakan asam garam serta masih aktif di dunia politik dan pemilihan. Calon Bupati Lombok Tengah juga adalah istri dari Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang sedang

berkuasa saat ini. Calon Bupati Dompu juga istri dari bupati petahana, sedangkan IDP adalah istri dari mendiang Ferry Zulkarnain, Bupati Bima dua periode yang masa jabatannya habis beliau wafat. Demikian juga calon Wakil Bupati Sumbawa, yang merupakan adik kandung Gubernur NTB saat ini. Kecuali IDP yang merupakan petahana, mereka semua kemungkinan gagal menduduki kursi yang dikejar, walaupun mereka ada pada level yang sama dalam hal memiliki *back up* dinasti. Kemampuan komunikasi dapat dilihat antara lain pada *public speech* yang mereka tampilkan di saat debat publik dan pada momen-momen lain yang sempat saya ikuti lewat media sosial.

Harus diakui, kemampuan retorika IDP jauh mengungguli para kolega perempuannya tersebut. Intonasi, ekspresi, dan runtutan kalimat yang tertata merupakan kualitas yang dimiliki IDP. Selain itu, majunya IDP bersama wakil yang sama dengan periode sebelumnya yaitu Dahlan M. Noer dengan singkatan INDAH dan *tagline* RAMAH memperlihatkan efektifnya komunikasi internal yang mereka jalin, di antara kecenderungan berpisah dan saling berhadap-hadapannya petahana (kepala daerah dan wakil) di berbagai tempat. Sebut saja misalnya di Sumbawa pada periode ini di mana bupati petahana, Husni Djibril, nomor urut 1 dan wakil bupati petahana, Mahmud Abdullah, nomor urut 4 sama-sama berjuang menjadi *the next* bupati.

Apakah dinasti tidak memegang peranan? Apa hal istimewa lain yang dimiliki IDP?**.**

Perempuan: Kemampuan atau Keturunan?

Refleksi Pemilukada di Nusa Tenggara Barat 2020 (II)

DINASTI pasti berpengaruh, tetapi tidak berdiri sendiri dan bukan yang utama. Ada faktor lain yang dimiliki IDP yaitu kerja sama yang baik antara dinasti dengan melankolia politik yang dimainkan dan dirawat dengan apik oleh keluarga besar maupun pendukung dan simpatisan. Melankolia politik yang dimaksud adalah majunya IDP sejak periode pertama, sampai sekarang pun menggunakan cerita sedih meninggalnya suaminya yang saat itu sedang menjabat bupati, dan jenis dinasti yang dimaksud bukan sekedar dinasti politik tetapi juga dinasti "darah biru" (istana) yang memunculkan romantisme masa lalu. Klaim tentang melankolia politik ini tentu memerlukan analisis yang lebih seksama. Apa yang menyebabkan faktor ini terus bisa memberikan pengaruh signifikan? Tentu salah satunya dan bisa dikatakan sebagai yang utama adalah komunikasi politik yang dimainkan. Bagaimana mereka menghadirkan fakta yang sebenarnya hanya masa lalu ini menjadi kenangan yang menyentuh dan berpengaruh adalah bukti dari kemampuan komunikasi, verbal (retorika) maupun nonverbal.

Mengapa, dinasti kesultanan masih terus bisa dijadikan modal oleh IDP pada konteks masyarakat Bima yang dalam banyak hal tidak sepenuhnya *sami'na wa atha'na* terhadap kesultanan? Banyak sejarah resistensi terhadap istana dari

wilayah-wilayah tertentu di Bima. Bahkan pada saat Bupati Ferry Zulkarnain masih hidup, perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan Ferry yang bupati sekaligus sultan pada waktu itu juga cukup tajam dan memakan korban misalnya peristiwa Lambu dan Parado, dan pada dua kecamatan ini, IDP mampu meraup suara tertinggi bersama dengan 12 kecamatan lain dari 18 kecamatan yang berada di Kabupaten Bima. Sekali lagi, ini memerlukan kemampuan retorika yang memadai yang berhasil memasuki relung psikologi massa.

Selain itu posisi IDP yang senyatanya sekarang adalah *single parent*, perlu menjadi unit analisis tersendiri. Kekuatan dinasti tentu ada. Tetapi sekali lagi, ke-dinasti-an IDP tidak terlalu dekat dibandingkan dengan yang dialami oleh para perempuan yang para pendukung utamanya (suami dan saudaranya) masih hidup dan bisa langsung mendukung proses berdarah-darah mereka. Belum lagi, jika dikaitkan dengan isu yang dimainkan oleh publik bahwa IDP hanyalah seorang "permaisuri" yang tidak murni berdarah Bima. Beliau lahir dan besar di Kabupaten Dompu, kabupaten tetangga dan berbahasa yang sama dengan masyarakat Bima, sebelum menikah dengan mendiang Ferry Zulkarnain. Tapi, toh IDP lebih beruntung daripada para perempuan tersebut di atas. Hal-hal yang tersebut memerlukan kemampuan komunikasi yang baik agar memastikan modal yang memang sudah ada dapat memberikan efek yang lebih besar bagi kemenangan IDP.

Dari segi pengalaman, mereka semua hampir setara. Perempuan-perempuan tersebut di atas juga bukan hanya ibu

rumah tangga sebelumnya: Selly di Mataram pernah menjabat Pjs. Wali Kota Mataram dan mengepalai berbagai dinas sebelum maju. Demikian pula Lale di Kabupaten Lombok Tengah yang juga sudah lama mengarungi dunia birokrasi. Eri Aryani, Calon Bupati Kabupaten Dompu memang bukan perempuan karir tetapi ia telah 10 tahun mendampingi suaminya menjadi bupati dua periode sebelumnya. Posisi yang notabene sama dengan IDP saat maju periode pertama dulu, bermodal pengalaman mendampingi suami yang menjadi bupati walaupun tidak genap 10 tahun. Perbandingan ini perlu dianalisis untuk meletakkan secara jernih bagaimana kemampuan personal dan komunikasi politik bisa dilihat sebagai faktor utama kemenangan.

Bagaimana dengan calon Wakil Bupati Sumbawa yang merupakan adik kandung orang nomor satu di Provinsi NTB saat ini. Dia adalah orang baru, tidak didengar sepak terjangnya di dalam dunia politik sebelumnya. Tetapi dia juga bekerja di dunia publik, dari guru lalu alih profesi sebagai pegawai di Pemprov NTB, sekarang. Jika memang dinasti menentukan, tentu Dewi tidak perlu tegang dan khawatir menunggu hasil akhir *real count* dari KPU, karena jaminan posisi kuat kakak kandungnya yang memenangkan pemilihan Gubernur NTB 2018 lalu dengan perolehan suara 31.80%. Selain menjadi tokoh politik, Zulkieflimansyah dan keluarganya juga merupakan tokoh pendidikan yang telah berjasa bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan mendirikan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan institusi pendidikan lain dalam berbagai level. Jika

Dewi pada akhirnya menang, bisa jadi faktor dinasti memang ada, tetapi tetap bukan juga menjadi faktor utama.

Dewi dan IDP sama-sama menjadi satu-satunya perempuan, di antara lima pasangan di Kabupaten Sumbawa dan tiga pasangan di Kabupaten Bima. Keduanya berhasil meraih suara yang lumayan walaupun untuk Dewi bukanlah yang terbanyak untuk sementara ini. Jadi asumsi bahwa keperempuanan mereka juga berkontribusi sebagai faktor kemenangan menjadi faktor yang penting kedua setelah kemampuan komunikasi. Bandingkan juga dengan kemenangan AKJ-Syah di Kabupaten Dompu yang merupakan kuda hitam dan tidak pernah disangka. Faktor kemenangan mereka ditopang dengan baik juga oleh istri paslon ini yang di dalam kampanye-kampanyenya selalu tampil dengan pidato, ngaji, dan doa yang menyentuh disertai tangisan pula. Jangan anggap remeh tangisan, karena ini salah satu cara komunikasi politik yang sangat menyentuh. Foto tangisan IDP pada periode pertama dulu juga dijadikan model komunikasi yang merawat melankolia politik sebagaimana disebut di atas juga sangat berperan. Ingat, masyarakat kita masih masyarakat melankolis.

Di Kabupaten Dompu dan di Kota Mataram ada dua pilihan perempuan, walaupun satunya calon nomor satu dan yang lain calon nomor dua. Dan dua-duanya tidak berhasil. Tetapi di Lombok Tengah, Lale adalah satu-satunya calon perempuan tetapi tidak berhasil seperti Dewi dan IDP di Sumbawa dan Bima, dan hanya mendapatkan suara 13.3%, atau urutan keempat dari lima

paslon yang berlaga. Bisa jadi faktor keturunan memegang peranan untuk perempuan di Sumbawa tetapi tidak untuk pulau Lombok. Faktor dinasti ternyata tidak melintasi ruang dan waktu, di mana posisi suami Lale yang sedang aktif menjadi Sekda dan merupakan keturunan terhormat bergelar Lalu dalam strata sosial masyarakat Sasak tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Jadi secara kumulatif, aspek keturunan mendapatkan sandaran data yang paling minimal dan tidak kuat dalam perhelatan Pemilukada 2020 ini.

Berdasarkan analisis di atas, bisa dikatakan bahwa penentuan kemenangan perempuan untuk konteks Pemilukada 2020 di NTB bisa diurut dari segi kemampuan komunikasi menjadi faktor yang paling utama. Selanjutnya fakta bahwa mereka satu-satunya perempuan pada deretan paslon yang berlaga, di mana mungkin lebih *eye catching* bagi banyak pemilih milenial dan *floating mass*. Terakhir adalah faktor keturunan yang juga harus diakui memberikan kontribusi bagi strategi menggaet suara massa. Jadi, mengapa perempuan terpilih? Ya karena mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya maupun kesempatan yang ada semaksimal mungkin.

Potret Literasi Mahasiswa

KAMPUS adalah kawah candradimuka pembentukan intelektualisme. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan sebagai *civitas academica* bertanggung jawab penuh dalam perannya masing-masing bagi kualitas intelektual yang ditunjukkan oleh mahasiswa dan alumni. Salah satu indikasi kualitas tersebut dapat dilihat dari keterampilan berliterasi. Keterampilan tersebut memungkinkan seseorang untuk memahami, mengutip, mengkomunikasikan hasil bacaan dengan tepat. Ketiga hal ini lalu akan menggiring diskusi yang berkualitas dan menjadikan perkembangan pengetahuan berlangsung efektif serta memiliki daya guna bagi kehidupan sosial.

Mengukur literasi di kalangan mahasiswa dapat dilihat dari dua aspek dasar yaitu minat baca dan kemampuan membaca. Kedua aspek dasar ini berpengaruh terhadap kemampuan yang lain misalnya menulis dan berdiskusi, bersikap kritis dan menyelesaikan masalah, serta kreatif dan mengorganisasikan sumber daya. Pengalaman penulis berinteraksi dengan mahasiswa selama 23 tahun (mulai mengajar tahun 2000 di UIN Mataram), dua aspek tersebut masih terbilang rendah di kalangan mahasiswa. Potret ini mungkin bisa jadi berlaku di hampir seluruh kampus, tidak eksklusif di UIN Mataram saja.

Minat baca yang rendah ini terlihat dari sepinya pengunjung ke perpustakaan. Beberapa lapak buku yang secara

mandiri dikelola oleh organisasi-organisasi mahasiswa intra kampus seperti pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) maupun ekstra kampus, misalnya PMII dan HMI juga lengang. Hanya tampak satu atau dua mahasiswa saja yang bersedia mampir. Lama-lama lapak buku ini lalu menghilang. Rendahnya minat baca juga tampak juga pada bagaimana sikap mahasiswa menerima tugas *review* buku yang diberikan oleh dosen dengan ogah-ogahan. Sikap ini misalnya terlihat pada bagaimana proses *review* buku yang mereka lakukan yang hanya menggugurkan kewajiban. Alih-alih demi mendapatkan pengetahuan, memperluas wawasan, memperkuat argumen dan melatih bersikap kritis.

Sebagai dosen, saya selalu memberikan tugas *review* buku bagi mahasiswa pada hampir semua mata kuliah yang saya sampaikan. Saya ingin paling tidak mahasiswa merasa wajib membaca buku. Selain tentu saja karena perintah Allah melalui wahyu pertama-Nya, juga secara praktis akan memengaruhi performa dan nilai mereka dalam mata kuliah yang saya ampu. Hal ini saya maksudkan agar mereka mulai merasakan bahwa membaca buku itu kebutuhan yang asyik dan menguntungkan. Saya selalu mengatakan "buku adalah teman terbaik dan yang paling jujur". Buku memberikan Anda pengetahuan tanpa mengharapkan balasan. Buku mengatakan apa adanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Buku adalah telaga ilmu pengetahuan. Buku adalah tiket jalan-jalan yang tidak mahal untuk menjelajah dunia.

Pada Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang minggu awal selalu saya bagikan, proses dan cara me-*review* buku sudah dituliskan. Saya menyediakan juga contoh-contoh *review* buku baik secara tertulis maupun dari *link-link* di YouTube. Saya persilakan mahasiswa untuk memilih buku yang menurut mereka paling mudah dibaca. Walaupun judul dan topik buku memang harus relevan dengan mata kuliah. Misalnya jika mata kuliah yang sedang diajarkan adalah Sosiologi Hukum maka mereka mencari buku teks maupun buku referensi yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Bisa topik secara umum ataupun yang khusus yang terkait dengan sub-sub bahasan tiap pertemuan. Pada minggu pertama juga saya sediakan waktu untuk mereka bertanya secara detail apa yang kira-kira akan mereka lakukan terkait tugas tersebut, jika masih bingung. Pertanyaan ini bisa dilanjutkan di grub WhatsApp.

Dari tahun ke tahun terlihat minat baca ini tidak ada peningkatan. Usia mahasiswa S1 yang rata-rata berkisar antara 18-23 tahun tergantung semester dan tahunnya tentu telah mengalami perjalanan pendidikan keluarga, dini, dasar, dan menengah. Rendahnya minat baca di level usia ini adalah hasil dari proses pendidikan yang mereka jalani sebelumnya yang kemungkinan besar tidak menitikberatkan literasi sebagai kunci. Internalisasi akan pentingnya literasi dan habituasi budaya literasi memang idealnya dimulai sejak dini, sejak dari keluarga. Sulit rasanya memaksa mereka yang sedang dalam masa pencarian jati diri yang cenderung *rebel* (memberontak) ini untuk menyadari

ketertinggalan penanaman kesadaran pada masa-masa awal itu. Tetapi sulit bukan berarti tidak mungkin.

Kemampuan membaca juga terlihat dari hasil *review* buku yang mereka kumpulkan yang masih di bawah standar yang ditentukan di dalam aspek penilaian. Salah satu aspek yang dinilai adalah kemampuan mahasiswa mengambil intisari per-bab dari buku yang telah mereka pilih dan baca. Alih-alih menyimpulkan, mahasiswa biasanya mengambil salah satu paragraf di dalam sebuah bab lalu meng-*copy paste* ke dalam kerangka tulisannya dan diklaim sebagai kesimpulan dari bab tertentu. Ketika mereka presentasi pun hanya dibaca seperti yang tertulis tanpa memahami. Naifnya lagi ada beberapa yang membaca juga masih terbata-bata. Belum lagi jika standar penilaian berikutnya dijadikan rujukan, misalnya memberikan komentar terhadap isi buku atau membandingkan isi buku tersebut dengan literatur lain atau pengetahuan awal (*schemata*) yang mereka miliki.

Standar penilaian ini sendiri tentu saja tidak kaku. Saya sebagai dosen juga menyesuaikan dengan kemampuan baca mahasiswa. Jika aspek pertama saja sudah lumayan, atau belum lumayan namun menunjukkan *effort* dan etos, maka keduanya ini juga saya hargai. Namun, lagi-lagi dari 35 mahasiswa tiap kelas misalnya, biasanya hanya satu atau paling banyak dua mahasiswa yang mampu menghibur hati dosen dengan usaha dan atau kemampuan mereka.

Literasi adalah proses sekaligus hasil. Proses ini memang tidak gampang dan memerlukan usaha sistematis dan konsisten.

Maka diperlukan kemauan dan kerja sama yang baik dari semua *civitas academica*. Dosen harus menjadikan literasi sebagai dasar sekaligus tujuan. Diskusi dan tugas yang dilakukan di dalam kelas harus berdasarkan referensi yang memadai. Dosen mengarahkan dan membimbing mahasiswa untuk bisa membaca dan mengutip dengan baik serta mengkritisi hasil bacaan mereka. Mahasiswa tidak boleh mengikuti arus netizen yang gampang sekali menyebar informasi hoax tanpa dasar literasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tenaga kependidikan misalnya pustakawan juga memberikan pelayanan yang profesional dan kreatif untuk menumbuhkan minat dan kemampuan membaca. Mahasiswa sendiri sebagai generasi pemegang tampuk pimpinan masa depan harus mulai menyadari bahwa kualitas mereka sepenuhnya ditentukan pada bagaimana mereka berliterasi. Literasi adalah solusi!.

Muslimah Reformis:

Transformatif dan Humanis

MENJADI muslimah saja tidak cukup. Muslimah sebagai sifat maupun sebagai individu memerlukan penjelasan lain untuk semakin memperkuat karakter kemuslimahan seseorang. Menjadi muslimah bukan proses yang selesai dan cukup untuk diri sendiri, tetapi dinamis dan menjadi mercusuar bagi kepentingan sosial. Sering didengar dan disitir hadis Nabi Muhammad saw yang mengatakan bahwa "perempuan adalah tiang negara, jika mereka baik, baiklah negara, demikian sebaliknya, jika buruk, maka buruk pula negara".

Hal inilah yang menjadi pesan utama buku tebal yang merupakan salah satu magnum opus, salah seorang intelektual muslim perempuan yang dimiliki Indonesia, Prof. Dr. Musdah Mulia. Buku ini sangat komprehensif mewakili judulnya *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Dari judul tersebut bisa ditebak bahwa buku ini tidak saja bersifat teoritis tetapi memuat tips dan trik bagi muslimah untuk aktif terlibat meretas problematika umat.

Apa yang membuat buku ini beda dengan buku lainnya yang mungkin membahas topik yang sama bahkan mungkin dengan judul yang sama? Paling tidak ada empat hal: *Pertama*, buku ini lahir dari konteks keindonesiaan. Indonesia sebagai

negara mayoritas muslim memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri terkait dengan peran muslimah. Oleh karenanya problem dan solusi yang didiskusi-tawarkan dalam buku ini sangat khas Nusantara.

Kedua, pengalaman penulis sebagai perempuan, membuat buku ini lebih bisa memiliki pendekatan emosional yang khas bagi para muslimah. Tak dapat ditampik, perempuan memiliki pengalaman unik yang tentu berbeda dengan laki-laki. Ketika suara dan pikiran mereka terejawantah dalam tulisan, terutama ketika berbicara tentang perempuan, ada nuansa femininitas yang kuat, lembut tetapi mendobrak kesadaran.

Ketiga, aspek intelektualisme dan aktivisme dibaur secara apik sehingga buku ini bukan aksi kosong tanpa dasar epistemologi, bukan pula wacana mengawang tanpa implementasi aksiologis. *Keempat*, nilai-nilai keislaman sangat kental mendasari tiap pilihan topik dan pembahasan di dalam buku ini. Islam yang *rahmatan lil alamin* sekaligus menjadi *faith-based personality* seorang muslim(ah). Walaupun judul buku secara khusus menggunakan kata muslimah, nilai-nilai yang disebut di dalam buku ini adalah juga universal, untuk kaum muslim keseluruhan bahkan bisa jadi dipraktikkan oleh mereka yang nonmuslim.

Pembahasan dalam buku ini bertumpu pada apa yang bisa diistilahkan dengan Tiga F yaitu *foundation* (prinsip), *field* (lapangan) dan *focus* (inti). *Foundation* yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang mendasari perlunya menjadi muslimah reformis. Ketiga hal prinsip tersebut adalah tauhid, pendidikan,

dan kekhalifahan. Tauhid adalah fondasi utama di dalam keberislaman. Dengan mengakui ke-Esa-an Tuhan, maka tidak ada satu pun makhluk yang bisa menguasai makhluk lain karena semua tunduk pada yang Satu tersebut. Tauhid juga menjadi dasar bagi pendidikan sehingga tauhid bermakna pembebasan, keadilan, dan kesetaraan. Pendidikan yang berbasis tauhid selayaknya memanusiakan manusia sehingga harus multikultural, adil gender, dan merubah ke arah yang positif. Sedangkan sebagai khalifah, manusia baik laki dan perempuan, harus menjadi aktor yang aktif melakukan amar makruf nahi mungkar dan berpihak pada yang lemah.

Field (lapangan), untuk mengejawantah prinsip perjuangan di atas berlapis-lapis dan perlu diupayakan dalam level yang berbeda dengan kesungguhan yang nyata. Dimulai dari diri sendiri. Islam dan negara telah menjamin hak asasi manusia termasuk perempuan sebagai salah satu kelompok yang rentan menjadi korban perampasan hak. Pada ruang keluarga, prinsip egaliter ketauhidan, proses pendidikan yang humanis, dan keberpihakan pada yang lemah juga harus tersemai dengan subur. Dari keluarga sebagai institusi sosial terkecil, medan perjuangan ini berlanjut pada level masyarakat, negara, maupun dunia. Masyarakat yang terbentuk oleh kumpulan pribadi reformis akan menjadi masyarakat yang toleran, penuh kedamaian dan nir kekerasan. Demikian juga politik dalam negara harus ramah terhadap seluruh warga negaranya.

Buku ini kemudian membahas tentang metodologi perubahan yang perlu diupayakan. Inilah sebenarnya yang menjadi inti dari keseluruhan pembahasan dari buku ini. Sebagai karya intelektual yang akan terus tersimpan menjadi khazanah, metodologi aksi adalah penting. Metodologi yang diusulkan adalah merujuk pada perlakuan terhadap teks maupun praksis. Tidak ada cara lain, menurut penulis, kecuali penafsiran feminis-humanis untuk membumikan dalil-dalil agama sehingga lebih fleksibel dan solutif. Demikian juga bagi para pendakwah agama, ajakan yang mereka sebarkan haruslah bersifat transformatif, tidak sekedar menyuarakan tetapi juga mampu mengubah dengan cara yang penuh dengan kebijakan. Tafsir humanis-feminis tersebut merujuk pada cara pandang dan praktik keagamaan yang memanusiakan perempuan (dan siapa pun). Perempuan dengan segala aspeknya, intrinsik maupun ekstrinsik adalah juga khalifah. Adalah aktor perubahan dan bagian integral dari peradaban kemanusiaan.

Dakwah transformatif memiliki dua aspek. Secara internal, dakwah model ini ditandai dengan upaya menghidupkan nilai-nilai moral dan peningkatan spiritual. Moralitas dan spiritualitas ini lalu menjadi modal bagi aspek eksternal dari dakwah transformatif, yaitu menjembatani keragaman dan memperjuangkan kemanusiaan dalam jalur ketuhanan. Proyeksi akhir dari jalin kelindan Tiga F tersebut di atas adalah terbentuknya muslimah reformis yang akan menjadi pemanggul peradaban.

Siapakah mereka sejatinya? Yaitu mereka yang mau berubah dan mampu merubah, terbuka pemikirannya, solutif bagi permasalahan sosial, dan pejuang untuk mewujudkan nilai luhur Islam yang penuh kedamaian.

Tentu menjadi "Muslimah Reformis" tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu konsistensi. Tetapi sangat layak dan urgen untuk menjadi sebuah cita-cita generasi.

Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner (MIT):
New Academic Mentality dan Bedah Pemikiran Prof. Amin Abdullah

Adalah sebuah kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan membedah karya Prof. Amin Abdullah yang berjudul *Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner (MIT): Metode Studi Islam di Era Kontemporer* pada tanggal 25 Februari 2021. Kegiatan ini diadakan secara daring oleh PSIPP ITB Ahmad Dahlan Jakarta.[5] Kegiatan itu menghadirkan juga Dr. Zamah Sari (Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta, dan Dr. Fransiska Widyawati (Wakil Rektor Universitas Katolik Indonesia Santa Paulus, Ruteng, NTT). Prof Amin Abdullah sendiri sebagai penulis hadir dalam forum tersebut).

Saya memulai presentasi tersebut dengan menyampaikan identitas Prof. Amin Abdullah untuk memberikan konteks bagi pemikiran beliau. Juga saya menjelaskan bagaimana personal *attachment* saya pada argumen inti yang disampaikan oleh buku ini. Hal ini untuk menjelaskan bagaimana pemikiran beliau memang *relate* bagi seorang dosen seperti saya yang memang memerlukan pemahaman memadai terkait metode studi Islam dalam tugas-tugas akademik saya.

[5] https://www.youtube.com/watch?v=uY5_pIpZSEo&t=3320s.

Prof. Amin Abdullah: Sang Begawan

Tentu saja tidak sulit untuk mencari informasi tentang beliau. Di Google, bejibun informasi tentang siapa beliau beserta karyanya. Bukti ketokohannya adalah beliau juga sudah muncul di Wikipedia. Sebagai intelektual publik yang pernah menjadi rektor dua periode pada UIN Yogyakarta, salah satu kampus terkemuka di Indonesia, juga pernah menjadi direktur pascasarjana pada kampus yang sama, menjadikan beliau sebagai tokoh intelektual yang populer. Tidak hanya pada level nasional tetapi juga internasional.

Prof. Amin Abdullah memiliki otoritas keilmuan agama yang mumpuni. Pendidikan menengah di Pesantren Gontor lalu dilanjutkan ke UIN Yogyakarta sebelum menuntut ilmu nun jauh ke Turki, menjadikan beliau sebagai salah seorang akademisi, ilmuwan-sekaligus cendekiawan yang mumpuni yang dimiliki Indonesia. Beliau juga praktisi dan birokrat pendidikan yang makan asam garam. Dalam posisinya inilah, beliau melihat ada masalah di dalam metode studi Islam. Beliau tidak hanya seorang dosen yang melakukan rutinitas mengajar (akademisi) tetapi juga ilmuwan yang membenamkan dirinya pada pemikiran dan pengembangan keilmuan serta metodologi studi Islam. Lebih dari itu, beliau juga cendekiawan yang tidak puas dengan menara gading kampus. Beliau terlibat langsung ke masyarakat menerjemahkan berbagai pemikirannya untuk melakukan rekayasa sosial.

Melalui organisasi sosial-keagamaan Muhammadiyah beliau menyuarakan pemikiran-pemikiran briliannya. Pemikiran-pemikiran yang banyak memengaruhi arah gerakan organisasi dan cara pandang anggota organisasi bagi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Dalam bukunya MIT ini, Prof. Amin Abdullah menunjukkan kayanya perspektif yang dipakai. Beliau meletakkan pemikirannya tersebut pada kerangka kegelisahan bersama para pemikir dan sarjana muslim di belahan dunia lain. Beliau misalnya menelusuri pemikiran Abdullah Saeed, Abdul karim Soroush, Jasser Audah.

Para pemikir ini sepakat bahwa Islam dan pendidikan Islam harus didekatkan dengan realitas kehidupan untuk memastikan fungsinya sebagai solusi zaman. Prof. Amin Abdullah, meletakkan kegelisahan ini dalam konteks ke-Indonesia-an sekaligus keislaman. Sungguh tepat rasanya jika beliau disematkan karakter sebagai "begawan studi Islam".

Argumen Utama dan Pendukung Buku MIT

Argumen utama yang disampaikan oleh beliau dalam bukunya adalah bahwa "*Studi Islam IS NOT Self-Sufficient*" Bahwa studi agama tidak bisa berdiri sendiri karena ia tidak mampu mencukupi dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan mental akademik yang baru (*new academic mentality*) yaitu rezim monodisiplin perlu diakhiri dan beralih kepada MIT tersebut. Hal ini karena integrasi dan interkoneksi antara pengetahuan mutlak diperlukan. Sepanjang buku ini, argumen di atas dielaborasi

dengan detail sekaligus operasional. Buku ini menunjukkan bagaimana hubungan antara integrasi dan interkoneksi (I-Kon) dengan MIT itu sendiri. Secara khusus Prof. Amin Abdullah menyimpulkan *supporting* argumen bagi argumen utamanya tersebut di atas. Sebagaimana dapat dikutip di bawah ini:

"Linearitas ilmu dan pendekatan monodisiplin dalam rumpun ilmu agama akan mengakibatkan pemahaman dan penafsiran agama kehilangan kontak dengan realitas dan relevansi dengan kehidupan sekitar. Budaya berpikir baru yang secara mandiri mampu mendialogkan sisi subjektif (agama), objektif (sains) dan intersubjektif (filsafat) dari keilmuan dan keberagamaan menjadi niscaya…." (hal: 97-98)

MIT dapat terwujud jika I-Kon terlebih dahulu dilakukan. I-Kon yang dimaksud adalah terjadinya *semi-permeability* (saling menembus) dan terintegrasinya antara tiga entitas utama di dalam studi Islam yaitu sisi subjektivitas agama, objektivitas sains, dan intersubjektivitas filsafat. Ketiga hal ini adalah teman seperjuangan yang harus bergandengan untuk menghasilkan studi Islam yang lebih *fresh* dan *flexible* menghadapi problem keumatan. Jika ditarik lebih belakang lagi, argumen ini juga tampak pada konsep jaring laba-laba studi Islam yang sudah lama juga beliau cetuskan sebagai gambaran keterkaitan ilmu pengetahuan di dalam studi Islam di UIN Yogyakarta. Keterkaitan antara ketiga hal tersebut yang lebih jauh dielaborasi sebagai jawaban dari dinamika dan problem sosial yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dinamika sosial yang tak terhindarkan ini

menghasilkan problem sosial yang serius karena adanya stagnasi metode keilmuan pendidikan Islam. Sebut saja misalnya problem konflik antar agama, kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran HAM yang tidak berkesudahan.

Trilogi nilai Subjektif, Objektif, dan Intersubjektif

Nilai subjektif yang dimaksud adalah agama khususnya *textual normative* (hadharah al nash). Sedangkan objektif tersebut adalah pengetahuan atau *scince* (hadharah al ilm). Intersubjektif disebut pula sebagai hadharah al falsafah atau *social humanities*. Pada level studi agama, ketiganya terwujud dalam bentuk Ulum al Din (*Religious Knowledge*) yang berkutat pada teks al-Qur'an dan hadis serta *turats*. Al Fikr al Islami (*Islamic Thought*) yang mengedepankan rasionalitas. Pada level ini teks dipahami secara dinamis sesuai dengan kemampuan akal memahami dan menerjemahkan. Tetapi penerjemahan oleh akal ini tidak bisa terlepas dari aspek humanistik (pengalaman manusia). Hal inilah yang berwujud pada Dirasat Islamiyah (*Islamic Studies*) yang kritis dan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan perubahan sosial. Ketiganya adalah entitas yang menyatu (*integrated entities*) yang tidak bisa ditinggalkan atau dilepaskan.

Pintu masuk bagi terintegrasinya pengetahuan agama, pemikiran keislaman, dan studi Islam tersebut adalah dengan mengimplementasikan tiga pra kondisi yang harus dilakukan yaitu *semipermeable* (saling memasuki), *intersubjective-testability* (mudah dikomunikasikan kepada individu yang beragam), dan

creative imagination (imajinasi yang dinamis dan terarah). Menyatukan ketiga entitas itu dalam studi metodologi studi agama menghasilkan perspektif dan praktik "keagamaan baru" yang holistik, rekonsiliatif, dan mediatif.

Lebih lanjut Prof. Amin Abdullah menjelaskan bahwa integrasi ketiga hal tersebut adalah mengimplimentasikan bangunan epistemologi studi keislaman yang sesungguhya telah ada dalam khazanah keilmuan klasik yaitu trialektika *bayani-burhani-'irfani*. Bayani merupakan *perspective fiqhiyyah-legalistic* dari pemeluk agama atau pemegang mazhab tertentu sebagai *insider*. Sedangkan dalam paham kegamaan yang mengandung objektivitas adalah *burhani* karena ia bersifat *rasionalistic-scientific* dan bersumber dari *outsider* yang memiliki jarak atau mengambil jarak dari subyektivitasnya terhadap keyakinan agama.

Sedangkan *irfani* atau epistemologi keilmuan intuitif (hati nurani) adalah menggabungkan kedua hal tersebut di atas. Ihsan sebagai basis kesalehan individu dan tasawuf sebagai basis kesalehan sosial menghasilkan pemahaman dan praktik keagamaan yang dibenarkan oleh atau mencerminkan aspek nurani (*innermost voice of heart*). Studi Islam yang mengedepankan *irfani* ini akan menghasilkan muslim yang tidak sekedar alim tetapi juga arif.

Inilah simpul-simpul saraf yang perlu dimiliki oleh konsep multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner (MIT) ala Prof. Amin Abdullah. Dalam multidisipliner, hal yang dilakukan adalah

menerima berbagai pengetahuan dan perspektif sebagai entitas yang memiliki level kebenaran yang sama. Agama dengan sains misalnya. Sedangkan pada level interdisipliner, pengetahuan dan perspektif didialogkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai transdisipliner yaitu mewujudkan jaringan ilmu pengetahuan yang berbeda itu untuk menuju *public good* atau *maslahah al 'ammah* (kebaikan umum).

Poin penting yang disampaikan oleh Prof. Amin Abdullah dalam bukunya ini, nampaknya juga memberi wacana spiritualitas yang bersifat operasional yakni tentang 10 cara menjadi arif, yaitu: Perkuat literasi multikultural, kenali *multiple identities* diri dan orang lain, *no prejudice*, HOTS (*High Order Thinking Skills*) yes, LOTS (*Low Order Thinking Skills*) no!, *scientific skills with humanistic thought*, tajamkan hati nurani, *religion with spirituality*, *Hubb allah wa al jaar*, etika *is on the top* dan perkuat silaturahmi. Silaturahmi yang dimaksud juga dan terutama perjumpaan dan bahkan perkawinan akademik antara rumpun kelimuan yang berbeda.

Implementasi MIT pada Hukum Keluarga Islam: My Personal Attachment

Buku ini tidak hanya memperkaya kognitif saya sebagai pembaca, tetapi juga menyentuh afeksi dan mendorong psikomotorik saya untuk banyak berbuat. Latar belakang keilmuan saya, Hukum Keluarga Islam sebagai salah satu disiplin keilmuan dalam rumpun ilmu studi Islam sangat relevan dengan pendekatan

yang ditawarkan oleh Prof. Amin Abdullah baik melalui I-Kon maupun MIT-nya.

Banyak isu hukum keluarga yang berlaku di masyarakat muslim yang masih menyisakan berbagai problem. Hukum keluarga adalah salah satu hukum yang detail diatur oleh teks al-Qur'an maupun praktik Nabi. Paling tidak ada 70 ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara detail terkait hukum ini. Hadis Nabi, terutama yang diriwayatkan oleh Aisyah, istrinya yang cerdas, berbicara banyak tentang praktik yang terjadi pada keluarga Nabi. Nabi telah mencontohkan bagaimana hukum keluarga sebenarnya adalah hukum yang memperlakukan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara. Hanya saja praktik hukum keluarga memang dinamis sehingga diperlukan pengaturan yang terus diperbaharui.

Pada tahun 2000, saya mulai mengajar mata kuliah Hukum Keluarga Islam (waktu itu namanya Hukum Perdata Islam Indonesia) yang sumber rujukan utamanya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1/1991. Banyak temuan baru ahli hukum Islam yang diatur oleh hukum yang secara *de facto* menjadi pedoman bagi hakim agama menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga muslim Indonesia ini. Sebut saja antara lain masalah pembatasan usia pernikahan dan pencatatan pernikahan yang memang tidak ditemukan teks normatifnya secara jelas. Aturan yang membatasi usia pernikahan dan mengharuskan mencatat pernikahan adalah ijtihad yang dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Namun pemahaman teologis tentang pernikahan anak, misalnya masih bersandar pada teks normatif misalnya hadis yang mengisahkan pernikahan Aisyah dengan Nabi saw di saat umurnya masih 9 tahun. Pemahaman normatif ini memberikan justifikasi akan sah dan tidak apa-apanya pernikahan anak yang masih berumur di bawah 19 tahun (menurut UU 16/2019 sebagai pembaharuan UU 1/1974 tentang perkawinan). Padahal secara empiris dengan di-*support* oleh objektifikasi sains, pernikahan anak menimbulkan berbagai problem turunan misalnya pada masalah ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Ini adalah bukti bahwa metodologi studi hukum keluarga belum masuk pada aspek kepada *al fikr al Islami* yang bersifat *burhani* apalagi pada Dirasat Islamiyah yang menggunakan pendekatan *intersubjectivity*. Sehingga fakta sosial dan temuan pengetahuan apalagi hati nurani terkalahkan oleh cara pandang fiqhiyyah-legalistik yang subyektif secara monodisiplin.

Tidak salah menggunakan pendekatan *fiqhiyyah*-legalistik ini, tetapi menjadi salah kalau pendekatan ini dipandang sebagai *self-sufficient*. Problem pernikahan anak lalu terus menjadi momok yang sulit dicari solusinya karena sebegitu berakarnya monodisiplin keilmuan dalam studi hukum keluarga. Perdebatan tentang poligami pun mengalami nasib yang sama. Biasanya diskusi menjadi *deadlock* karena pendekatan yang dipakai adalah pendekatan teks. Secara normatif baik pada teks al-Qur'an maupun hadis memang jelas ada *precedence* tentang poligami. Tetapi perspektif *burhani* atau *scienntific-empiris* yang membuktikan

bahwa cukup sulit prinsip sakinah-mawaddah-warahmah diwujudkan dalam pernikahan poligami. Belum lagi jika epistemologi intuitif yang mengedepankan rasa dan hati nurani (*irfani*) menjadi pertimbangan.

Metodologi MIT ini sangat menjanjikan studi Hukum Keluarga Islam menjadi lebih holistik, rekonsiliatif, dan mediatif sebagaimana yang dihajatkan oleh metodologi ini sendiri. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak meminjamnya menjadi kerangka berpikir bagi studi, kajian, dan penelitian hukum keluarga.

Terima kasih Prof. Amin Abdullah.

Humanisme dan Kesetaraan Gender ala Cak Nur

(Bedah Pemikiran Lengkap Nurcholish Madjid)

Pada tanggal 26 Agustus 2020, saya berada satu forum dengan Budhy Munawar Rachman dan Wahyuni Nafis dalam acara peluncuran dan bedah Buku "*Karya Lengkap Nurcholish Madjid*". Buku ini adalah kumpulan dari semua karya yang pernah ditulis oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) semasa hidupnya. Buku ini sangat tebal yaitu terdiri dari 5000 lebih halaman. Saya diminta untuk membedah buku ini khusus untuk menemukan isu humanisme dan kesetaraan gender di dalam karyanya tersebut. Tidak mudah bagi saya membaca buku tebal tersebut dalam waktu yang kurang dari sebulan setelah dikirimkan bukunya oleh panitia acara. Membaca bukan sekedar untuk membunuh waktu tetapi untuk menemukan mutiara pemikiran Cak Nur pada dua topik penting tersebut.

Untuk mempermudah membaca buku ini, ada dua hal yang saya lakukan. *Pertama*, membaca dengan seksama pengantar buku. Saya sangat tertolong oleh pengantar yang ditulis oleh Budhy Munawar Rachman. Pengantar tersebut berhasil memetakan periodesasi pemikiran Cak Nur yang dibagi ke dalam dua periode. Periode pertama (1965-1978) yang merupakan tahap keislaman dan keindonesiaan. Di mana, rasionalisme menjadi kata kunci dengan penegasan rasionalisme bukan westernisme. Periode kedua (1984-2005) yaitu tahap keislaman dan kemodernan.

Sedangkan 1978-1984 itu masa-masa Cak Nur menuntut ilmu di Chicago. Meminjam teori Kurzman tentang *liberal, silent,* dan *interpreted syariah,* Budhy Munawar Rachman juga dengan apik mengidentifikasi warna dan topik diskusi di dalam tulisan Cak Nur. *Kedua,* membaca dengan kata kunci. Saya terbantukan dengan buku elektronik yang dikirim oleh panitia karena bisa mencari kata kunci dengan mudah melalui aplikasi find. Saya awalnya memasukkan kata kunci "humanisme" dan "kesetaraan gender".

Jika kata yang pertama muncul pada hampir semua tulisan Cak Nur, tetapi kata "kesetaraan gender" tidak ada sama sekali. Oleh karena itu langkah selanjutnya, saya mencoba beberapa kata yang dekat atau terkait dengan humanisme, misalnya kemanusiaan, keadilan, HAM, emansipasi, dan emansipatoris. Beberapa kata kunci inilah kemudian yang menjadi *starting point* bagi saya untuk menemukan intisari pemikiran Cak Nur tentang humanisme dan kesetaraan gender.

Membaca Cak Nur dari Jauh

Berbeda dengan Budhy Munawar Rachman dan Wahyuni Nafis yang mengenal Cak Nur secara personal dan lama berinteraksi dengan beliau maupun karya-karya beliau, saya adalah pembaca baru Cak Nur dan dari jauh. Semasa kuliah S1 yaitu tahun 1993-1997, masa-masa pemikiran Cak Nur membahana di seantero negeri bahkan di level internasional, saya hanya pernah membaca dua buku Cak Nur yaitu "*Islam, Keindonesiaan, dan*

Kerakyatan” dan “*Pintu-pintu Menuju Tuhan*”. Sedangkan buku Cak Nur yang lain *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, hanya saya baca setengah-setengah dan sambil lalu saja. Padahal buku ini adalah *magnum opus* beliau. Sesuatu yang belakangan saya sesali sekaligus syukuri.

Menyesal, mengapa saya melewatkan pemikiran tokoh besar ini di saat yang tepat. Bersyukur, karena sebenarnya dua buku yang saya baca tersebut membuat saya justru meragukan isu dan rumor yang ‘menuduh’ Cak Nur adalah tokoh Islam yang sekuler yang sudah mengalami proses *brainwashing* setelah menempuh pendidikan di Barat. Bukunya, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, sama sekali tidak mengesankan Cak Nur dengan berbagai tuduhan itu. Buku itu justru mengungkap sisi sufisme dalam diri Cak Nur yang saya kesankan sebagai orang yang sangat religius.

Saat kuliah, saya menambah pengalaman organisasi di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di mana pemikiran Gus Dur lebih banyak diakses. Berbeda misalnya dengan para aktivis HMI yang jauh lebih akrab dengan pemikiran Cak Nur. Ternyata pilihan berorganisasi juga menjadikan saya berjarak dengan pemikiran Cak Nur. Pilihan yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Jadi intisari yang saya sampaikan dalam acara bedah buku tersebut harus dipahami dalam konteks dan posisi tersebut. Sehingga apa yang saya sampaikan bisa jadi naif tetapi juga bisa juga dipandang autentik karena “jarak” dalam banyak hal dapat mengeliminir subjektifitas.

Humanisme ala Cak Nur

Ada tiga pasang konsep yang perlu dipahami sebagai basis epistemologis di dalam memahami humanisme Islam yang dijelaskan oleh Cak Nur yaitu tauhid dan keimanan, teosentris dan antroposentris, serta agama dan sains. Tauhid dan keimanan harus mengandung definisi ideologis sekaligus operasional. Secara ideologis, tauhid bermakna melihat bahwa Allah itu Esa. Hanya satu. Tidak ada kekuasaan dan zat yang berkuasa terhadap hidup seseorang kecuali Allah Sang Pencipta. Secara operasional, tauhid harus terimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari yaitu menolak ketundukan kepada siapa pun di luar zat yang Esa itu.

Manusia yang satu terhadap manusia lainnya dalam posisi yang setara, sehingga berdasarkan tauhid, tidak diperbolehkan adanya penguasaan dan kepemilikan terhadap manusia lainnya. Orang yang bertauhid oleh karenanya tidak akan menguasai orang lain dan sebaliknya tidak gampang tunduk dikuasai oleh orang lain. Iman bermakna percaya. Percaya terhadap Allah, kitab, rasul, malaikat, hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Tetapi iman juga seakar kata dengan aman dan amanah. Jadi orang yang beriman harus memiliki sikap yang membuat dirinya sendiri aman dan orang lainnya merasa aman.

Salah satu sikap agar orang lain aman itu adalah amanah yaitu jujur dan dapat dipercaya. Tidak manfaat seseorang beriman kalau tidak menghadirkan sikap amanah sehingga orang lain tidak merasa aman. Jadi tauhid dan iman ini sebenarnya berfungsi untuk mengemansipasi manusia, bahwa manusia setara dan harus saling

menjaga. Teosentris dan antroposentris adalah karakter Islam yang tidak dapat dipisahkan. Teosentris adalah pandangan hidup yang menjadi episentrum dari kegiatan hidup. Kegiatan hidup ini harus menjadikan manusia sebagai pusat. Apa yang dilakukan oleh manusia harus memberikan dampak positif bagi manusia lainnya.

Agar bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat ini manusia harus memusatkan pandangannya pada aturan Tuhan (teosentris). Jadi Tuhan tetap menjadi dasar yang tidak bisa ditawar, tetapi dasar ketuhanan ini harus memastikan kebermanfaatan bagi kemanusiaan di dalam kehidupan sosialnya. Agama dan *science*. Islam dan pengetahuan saling memperkuat, tidak saling menegasi. Dalam penjelasannya tentang keterkaitan ini, Cak Nur melihat bahwa wahyu atau agama memberikan tugas kepada akal untuk mencerna makna dan kandungannya. Akal yang melahirkan pengetahuan oleh karenanya adalah upaya menjelaskan agama ke dalam kehidupan.

Oleh karena itu, Islam menurutnya, sama sekali tidak bertentangan dengan isme-isme baru yang lahir dari kemodernan misalnya demokrasi, Hak Asasi Manusia, pluralisme, inklusivisme, tetapi bisa berdialog untuk menghasilkan argumen yang religius sekaligus akademik. Islam meletakkan penggunaan akal pada posisi yang terhormat.

Kesetaraan Gender dalam Pandangan Cak Nur

Dalam karya lengkapnya ini, Cak Nur sebenarnya tidak berbicara khusus tentang kesetaraan gender dan perempuan. Tetapi pandangannya terkait humanisme Islam sebagaimana yang dijelaskan di atas telah meletakkan dasar epistemologi bagi pemikiran dan aksi kesetaraan gender. Paling tidak ada tiga tulisan Cak Nur dalam buku ini yang juga menggambarkan bagaimana pandangannya tentang kesetaraan manusia termasuk kesetaraan gender yaitu:

Pertama, Keadilan: Iman dan Emansipasi Harkat Kemanusiaan pada halaman 625. Pada tulisannya ini Cak Nur kembali menegaskan bahwa keimanan dan ketauhidan yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Esa harus membuat manusia merasa setara satu sama lain terutama pada level harkat dan derajatnya. Perbedaan yang terjadi karena struktur sosial yang mengharuskan bukan alasan untuk melihat manusia tidak sama. Pada konsep keadilan sosial yang Cak Nur pahami adalah bukan berarti manusia memiliki kekuatan dan akses yang sama karena pasti ada yang lemah ada yang lebih memiliki kesempatan, misalnya pada perkara zakat. Islam telah menugaskan manusia untuk mengisi kelemahan kelompok lain oleh kelompok yang lebih kuat dengan mendistribusikan kekayaannya atau akses ekonomi kepada mereka.

Dalam hal ini, institusi zakat memastikan bahwa yang kuat dan yang lemah pada akses akan menikmati hasil yang sama, di

mana yang kuat tidak boleh memonopoli dan menyampingkan fakta bahwa ada kelompok lain yang perlu disantuni.

Kedua, Egalitarianisme: Pidato Kemanusiaan pada halaman 4739. Cak Nur menjelaskan pidato Nabi pada haji Wada' (haji perpisahan) menjelang berpulang ke Tuhan-Nya. Pidato ini menegaskan persamaan manusia dan perintah melakukan kebaikan dan penghormatan terhadap istri dan kaum perempuan. Bahwa istri dan suami masing-masing memiliki hak dan kewajiban, hak yang satu adalah kewajiban bagi yang lainnya. Sepanjang hidupnya, Nabi telah mencontohkan lewat perbuatan maupun menjelaskan lewat perkataannya tentang akhlak kepada perempuan dan istrinya. Maka pada pidato yang disampaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H di Lembah Uranah Gunung Arafah itu memastikan bahwa hal ini sangat penting untuk diperhatikan sebagai wasiat terakhir beliau untuk umatnya.

Ketiga, Perempuan dan Perkawinan: Antara Prokreasi dan Rekreasi pada halaman 1371. Di sini Cak Nur berbicara tentang pandangannya terkait poligami. Menurutnya, poligami bisa dilakukan tergantung bagaimana seorang laki-laki memaknai perkawinannya. Jika dilihat sebagai rekreasi atau lembaga yang menghalalkan pemuasan hawa nafsu, maka ia dengan gampang menyetujui dan melakukan poligami. Tetapi kalau ia melihatnya sebagai prokreasi, maka yang menjadi fokus di dalam pernikahannya adalah bagaimana menciptakan dan membimbing generasi dan menjadikan pernikahan sebagai akad yang kuat.

Cak Nur juga mempertegas bahwa keadilan terhadap perempuan memang harus dimulai dari lembaga pernikahan dan keluarga. Ini juga ia tegaskan dalam tulisannya yang lain yang berjudul "Pernikahan dan Keluarga". Pokok pikiran yang sangat saya setujui.

Terima kasih Cak Nur!.

Islam dan Pancasila:

Perspektif Maqashid Syariah Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D

PADA tahun 2019, kami meneliti narasi nasionalisme di kalangan mahasiswi bercadar. Salah satu temuan yang menarik sekaligus mencengangkan adalah ada sebagian mereka yang tidak setuju kalau Pancasila menjadi dasar negara. Alasannya, Pancasila bertentangan dengan Islam. Walaupun jumlah mereka tidak banyak, tetapi pandangan seperti ini ada di kalangan milenial yang merupakan generasi penerus, patut menjadi pemantik kesadaran. Sebagai pengingat, bahwa bangsa Indonesia belum memiliki visi yang sama terkait Pancasila sebagai dasar negara. Kehadiran buku berjudul *"Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah Prof K.H Yudian Wahyudi"* yang ditulis oleh Syaiful Arif adalah salah satu aksi nyata untuk menjawab keraguan bahkan penolakan tersebut.

Saya berbahagia diberi kesempatan untuk menjadi pembahas buku ini pada dua forum sekaligus. Forum yang pertama berpusat di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, NTB, pada 28 Februari 2023 sedangkan yang kedua diselenggarakan atas kerja sama tiga kampus di Kota Bima yaitu Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an (STIQ) Bima, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) pada tanggal 2 Maret 2023. Kedua forum ini terutama menyasar mahasiswa, selain juga

hadir para akademisi, tokoh agama, tokoh pendidikan, serta tokoh perempuan.

Pesan inti yang disampaikan oleh Syaiful Arif melalui buku ini adalah Pancasila merupakan *kalimatun sawa*' (bahasa yang sama sekaligus pemersatu) bagi bangsa Indonesia yang diistilahkan oleh Prof. Yudian Wahyudi sebagai *Dar al Ijma* (negara persatuan). Buku ini, bahkan dengan tegas menyampaikan bahwa "berpancasila adalah bertauhid" sembari mengutip keputusan Musyawarah Nasional Ulama Nahdhatul Ulama sejak tahun 1983. Tidak tanggung-tanggung, Pancasila disetara-levelkan dengan "tauhid", yang merupakan pondasi dasar dari keislaman bahkan keberagamaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan bahwa berpancasila adalah bertauhid? Inilah poin penting pertama yang diurai oleh buku ini dengan baik sekali. Penulis berhasil menuangkan perspektif Prof. Yudian Wahyudi yang terserak dari forum dan tulisan beliau sendiri.

Menurut Prof. Yudian Wahyudi, Islam adalah proses aktif menuju keselamatan dan kedamaian. Keselamatan dan kedamaian ini bisa terwujud hanya dengan bertauhid secara baik dan benar. Tauhid murni, bukan hanya tauhid nama seperti yang pernah diistilahkan oleh mendiang Nurcholis Madjid, itu adalah tauhid integratif yaitu menyatukan tiga bentuk ayat al-Qur'an di dalam praktik berislam. Ayat *qauliyah* berupa teks al-Qur'an, ayat *kauniyah* berupa fenomena alam, dan ayat *insaniyah* berupa fenomena sosial harus disatukan sehingga menjadi Islam yang *kaffah* atau Islam dengan huruf "I" besar. Jika ketiganya tidak

disatukan, maka sesungguhnya keislaman masyarakat muslim baru menjadi islam dengan ‘i’ kecil.

Selanjutnya, Pancasila adalah wujud dari tauhid integratif tersebut di mana sila pertama adalah ejawantah dari teks agama, sila ketiga dan keempat adalah tanda dari hukum alam atau kosmos (*sunatullah*) sedangkan sila kedua dan kelima adalah operasionalisasi dari ayat kosmis atau kemanusiaan (*insaniyyah*) tadi. Bertauhid (keyakinan agama) kemudian perlu diturunkan menjadi bersyariah (ajaran dan amalan agama). Inti dari syariah adalah *maqashid al syariah*. Dalam pandangan Prof. Yudian Wahyudi, yang juga dijelaskan dengan apik oleh buku ini, *maqashid syariah* terlihat jelas dalam teks Pancasila.

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan diturunkannya ajaran Islam yang terbagi dalam tiga level yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Kebutuhan primer atau *dhariiriyyat* itu sendiri diproyeksikan untuk memelihara lima hal penting yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dan pemeliharaan kelima hal tersebut semua tersimpul dalam Pancasila. Pancasila juga mengakomodir tiga level kebutuhan tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila, karena kedua hal yang prinsip di dalam beragama (tauhid dan syariah) sudah tersimpul di dalamnya. Pancasila tiada lain adalah operasionalisasi dari keberislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Poin penting kedua dari buku ini adalah menunjukkan *change* (perubahan) sekaligus *continuity* (kesinambungan) diskursus Pancasila dari masa ke masa. Buku ini menjelaskan bagaimana dinamika pemikiran, konflik dan kontestasi, diskusi dan negosiasi sehingga menjadi Pancasila seperti sekarang. Pancasila bukanlah ide yang terpisah dari konteks kehidupan tetapi digali dari nilai-nilai kehidupan, keberagamaan, dan keragaman masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri telah melalui proses, jika dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila bersifat obyektif, maka pada Piagam Jakarta bersifat normatif, namun Pancasila yang kita kenal sekarang, menurut pemikiran Prof. Yudian Wahyudi, bersifat tauhidik-maqashidi, yaitu Pancasila yang menjadi ideologi untuk mewujudkan keimanan dan keberislaman yang *kaffah*. Evolusi sifat pancasila tersebut sama sekali tidak bertentangan, tetapi saling mengisi satu sama lain. Misalnya Pancasila obyektif yang disampaikan oleh Soekarno berisi lima hal yang ada pada Pancasila sekarang tetapi dengan urutan yang berbeda yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan terakhir Ketuhanan.

Posisi ketuhanan yang terakhir inilah yang pada saat itu kontroversial, walaupun maksud Bung Karno sebenarnya justru ketuhanan menjadi wadah bagi semua nilai di atas dan sebagai wadah pastilah letaknya lebih bawah daripada isi. Namun, kontroversi ini direspons dengan menormatifkan Pancasila. Yaitu dengan menyepakati untuk menaikkan ketuhananan pada sila

pertama. Rumusan tersebut menjadi Piagam Jakarta dengan berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya". Berkat kebesaran hati para pemuka agama demi persatuan Indonesia yang plural pada waktu itu menyimpulkan bahwa sebaiknya sila pertama dihapus tujuh kalimatnya dengan menyisakan Ketuhanan yang Maha Esa untuk menunjukkan keimanan yang inklusif bagi dasar negara. Pancasila inilah yang menurut Prof. Yudian Wahyudi bersifat *tauhidik-maqashidi* itu.

Selain kedua hal tersebut, buku ini juga meyakinkan pembaca bahwa diskusi terkait hubungan erat Islam dan Pancasila akan terus signifikan terutama dalam konteks sosial-politik Indonesia kontemporer dan masa depannya. Dalam buku ini ditunjukkan fakta bahwa sampai zaman reformasi masih ada segolongan masyarakat yang mempermasalahkan Pancasila bahkan mengkategorikannya sebagai kekafiran. Organisasi HTI (*Hizb at Tahrir* Indonesia) misalnya melihat Pancasila bermasalah karena ia masih memerlukan ideologi lain untuk pelaksanaanya. Hal ini terbukti ketika Orde Lama menggunakan ideologi sosialisme, Orde Baru meminjam ideologi kapitalisme, sedangkan era reformasi memakai ideologi neoliberalisme di dalam mewujudkan Pancasila. Dalam pandangan mereka, ketiga ideologi tersebut sesat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, HTI mengusulkan syariah sebagai ideologi yang menggantikan ketiga ideologi "sekuler" itu. Dari pendapat ini, terkesan bahwa syariah justru menjadi operasionalisasi dari Pancasila dan oleh

karenanya bersifat lebih khusus dan menempati hierarki yang lebih rendah. Padahal dalam pandangan perspektif *maqashid syariah* yang diurai buku ini justru sebaliknya, syariah menjadi sumber, Pancasila menjadi implementasi.

Selain ketiga garis besar di atas, buku ini menjawab pula beberapa kontroversi terkait dengan sosok Prof. Yudian Wahyudi dan pemikirannya sebagai Kepala BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Misalnya, terkait dengan video pendek yang banyak beredar yang memuat *statement* beliau bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama bukan etnis. Demikian juga terkait salam Pancasila yang beliau usulkan untuk menjadi salam formal bagi acara-acara resmi. Banyak orang melihat salam Pancasila ini berlebihan karena menggantikan “assalamualaikum” yang menjadi salam yang selama ini dipakai. Bagaimana sebenarnya kedua hal itu? Buku ini tuntas menjawabnya.

Secara umum, buku ini sangat runtut dan lugas menyampaikan keterkaitan Islam dan Pancasila dan bagaimana perspektif *maqashid syariah* versi Prof. Yudian Wahyudi dengan memberikan pemahaman yang baru dan berbeda mengenai keterkaitan itu. Tawaran yang paling unik yang beliau jelaskan adalah lima kepasangan di dalam hukum Islam bahwa sebuah hukum tidak hanya bersifat ketuhanan, absolut, universal, abadi, dan literal, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan, relatif, lokal, sementara dan *maknawiyah*. Dan Pancasila menggambarkan nilai-nilai hukum Islam tersebut. Sayangnya, aspek keterkaitan lima kepasangan ini belum digambarkan secara seksama dan lebih

detail di dalam buku ini. Mungkin sebaiknya dijadikan pembahasan tersendiri dengan menautkan praktik baik di tengah masyarakat maupun dalam kebijakan pemerintah terkait bagaimana lima kepasangan ini diinternalisasi oleh ideologi Pancasila dan diwujudkan dalam kehidupan yang nyata.

Narsisme

Ala Santriwati 90-an

APAKAH kehidupan santri melulu tentang ngaji; bandongan dan sorogan? Tentang keterbatasan mengakses dunia luar? Tentang waktu yang terus mengejar di antara jadwal yang super padat? Tentang ketundukan tanpa syarat pada aturan pondok? Tentang takzim kepada Ibu Nyai dan Pak Yai? Tentang kebersihan dan *ro'an* yang menghabiskan waktu libur Jum'at? Percayalah, santri juga manusia yang memerlukan hiburan dan mereka punya cara tersendiri untuk itu. Salah satunya adalah dengan narsisme unik ala santri.

Kalau gaya narsisme dalam bentuk *selfie* baru dikenal oleh dunia luar pesantren dewasa ini setelah berkembangnya media sosial, lain halnya dengan para santriwati. Mereka sudah mengenal itu dulu sejak zaman kamera kodak dengan film roll yang harus diafdruk menunggu satu minggu hasilnya. Ini yang seru. Satu roll film itu dulu bisa dipakai untuk foto 36 kali. Kalau *camera girl*-nya canggih, ya bisa mendapatkan 36 foto yang bagus-bagus, tanpa *zonk*.

Untuk membeli film roll ini biasanya para santriwati urunan. Bertiga atau berlima. Masing-masing berkelompok yang kadang tidak disengaja, terbentuk tanpa kepentingan tertentu kecuali disatukan oleh keinginan menghibur diri. Anggota kelompok ini bisa satu atau lintas kamar dan *ribath* (kompleks).

Membeli film roll ini juga perlu menempuh jarak. Santriwati Tambak Beras, misalnya, harus berangkat ke pasar Jombang, tepatnya ke toko kamera sekaligus studio foto satu-satunya di pasar itu. Kadang juga menitip sama Cak Taufiq, keamanan Pondok Putri al Lathifiyyah untuk membelikan.

Untuk *shoot*, waktunya pun harus dipilih yang representatif. Biasanya dari jam 1 sampai setengah tiga malam. Mengapa? Saat itu para santri lainnya sedang istirahat selepas kegiatan ngaji kitab *bakda* Isya' dan sebelum bangun kembali untuk *qiyam al-lail*. Mengapa perlu waktu yang sepi? Agar pengambilan foto tidak terganggu dengan lalu-lalang para santri yang berjubel sehingga tidak mengganggu stabilitas dan lalu lintas pesantren. Satu roll itu biasanya dihabiskan satu malam dengan cara bergantian menjadi foto model dan *camera girl*.

Di akhir-akhir, biasanya ada foto bersama kelompok narsis tersebut. Terkadang beberapa klik terakhir disimpan untuk foto berkelompok yang lebih besar keesokan harinya. Biasanya jika kelompok tersebut teman satu kamar. Tidak berhenti di situ perjuangannya. Memilih *wardrobe* dan properti juga penuh lika-liku. Biasanya didiskusikan dulu, foto-foto yang diambil bertema apa, bergaya apa? Sehingga kedua kelengkapan tersebut bisa disiasati dan saling tukar antar anggota kelompok atau pinjam ke teman-teman lain, misalnya topi, baju, payung, sepatu.

"Pengarah gaya" pun bergantian. Terkadang kami harus melihat gaya foto model dari majalah bekas untuk ditiru. Perkara persis atau tidak itu bukan masalah. Yang penting aktivitas narsis

sebagai katarsis, pemecah kebuntuan (kejumudan) berpikir, pelarian dari padatnya jadwal tanpa sedikit pun kesempatan mengakses televisi, terlaksanakan. Biasanya kegiatan ini dilakukan setelah selesai ujian sekolah maupun pesantren sekaligus sebagai sarana *refreshing*. Setelah roll film habis terklik, semua properti dan *wardrobe* dirapikan dan dijadwalkan untuk dicuci dan dikembalikan (jika hasil pinjaman) maka tiba saatnya memikirkan bagaimana mengafdruk dan urunan lagi untuk biaya perjalanan dan cuci foto. Kalau membeli roll film bisa diwakilkan, maka mengafdruk harus dilakukan sendiri karena tidak sabar melihat hasilnya. Berangkatlah kelompok ini pada hari Selasa pagi (hari bolehnya para santriwati keluar dari pondok) dengan meminta tolong abang becak di pangkalan depan pondok mengantarkan. Jika bertiga, maka cukup satu becak, dengan berdesak-desakan. Tukang becaknya tidak akan merasa berat karena para santriwati biasanya pada langsing abis. Jika berlima tentu saja memerlukan dua becak.

Di studio foto, hal pertama yang dilakukan adalah meminta roll film dikeluarkan dulu dan disimpan di dalam kertas plastiknya serta diurut. Mulailah anggota kelompok ini menilik-nilik, mengeker, menebak foto yang masih berbentuk klise itu tentang siapa yang ada dalam foto dan berapa banyak foto yang layak dicuci. Ini perlu dan sangat penting karena menentukan berapa uang urunan. Ketahuilah bahwa biaya ini tidak masuk dalam uang *syahriyyah* (uang bulanan) dari orang tua. Jadi harus dihitung dengan bijak dan seksama. Setelah menghitung, dan *fix* klise

diserahkan kembali ke tukang afdruk. Menunggu hasil foto ini adalah aktivitas selanjutnya yang dilakukan dengan tidak sabar serta penuh penasaran. Biasanya berlangsung dua jam-an. Anggota kelompok ini terkadang harus jalan-jalan keliling atau sekedar *nge*-bakso atau *nge*-warung untuk menunggu.

Pada saat menerima hasil foto adalah adegan paling seru. Para santriwati tertawa puas melihat hasil, terkadang merengut juga jika tidak sesuai harapan karena tidak bisa dihapus begitu saja ala foto digital kekinian. Uang sudah terkuras dari kantong dan foto tidak sesuai harapan, tentu sangat mengecewakan. Lalu foto-foto itu untuk apa? Kan belum ada media sosial sebagai sarana narsistik "haqiqi" seperti sekarang? Jangan salah. Foto-foto ini banyak sekali manfaatnya.

Pertama, untuk *feeling good about oneself* alias menghibur diri sendiri. Untuk fungsi ini, foto-foto disimpan di album sederhana atau bingkai kecil di lemari atau ditempel di lemari bagian dalam. Sesekali dilihat-lihat dan mengagumi diri sendiri karena menemukan penampilan yang berbeda dari seorang santriwati, tidak seperti kesehariannya yang selalu pakai *meksi*, rok sempit bagian bawah atau sarungan dan kerudungan. Dengan ini mereka menemukan dirinya juga bisa bergaya seperti sosok di majalah-majalah itu.

Kedua, saling tukar dengan teman-teman untuk kenangan. Biasanya ini diberikan begitu saja atau ditempel di buku *diary* teman yang berisi identitas dan pesan dan kesan. Semacam

friendster tahun 2000-an. Foto-foto tersebutlah yang sampai saat ini meramu dan menjamu kenangan di antara para santriwati.

Ketiga, *husssh* (ini rahasia) terkadang foto ini dipakai untuk tukar-tukaran juga dengan para santriwan dengan menggunakan media bangku. Untuk diketahui saja, ruang kelas sekolah biasanya dipakai pagi oleh santriwan dan siang oleh santriwati tanpa kesempatan bertemu. Biasanya untuk menjalin komunikasi, kadang-kadang buku atau kitab ketinggalan di laci bangku menjadi modus.

Mulailah ada komunikasi untuk bertanya barang-barang yang tertinggal. Komunikasi berlangsung dan puncaknya adalah menukar foto. Foto yang dipilih pun harus yang terbaik dan terindah. Agar komunikasi berjalan terus. Jika tidak, maka komunikasi akan terhenti karena ketertarikan tidak berlangsung dan foto ternyata tidak seindah imajinasi. Sialnya lagi saat itu belum ada Kamera 360 yang menjamin kecantikan dan ketampanan hanya dalam satu kali klik. Seru, bukan? Itulah narsisme ala santri yang kini disadari sebagai romantisme sejarah yang tak lekang dan penuh makna. Hidup santriwati!.

BAB III

Keluarga dan Parenting

"…bagian terpenting dari kehidupan bukanlah di universitas, tetapi periode pertama 0-6 tahun, karena selama periode ini seluruh instrumen besar manusia dibentuk, bukan kecerdasan saja tapi seluruh kecakapan psikis"

(Maria Montessori)

Kepemimpinan Kolaboratif

Rumah Tangga dan Prinsip Ketahanan Keluarga di Era Pandemi

PANDEMI covid-19 di Indonesia telah melahirkan beberapa kebijakan, mulai dari menarik diri dari keramaian (*social distancing*) sampai menjaga jarak (*physical distancing*). Di banyak daerah namanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar), di NTB disebut PSBL (pembatasan sosial berskala lingkungan). Turunan kebijakan itu adalah *stay at home* dalam bentuk *working from home* (WFH) dan *school from home* (SFH). Kebijakan terkait covid-19 tersebut memiliki dampak ekonomis maupun sosial. Termasuk sangat mempengaruhi kondisi keluarga dan secara dinamis juga memberi dampak terhadap ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah soal bagaimana rumah atau keluarga menjadi tempat ternyaman bagi semua anggota keluarga termasuk perempuan (istri maupun anak). Ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan dan kesejahteraan finansial. Tetapi juga meliputi kesehatan dan kenyamanan mental spiritual, aspek lahir maupun batin.

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 Perda No 4/2018 tentang Pelaksanaan Ketahanan Keluarga di NTB, misalnya, menjelaskan bahwa: “Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual

guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin". Lantas, bagaimana perihal ketahanan keluarga pada aspek non material terutama pada keluarga sama-sama bekerja (*dual earner family*)? Aspek tersebut misalnya bagaimana suami dan istri mengatur kegiatan sehari hari dengan nyaman, menyeimbangkan antara tugas pekerjaan dengan tugas-tugas rumah tangga, menyelesaikan *deadline* sendiri yang sudah tersusun sembari menemani putra-putri menyelesaikan tugas-tugas *online* mereka. Tidak ada pilihan bagi keluarga kecuali melakukan semua itu secara mandiri sebagai konsekuensi dari *social* dan *physical distancing* tersebut. Lantas siapakah yang paling terbebani oleh pekerjaan dan kondisi pandemi ini di dalam keluarga? Mengapa ini terjadi? Lalu apa *lesson learned* dari kasus ini dalam konteks ketahanan keluarga?

Dalam beberapa forum resmi maupun obrolan ringan dengan sesama perempuan yang bekerja terungkap bahwa *stay at home* ini menimbulkan *multi-burden* bukan lagi *double burden* bagi perempuan. Berbagai kegiatan tambahan seperti tersebut di atas, sebagaimana bisa diprediksi, sebagian besarnya dibebankan kepada perempuan. Pada masyarakat kita, kegiatan domestik lazim dipahami semata-mata keahlian bahkan takdir perempuan. Bahkan kegiatan yang sebenarnya di dunia publik bisa dan lazim dilakukan oleh laki-laki ketika dipindahkan tempatnya ke rumah, dinamakanlah itu kewajiban perempuan, contohnya memasak.

Lebih mengkhawatirkan lagi, Komnas Perempuan mengungkap data bahwa selama covid-19 yang dimulai Maret, laporan KDRT meningkat. Sisi buruk dari WFH terhadap perempuan ternyata semakin menjauhkan idealistis rumah bagi sebagian mereka sebagai rumahku surgaku. Hal ini juga menggambarkan bagaimana perempuan selalu menjadi korban dalam situasi buruk, baik karena wabah maupun bencana alam lainnya. Sesuatu yang sesungguhnya tidak diinginkan tetapi sering kali tidak terhindarkan. Konsep tentang kepemimpinan rumah tangga yang selama ini sering diperdebatkan perlu direfleksikan kembali. Sebagaimana umum diketahui bahwa secara normatif kepemimpinan keluarga selalu disematkan kepada laki-laki atau suami dengan justifikasi dan dalil. Salah satunya adalah surat an-Nisa: 34. Interpretasi terhadap ayat ini sebenarnya beragam dan telah banyak dibahas tentang kemungkinan merekonstruksi makna *qawwam* dalam berbagai artikel dan buku.

Tapi bagaimana pada tataran implementasinya? Saya berargumen bahwa kepemimpinan keluarga itu ideal dan senyatanya adalah kepemimpinan kolaboratif yang memerlukan rumusan-rumusan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana melaksanakannya (*what and how to do*) bukan semata-mata tentang siapa melakukan apa (*who does what*). Kepemimpinan kolaboratif dimaksud tidak lagi melihat istri atau suami sebagai individu yang terpisah tetapi masing-masing sebagai anggota tim yang posisinya setara serta melakukan segala kegiatan rumah tangga atas prinsip kesalingan.

Meletakkan laki-laki saja sebagai pemimpin rumah tangga telah terbukti mengakibatkan penempatan perempuan sebagai makhluk kelas dua bahkan di ruang yang sangat dekat dengan kehidupannya. Sebagai pihak yang dipimpin, ia menjadi obyek dan lemah.

Turunan dari posisinya sebagai obyek ini lalu menimbulkan berbagai konsekuensi termasuk beban berlebih dan kekerasan yang perempuan alami sebagaimana tersebut di atas. Kelemahan perempuan sayangnya sering kali bukan dijadikan alasan untuk melindungi secara substantif malah menjadi pendorong terjadinya KDRT dalam berbagai bentuknya. Ketahanan keluarga itu sendiri bertujuan membentuk keluarga sejahtera. Pada pasal 1 ayat 10 Perda di atas mendefinisikan Keluarga Sejahtera sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

"Hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang" ini perlu dioperasionalisasi sehingga tidak hanya menjadi adagium kosong. Menurut saya, serasi, selaras, dan seimbang ini diawali dengan bagaimana meletakkan suami dan istri pada posisi yang paralel. Sejatinya mereka masing-masing adalah *teamwork* yang memiliki

kapasitas menjalankan fungsi kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang disepakati bersama. Mereka sama-sama memimpin dan berkolaborasi di dalam mewujudkan visi dan misi keluarga. Jadi, mendebatkan subyek kepemimpinan (*who*) tidak lagi relevan. Karena senyatanya, baik laki-laki maupun perempuan secara normatif juga telah dimandatkan sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak (Hadis Riwayat Ibnu Umar).

Secara aplikatif, senyatanya dapat dilihat juga dalam semua kehidupan keluarga, walaupun ideologi patriarkhis sangat sulit mengakuinya. Fakta adanya PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di seantero dunia tidak terbantahkan. Kepemimpinan perempuan dalam rumah tangganya sendiri dapat terjadi ketika menjadi *single parent* maupun masih berpasangan. Menurut Jacobs dan Jacques (1990:281) kepemimpinan adalah suatu proses memberi arti terhadap usaha kolektif, sehingga ada kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai tujuan (*leadership as a process of giving purpose (meaningful direction) to collective effort, and causing willing effort to be expanded to achieve purpose')*. Definisi di atas menarik dan relevan untuk meneracai upaya merumuskan kepemimpinan rumah tangga yang kolaboratif dengan mengelaborasi beberapa kata kunci sebagai berikut:

Pertama, proses**.** Kepemimpinan dilihat sebagai sebuah proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Proses tersebut tentu bisa dilakukan bersama-sama atau

berdasarkan *job description* serta teraplikasi dalam berbagai aktivitas rumah tangga, misalnya aktivitas dapur, mengawasi anak, serta hal-hal terkait masa depan kehidupan pasca covid-19 dan pendidikan anak.

Kedua, usaha kolektif**.** Definisi ini mengandung arti bahwa kepemimpinan melibatkan *teamwork* dan bertujuan mewujudkan kepentingan bersama. Pada aspek ini tersirat keterlibatan, kesalingan, kemampuan berkomunikasi, dan menghargai suara bersama. Ada proses demokrasi yang mengiringi. Bayangkan saja dengan menumpuknya *list* yang harus dikerjakan oleh keluarga yang suami-istri bekerja, tanpa adanya kolektifitas dan kolaborasi, maka covid-19 memberikan akibat yang jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebagai proses dan usaha kolektif, maka kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat menjadi prasyarat yang utama dalam kepemimpinan kolaboratif tersebut.

Menarik dikemukakan lima sifat kepemimpinan muslim berdasarkan rukun Islam[6] yang menurut saya sangat relevan diaplikasikan di dalam kepemimpinan keluarga yaitu: *Syahadat* yang bermakna visioner atau memiliki tujuan hidup yang jelas. *Salat* yang menekankan sifat disiplin karena memilik waktu tertentu dan tata cara tertentu. *Puasa* yang menggambarkan integritas moral. *Zakat* yang merefleksikan kepedulian terhadap mereka yang tertindas. *Haji* sebagai ilustrasi dari sifat rendah hati bahwa semua manusia sama di mata Allah.

[6] (https://arryrahmawan.net/5-prinsip-kepemimpinan-dalam-islam/)

Lima sifat kepemimpinan tersebut idealnya dimiliki oleh masing-masing individu. Tetapi dalam realitasnya bisa jadi lima prinsip itu sebagiannya lebih kuat menjadi karakter suami sedangkan yang lain lebih menjadi sifat bawaan istri. Dalam konteks kepemimpinan keluarga yang kolaboratif, saling mengisi untuk mewujudkan prinsip visioner, disiplin, integritas, peduli, dan rendah hati tersebut menjadi keharusan. Bukankah suami dan istri sejatinya adalah dua individu yang memiliki kelemahan dan kelebihan tetapi bersedia untuk selalu saling mengisi demi menggapai tujuan dan kesejatian? Dan era pandemi beserta WFH ini bagi saya memberikan pelajaran bahwa kolaborasi menjadi salah satu kunci terwujudnya ketahanan keluarga.

Living in Bubles:
Privasi Individual dan Intimasi Sosial di Era Pandemi

PRIVASI merujuk pada batasan (***boundaries***) yang dimiliki oleh seseorang untuk melindungi hal-hal yang terkait dengan dirinya. Sedangkan intimasi bermakna level kedekatan seseorang dengan orang lain di luar dirinya. Menarik untuk mendiskusikan apakah privasi dan intimasi bisa bersisian di era pandemi ini. Bagaimana keduanya berkelindan? Dalam konteks ketahanan keluarga di satu sisi dan solidaritas sosial di sisi lain? Kebijakan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, dengan tagline *Living in Bubbles* (tinggal dalam gelembung balon) adalah contoh yang menarik untuk mempertemukan kedua istilah yang terkesan berlawanan tersebut (Long NJ, et.al: 2010).

Upaya menahan laju penyebaran covid-19 telah menghasilkan kebijakan menarik diri dari keramaian (*social distancing*) dan menjaga jarak (*physical distancing*). Kedua kebijakan ini meniscayakan rumah sebagai pusat dari segala aktivitas baik yang selama ini bersifat publik seperti bekerja (*work from home*) dan bersekolah (*school from home*), apalagi yang domestik misalnya memasak dan merawat anak-anak usia prasekolah. *Bubbles* berkonotasi pada benda yang tertutup (tidak bolong) tetapi transparan, rawan pecah tetapi fleksibel. Tertutup melambangkan privasi bahwa sekelompok orang yang berada di

dalam tempat itu memiliki batasan ruang tetapi transparan yang memungkinkan akses timbal balik. Individu di dalamnya bisa melihat dan dilihat dari luar.

Privasi yang dimiliki keluarga tetap memungkinkan mereka untuk saling memiliki empati dan solidaritas dengan *bubbles* yang lain. *Bubbles* sangat rawan pecah sehingga setiap anggota keluarga tidak merasa “baik-baik saja” dan setiap mereka harus siap untuk membantu dan dibantu. Fleksibilitas *bubbles* untuk ditiup membesar melambangkan bagaimana mereka terbuka untuk menerima anggota masyarakat yang lain ke dalam ruang privasi mereka.

Tagline dengan menggunakan simbolisasi benda yang akrab dengan segala umur ini telah terbukti efektif bagi Selandia Baru menghadapi pandemi covid-19 ini. Hal ini juga membuktikan betapa pentingnya komunikasi politik yang cerdas, kebijakan yang terarah, dan keterlibatan masyarakat di dalam menghadapi masa-masa tidak menentu sekarang. Tanpa mengecilkan keberhasilan program salah seorang pemimpin negara perempuan tersebut yang sudah terbukti di Selandia Baru, privasi masing-masing individu keluarga luput diperhatikan dalam kebijakan ini. Kebijakan ini lebih menekankan privasi kolektif keluarga.

Ketika 24/7/2020, semua anggota keluarga berkumpul di rumah, privasi personal menjadi barang mahal. Oleh karenanya, penting menggarisbawahi bagaimana era pandemi ini tidak mengorbankan salah satu hal mendasar dalam kehidupan ini. Privasi individu di sini perlu diterjemahkan sebagai *independency*

(kemerdekaan), *self-sufficiency* (kemandirian) dan *resiliency* (ketahanan), dan rumah menjadi tempat untuk menyemai dan menumbuhsuburkannya.

Rumah secara sosiologis memiliki tiga aspek: *house*, *household* dan *home* (Newman, DM: 1999). *House* yaitu rumah dalam arti bangunan fisik yang berupa ruang-ruang di mana anggota keluarga bertempat tinggal. *Household* yaitu merujuk pada fungsi rumah sebagai unit produksi. *Home* adalah rumah sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis berupa kenyamanan dan kedamaian masing-masing anggota keluarga.

Anak terhadap orang tua, suami dan istri perlu memiliki batasan yang jelas untuk bisa ber "*me-time*" selama WFH dan SFH ini. Masing-masing mereka memerlukan ruang fisik tersendiri, bagaimanapun keadaannya. Privasi dalam konteks ini bermakna *independency* (kemerdekaan). Kemerdekaan untuk sesekali menikmati kesendirian. Privasi ini penting untuk menjaga intimasi dalam keluarga menjadi lebih kuat. Jarak yang dekat dan tak berjeda sering kali menggerus rasa keintiman dan hal ini perlu dihindari. Dalam konteks rumah sebagai unit produksi (*house-hold*) privasi bermakna kemandirian. Mampu melakukan dan melayani diri sendiri tanpa mengganggu waktu dan kemerdekaan orang lain. Masing-masing anggota keluarga berkontribusi bagi unit produksi baik dalam arti finansial maupun non finansial.

WFH ini menghapus garis tegas antara publik yang dipandang bernilai produktif dan domestik yang dianggap tidak bernilai ekonomis. Dengan menumpuknya pekerjaan di rumah,

kemandirian masing-masing anggota keluarga adalah penting agar beban tidak bertumpuk di salah satu pihak yang sayangnya, seringkali ada di bahu perempuan. Kemandirian keluarga seharusnya bermakna kemandirian masing-masing individu dalam keluarga tersebut

Untuk mewujudkan *home sweet home* atau *baiti jannati*, tiap individu dalam keluarga juga harus memiliki *resiliency* (ketahanan diri) secara psikologis. Privasi di sini bermakna bagaimana masing-masing individu mampu menguasai dan mengatur diri sendiri. Tanggungjawab menjadikan rumah sebagai sandaran jiwa dalam masa tidak menentu ini berada pada pundak masing-masing. Keluarga yang kuat bisa terwujud jika privasi dalam arti kemerdekaan, kemandirian, dan ketahanan tersebut bisa diupayakan secara bersama. Suami dan istri yang merupakan partner sejajar dalam keluarga perlu berbagi beban agar WFH tidak memiliki dampak yang berbeda bagi keduanya.

Jelaslah bahwa privasi individu yang dihargai secara proporsional akan menghasilkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi wabah ini. Penghargaan terhadap privasi individu ini diharapkan menjadi "*new normal*" kehidupan keluarga pasca pandemi. Keluarga yang kuat akan memiliki surplus waktu dan sumber daya untuk memilki solidaritas sosial. Empati yang dibangun dalam keluarga dengan menghargai privasi masing-masing tersebut adalah modal bagi masing-masing individu untuk memiliki kontribusi sosial terhadap mereka yang membutuhkan uluran tangan.

Ketika penghargaan terhadap privasi terbangun pada masing-masing keluarga, maka kedekatan sosial (*social intimacy*) yang merupakan kearifan lokal masyarakat Indonesia tidak akan tergerus oleh wabah ini. Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa optimis menghadapi masa depan pasca covid-19 dengan "*new normal*" yang semakin memperkuat kohesi sosial.

Hand Phone

Empat Puluh Jam tanpa HP, Sungguh Menyenangkan

AKHIR Minggu, 9-11 Juli 2021 kemarin, saya tidak ber-HP. Saya ingin coba saja. Bagaimana rasanya? Ternyata menyenangkan. Awalnya saya lupa *charger* di rumah. Sedangkan baterai HP sudah menipis. Sebenarnya bisa kembali mengambil. Sebab teringat ketika baru saja keluar pintu gerbang rumah menuju kebun. Tapi saya kuatkan azam untuk tidak melakukannya. Kebetulan *charger* HP saya sedikit eksklusif. Pahamlah! Si merek itu tuh! Yang *nggak* bisa sembarang pinjam punya HP merek lain.

Jum’at sore selepas Ashar kami meluncur ke kebun. Sempat mampir di pasar membeli bekal. Kami menginap di kebun dua hari. Saat itu baterai HP tinggal 15 persen. Saya perkirakan jam 8 malam akan matot (mati total). Ternyata bertahan sampai jam 8.30. Setelah Isya’ saya sempat *ngecek* pesan Whats App, Facebook, dan Instagram. Kalau-kalau ada pesan penting. Saya juga membalas beberapa pesan dan email yang butuh disegerakan. Saya tinggalkan pesan di status Whats App jam 8.15. “HP dan media sosial off dari malam 8.30 sampai Ahad siang pukul 12.30”. Begitu bunyinya. Saya perkiraan 40 jam saya terbebas dari HP. Kenyataannya molor sampai pukul 14.00 Minggu siang.

Pengalaman jauh dari HP ini ternyata sangat menyenangkan. Walaupun ada sekilas kekhawatiran. Tetapi alasan untuk senang jauh lebih banyak dan sangat berarti. Kekhawatiran saya satu saja. Jika ada pesan penting dari keluarga di kampung. Atau anak-anak di rantauan. Tetapi untuk hal ini saya pikir ada solusi. Kalau mereka tidak bisa menghubungi saya, pasti akan menghubungi nomor suami yang HP-nya masih on. Dan tidak lupa *charger*. Serta masih bisa pinjam *charger* al-Qalam-nya Ananda Nawa (buah hati saya) jika pun lupa.

Alasan senang yang pertama dan utama adalah kebebasan. Saya tiba-tiba merasa bebas-merdeka. Bebas dari kejaran pesan mahasiswa yang sering bertubi-tubi masuk. Tanpa tahu waktu. Tanpa tahu akhir pekan. Apalagi ini musim ujian skripsi dan tesis. Biasanya dosen banyak yang diintimidasi untuk segera mengakhiri dengan segera masa bimbingan. Segera meng-oke-kan untuk layak diujikan. Kebebasan itu ya kemerdekaan. Pastinya menyenangkan, bukan? Saya merasa bebas dari godaan HP yang seakan-akan selalu memanggil untuk ditemani. Niat awal biasanya hanya *ngecek* sebentar. Lalu keterusan *scroll* berbagai info dan status orang. Bahkan sering terjebak pada berita lambe-lambe-an. Waktu pun tersita tanpa sadar. Tanpa merasa sekian saat telah berlalu. Ternyata HP telah merampas kebebasan saya selama ini. Kebebasan untuk ber-me time. Saya sering menyalahkan pekerjaan atau kegiatan lain akan kurangnya waktu sendiri. Baru sadar betul, HP biang keladi utamanya.

Alasan kedua adalah Nawa jadi minim sekali meminta waktu bermain HP. Rengekan anak minta main HP ini sangat menggalaukan. Dikasih salah, dilarang nangis. Bikin imun menurun. Dia sempat bertanya, “mama kok gak main HP, gak kerja HP, gak kuliah HP?” Tiga istilah yang saya perkenalkan padanya untuk memberikan pengertian bahwa HP berlama-lama di tangan ibunya bukan hanya untuk main. Tapi juga kerja dan belajar. Harus diakui bahwa istilah ini terkadang semacam pengalihan. Nyatanya di presentase penggunaan HP yang terekam di aplikasi *smartphone* saya, waktu main HP yang tidak produktif selalu lebih banyak daripada yang produktif. Ini hanya pembenaran semata. Saya sadari itu. Tentu batasan produktif dan tidak produktif pun terbuka untuk diperdebatkan.

Kembali ke pertanyaan Nawa. Saya menjawab, “mama dua hari ini mau lebih banyak main sama Nawa”. Tampak matanya berbinar. Pertanda ia bahagia dan antusias. Lalu dari mulut polosnya terucap: “Nawa juga. Nawa gak mau main HP sekarang. Nawa mau bantu mama sama bapak kerja sambil main”. Kejadian ini memberikan pelajaran bahwa seringnya Nawa minta main HP karena kurangnya waktu saya dengan dia. Juga saya tidak menjadi *role model* yang baik untuk dia. Dalam usianya yang baru kemarin masuk sekolah kelas TK B. Dia sebenarnya *pengen* banyak waktu dengan orang tuanya. Sesuatu yang sering tidak saya sadari. Mungkin juga oleh kebanyakan orang tua lain. Nawa menghabiskan waktu akhir pekan dengan betul-betul kerja, membantu bapaknya yang berkebun. Membantu mamanya yang

menyediakan makanan bagi bapak. Dan semua. Tentu disela juga dengan main dan jalan-jalan kecil mengitari kebun. Sesederhana itu kita mulai kebaikan kecil untuk diteladani anak.

Minggu pagi, ada sahabat yang silaturahmi di kebun. Nawa meminta main HP bapaknya. Biasa saat begini dia merasa kami sibuk ngobrol ala orang dewasa. Mungkin untuk mengusir kebosanan atau karena tahu ibunya tak kuasa menolak. Bedanya, kali ini saya mengizinkan dengan sedikit ikhlas. Karena toh dari hari Jum'at dia tidak menyentuh HP sama sekali. Agar *step by step*-lah proses intervensi pengurangan "HP time" ini.

Alasan ketiga, waktu saya terasa lebih produktif. Saya sempat masak (*properly*) beberapa menu dua hari itu. Saya sempat ikut berkebun. Saya sempat berlama-lama di depan cermin. Juga di kamar mandi. Mematut dan memanjakan diri dengan segarnya air pegunungan. Tentu bermain dan membacakan buku untuk Nawa juga menjadi tidak terinterupsi.

Saya juga sempat membaca habis satu buku yang sangat menarik. Buku itu karangan Jhon C. Maxwell berjudul *Attitude: The Difference Maker*. Buku ini bagus sekali. Uraiannya lugas dan mudah dicerna. Bahasa Inggris-nya simpel dan tidak terlalu ilmiah. Inti argumen buku itu adalah *attitude* bukan segalanya untuk keberhasilan. Ia hanya membuat seseorang beda dari orang lain. Tiga faktor keberhasilan adalah *competence* (kemampuan), *experience* (pengalaman) dan *confidence* (percaya diri yang merupakan wujud *attitude*). Ketiganya harus ada bersamaan untuk keberhasilan seseorang. Jika ada dua orang, yang satu memiliki

dua yang pertama saja. Sedangkan yang lain memiliki ketiganya. Maka orang kedua lah yang cenderung berhasil. Tetapi *attitude* sendiri tanpa ada kemampuan dan pengalaman juga tidak membuat orang sukses. Buku setebal seratus lebih halaman itu memaknai *attitude* sebagai sesuatu yang ada dalam hati dan nampak lewat sikap dan perbuatan. *Attitude* adalah *trade mark* seseorang yang ditentukan oleh berbagai faktor: bawaan, bentukan lingkungan, persepsi diri, pengalaman, latar belakang keluarga, dan pendidikan. *Attitude* bisa diperbaiki dan harus terus dijaga.

Tiap kali keinginan main HP muncul, saya ambil buku itu. Saya baca dengan konsentrasi penuh. Saya baru sadar betapa lebih banyaknya buku kertas yang saya baca jika HP bisa sering menjauh dari saya. Dan itu lebih menyenangkan. Pun lebih sejuk dirasa oleh mata. Dibandingkan melototi layar. Lebih senang lagi, ketika buku itu memberi inspirasi bagi saya menulis sebuah artikel lepas tentang "Relasi Ideal Pasutri untuk Ketahanan Keluarga". Saya terdorong oleh beberapa kalimat di dalam buku itu. Artikel itu hampir selesai ketika saya membuat tulisan ini. Setelah 42 jam berlalu. Saya membuka lagi HP. Tidak ada hal yang tertinggal sebenarnya selama itu. Tidak ada juga pesan darurat yang masuk yang tidak bisa ditunda untuk direspons. Tidak ada yang merasa di-*ghosting* dengan sengaja. Juga tidak ada kerugian yang saya rasakan.

Saya justru merasa sangat beruntung menghabiskan akhir pekan kali ini dengan menutup akses terhadap HP. Selayaknya ini menjadi kebiasaan akhir pekan saya ke depan. Tentu dengan lebih

terencana. Antisipasi yang lebih terstruktur. Agar hasil yang didapat lebih masif dan berguna. Semoga ini tidak sekedar asa sementara. Anda mau mencoba? Silakan saja! Anda sungguh tidak akan menyesal.

Child-Free

Pilihan atau Pelanggaran?

ISU *child-free* sedang menjadi pembicaraan hangat di jagad media sosial. Hal ini dipicu oleh pendapat seorang selebritis yang mengatakan tidak memiliki anak sebagai resep ia awet muda. Ia dengan suaminya konon memilih secara sadar untuk tidak memiliki anak. Lalu, apa sebenarnya *child-free*? Apakah memilihnya adalah pelanggaran petunjuk agama dan nilai budaya? Adakah ruang, besar atau sempit, bagi pilihan *child-free* untuk *exist* di tengah kompleksitas hidup yang semakin kompleks ini, khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia?

dasar pernikahan dalam Islam adalah salah satunya sebagai media yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Di luar pernikahan, hubungan seksual mutlak haram. Hubungan tanpa nikah dinamakan zina yang mendapatkan hukuman yang sungguh berat, didera seratus kali bagi mereka yang belum menikah. Dirajam sampai mati bagi mereka yang selingkuh dengan orang lain padahal sedang dalam ikatan perkawinan yang sah. Hubungan seksual di dalam pernikahan ini ada yang menghasilkan anak dengan mudah, ada yang melalui proses yang sulit, bahkan ada yang tidak menghasilkan sama sekali. Artinya tidak semua orang yang menikah pasti memiliki anak.

Ilmu pengetahuan telah banyak membantu kesulitan untuk memiliki anak, misalnya dengan terapi, obat-obatan, bahkan

melalui program bayi tabung. Sayangnya, ada pasangan yang sudah berikhtiar menempuh jalan itu semua namun tidak kunjung memiliki anak. Sebagian pasangan lalu memutuskan untuk adopsi, atau mengangkat anak. Sebagian lain justru menyalurkan potensi "keorangtuaannya" kepada anak-anak lain, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun mereka yang tidak beruntung lainnya. Tetapi tidak dengan komitmen yang formal. Bahkan, ada yang sama sekali tidak mau berpikir tentang anak dan menerima takdir mereka untuk menjadi *child-less*, hidup tanpa anak. Mereka berpikir itulah nasib yang harus mereka jalani. Hal terakhir ini bisa dikategorikan sebagai *child-free* jenis pertama di mana antara pilihan dan takdir saling bertemu.

Child-free jenis selanjutnya adalah ketika pasangan benar-benar memilih untuk tidak memiliki anak walaupun secara seksual mereka tidak memiliki masalah. Artinya sebenarnya mereka bisa menjalankan tanggung jawab reproduksi. Namun, dengan sadar mereka mencegah itu terjadi. Mereka merubah nasib dengan berbagai cara, terutama bantuan medis dan kontrasepsi. Pilihan ini bisa sementara dan juga selamanya. Tentu saja pilihan ini berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan yang mungkin personal, juga sosial, ekonomi, bahkan politik. Kok bisa?

Personal mungkin berhubungan dengan penyakit. Ada indikasi dan diagnosa misalnya yang menunjukkan bahwa salah seorang pasangan tidak berumur panjang. Seorang teman yang istrinya terdiagnosa kanker dan baru tahu setelah empat bulan menikah, memutuskan untuk tidak memiliki anak. Demikian juga

ada pasangan yang pernah mendapatkan rezeki kehamilan tetapi pada usia sekian kehamilan ditemukan anak itu cacat. Mereka ingin mempertahankan, tetapi *qadarullah* mereka gagal. Pasangan ini keguguran. Ternyata setelah diperiksa ada masalah kelainan gen yang memang tidak bisa dihindari. Diagnosa lanjutan memprediksi bahwa calon janin mereka berikutnya akan mengalami masalah yang sama. Akhirnya mereka tidak berani mengambil risiko. Pilihan *child-free* bisa juga karena masalah trauma yang masih belum terobati, mengalami kekerasan yang berkepanjangan dari orang tua, dan ia khawatir ini akan berimbas pada anaknya. Dan berbagai alasan personal yang lain.

Pilihan tersebut juga dapat dipengaruhi konteks sosial. Banyak kasus anak-anak terlantar. Baik secara ekonomi maupun emosional. Hal ini menurut pandangan mereka, sebenarnya karena orang tua belum mampu dan belum siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih berat. Melahirkan anak beriring dengan kewajiban mendidik, mendampingi, mengarahkan, mengantar, dan menjadikan mereka sebagai generasi yang bertanggungjawab. Ini memerlukan kesiapan ekonomi maupun emosional. Dan tidak semua orang merasa atau sebenarnya mampu untuk tugas berat itu. Bahkan melahirkan atau tidak melahirkan erat kaitannya dengan masalah politik. Jika melahirkan banyak anak berdasarkan keinginan memperbanyak umat, keputusan tidak melahirkan juga muncul karena visi ke depan yang menekankan kualitas dibandingkan kuantitas umat. Pilihannya justru fokus pada pekerjaan untuk memperbaiki generasi yang sekarang sudah ada

walaupun bukan dari anak yang lahir dari rahim dan keluarga mereka sendiri.

Di titik ini, bisa dipahami bahwa *child-free* atau pilihan untuk tidak memiliki anak atau bebas dari anak bukan hal yang berdiri sendiri. Ada latar belakang yang panjang, beragam, dan kompleks. Bukankah memutuskan tidak memiliki anak tidak sesuai dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan budaya ketimuran? Ajaran al-Qur'an maupun hadits memang menyinggung permasalahan kepemilikan anak ini. Firman Allah dalam surat an-Nahl (16) ayat 72, yang artinya: "Dan Dia menjadikan untuk kalian melalui istri-istri kalian, berupa anak-anak dan cucu-cucu." Ayat ini menurut para ulama' tidak menunjukkan perintah yang jelas bahwa memiliki anak wajib. Hanya berbentuk *khabar* (informasi).

Hanya saja, ada perintah yang lebih jelas berdasarkan hadits Nabi yang artinya: "Nikahilah wanita-wanita yang kalian cintai dan (wanita-wanita tersebut) berpotensi untuk memiliki banyak anak. Karena sesungguhnya aku (akan merasa bahagia) karena banyaknya umatku dibandingkan umat-umat lainnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam at-Thabarani, dan sejumlah periwayat hadis lainnya yang dikenal adil dan dhabit. Tetapi, ada juga ayat lain yang menjelaskan tentang posisi anak dalam keluarga. Surat at-Taghabun (64) ayat 14 menyebut anak bisa menjadi musuh sedangkan ayat 15 surat yang sama mengatakan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Oleh karena itu al-Qur'an dalam surat

Furqan (25) ayat 72 pun merekam doa yang harus dibaca oleh kaum muslim untuk memohon kepada-Nya agar menjadikan anak yang dilahirkan sebagai *kurrata a'yun* (penyejuk mata).

Lebih jauh lagi, di surat al-Kahfi (68) ayat 46, Allah membandingkan antara harta dan anak di satu sisi dengan amal yang saleh di sisi lain. Ayat tersebut mengatakan anak sebagai perhiasan dunia. Ayat tersebut secara lengkap berbunyi "harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". Menurut pandangan para mufasir, ayat di atas menjelaskan bahwa harta dan anak memang bisa memberikan kesenangan tetapi hanya berhenti bagi kesenangan dunia dibandingkan dengan melakukan perbuatan baik (amal saleh) yang berdimensi akhirat. Namun, amal saleh sangat banyak macamnya. Bisa juga dalam bentuk mendidik anak dengan sebaik-baik pendidikan agar menjadi pertolongan kelak di akhirat. Ibarat harta yang dinafkahkan di jalan Allah, akan menjadi amal yang akan menolong kemudian. Hadis Nabi mengidentifikasi bahwa doa anak yang saleh sebagai hasil didikan yang baik adalah satu dari tiga amal jariyah di samping sedekah dan ilmu yang bermanfaat.

Dalil-dalil normatif di atas menunjukkan bahwa perkara memiliki anak tidak hitam putih. Al-Qur'an menggambarkan nilai positif (menjadi penyejuk mata dan perhiasan dunia) juga negatif (menjadi musuh dan juga fitnah) yang bisa ditimbulkan oleh anak. Ya, adalah penting untuk memiliki anak karena Nabi senang

melihat umatnya banyak. Tetapi, jauh lebih penting memikirkan dan mempersiapkan diri untuk memastikan implikasi positif dari keberadaan anak itu. Hal yang sering kali dilupakan. Bahkan banyak fakta menunjukkan anak justru sebagai korban dari keegoisan orang tua yang ingin dianggap memiliki hidup yang sempurna. Anak malah menjadi musuh dan fitnah bagi kehidupannya.

Al-Qur'an lebih menekankan bahwa generasi yang dihasilkan harus menjadi umat yang berdaya dan berkualitas. Di surat an-Nisa' (4) ayat 9, umat Islam diingatkan "dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya". Jadi, memiliki anak adalah tanggung jawab seumur hidup yang seharusnya implikasi positifnya dimulai di dunia dan berlaku jauh sampai di akhirat. Menjadikan anak yang berdaya dan sejahtera di segala sisi, baik fisik, mental, spiritual, ekonomi, dan sosial adalah perjalanan yang penuh liku dan memerlukan kesungguhan.

Kenyataannya, pilihan untuk memiliki keluarga *child-free* menunjukkan *trend* yang lebih jelas terekspresi walaupun umumnya masih dianggap tabu. Hal ini seiring dengan semakin tingginya *social pressure* (tekanan sosial) terhadap keluarga. Keluarga sekarang semakin terindividualisasi, bergerak dari keluarga besar menjadi hanya keluarga inti. Keluarga inti ini semakin tertutup dari kontribusi dan kontrol masyarakat di dalam melakukan tanggung jawab dan fungsinya. Tetapi, pada saat yang

sama, keluarga dituntut untuk bekerja keras menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Hanya saja gaya hidup *child-free* ini masih mendapatkan kritik yang tajam di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang menganggap “relasi keluarga” baru bermakna jika dilengkapi kehadiran anak.

Akan tetapi, menurut saya, pilihan ini juga tidak harus dihukumi dengan sebuah pelanggaran tanpa kita mau memahami latar belakang mengapa pilihan itu ada. Benar bahwa kita tidak boleh berputus asa dari nikmat Allah dan tidak sepantasnya khawatir untuk jatuh miskin dengan memiliki anak. Pertimbangan *child-free* tidak semata-mata bersifat material. Jika keputusan untuk *child-free* ini untuk menghindari hal yang merugikan yang lebih besar, maka kaidah fikih yang mengatakan “menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari mengambil manfaat”. Jadi apakah *child-free* itu pilihan yang melanggar? Tunggu! kesimpulannya tidak sesederhana itu. Intinya, pilihan memiliki anak harus disertai dengan kemauan dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan anak itu sebagai perhiasan di dunia, sekaligus “investasi” bagi akhirat. Dan itu tidak mudah!

Apakah kecenderungan *child-free* ini akan membawa kita pada terhentinya pertumbuhan generasi? Sebagaimana yang terjadi di Jepang yang konon banyak sekolah dasar ditutup karena semakin minimnya generasi usia itu? Hal ini mungkin saja terjadi jika pilihan *child-free* menjadi kampanye yang masif digerakkan. Tetapi, saya meyakini bahwa keinginan memiliki anak sebagai sumber kebahagiaan dan “investasi” untuk menjalani kehidupan

yang *meaningful* dan *purposeful* di dunia dan di akhirat masih menjadi kecenderungan umum bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap keturunan adalah bukti bahwa mereka ada. Eksistensi diri ditentukan oleh ada atau tidak adanya anak. Kualitas diri dilihat dari keberhasilan orang tua mendidik anak. Lihat saja aneka *bullyi*-an dan penolakan di media sosial terkait cuitan selebriti tersebut. Saya optimis, bahwa *child-free* tidak akan menjadi gaya hidup yang umum dianut oleh masyarakat (muslim) Indonesia.

Noktah Merah Perkawinan:
Berjuang Bersama untuk Keutuhan

LEMBAGA perkawinan adalah bahtera yang dimiliki bersama oleh suami dan istri. Sebagaimana mereka saling mencari di saat butuh, keduanya memiliki peran yang sama pentingnya untuk selalu utuh. Menjaga keutuhan perkawinan adalah upaya panjang dan penuh dinamika dan harus diperjuangkan berdua. Hal itulah yang menjadi pesan inti dari sebuah film Indonesia *Noktah Merah Perkawinan* yang sejak 15 September 2022 tengah tayang dan saat ini *trending* di seluruh bioskop tanah air.

Film *Noktah Merah Perkawinan* yang Marsha Timothy bintangi sebagai Ambar, dan Oka Antara sebagai Gilang ini *is a must-see one*, menurut saya. Pasangan suami istri yang dikaruniai dua anak ini mengalami permasalahan setelah 11 tahun menikah karena salah paham dan campur tangan orang tua. Pada saat mereka mengalami problem komunikasi, masuklah Yuli yang dibintangi Sheila Dara, seorang yang 'mau jadi' pelakor tapi gagal. Yuli sebenarnya adalah murid kelas keramiknya Ambar, tetapi pertama mengenal Gilang ketika dimintai tolong oleh Ambar mengantarkan dua anaknya (Bagus dan Ayu) ke rumah ibunya. Ambar saat itu menghindari pertemuan dengan Gilang di rumah

ibunya tersebut karena mereka baru saja bertengkar hebat dan pemicunya adalah ibunya.

Awal Mula Persoalan Keluarga

Ambar memiliki kakak yang menikah dengan perempuan Jerman lalu bercerai dan masih tinggal di Jerman mengurusi dua anaknya dengan pekerjaan yang tidak tetap. Ibunya sering kali meminta bantuan keuangan ke Gilang untuk membantu kakak kandung Ambar tersebut tanpa sepengetahuan Ambar. Tetapi suatu saat Gilang justru bercerita ke ibu kandungnya sendiri tentang kelakuan mertuanya tersebut. Hal inilah yang menjadi fokus masalah karena Ambar merasa tidak dianggap. Ibunya Gilang (mertua Ambar) lebih tahu rahasia keluarganya dan menjadikan hal itu untuk berulangkali menyindir Ambar.

Berulangkali Ambar membuka komunikasi untuk menyelesaikan masalah, tetapi Gilang tidak ingin memperkeruh. Alasannya menghindar untuk menjaga perasaan Ambar. Gilang memilih untuk banyak diam. Bagi Ambar, sikap itu bermakna pengabaian terhadap perasaannya.

Kebuntuan Komunikasi

Mengalami kebuntuan komunikasi, Ambar mendatangi penasehat perkawinan atas rekomendasi sahabatnya. Sepasang suami-istri ini datang berkonsultasi, tetapi di mata Gilang, sebenarnya mereka tidak memiliki masalah. Puncak kekesalan Ambar ketika Gilang meninggalkan forum curhat itu di tengah-

tengah sebelum inti permasalahan mereka terklarifikasi. Ambar merasa lelah. Masalah menjadi lebih rumit, ketika Ambar mencurigai ada hubungan spesial antara Yuli dan suaminya. Terkonfirmasi oleh pesan WA yang ia lihat di handphone suaminya dan menangkap basah Yuli dan Gilang berduaan di kantor Gilang di malam hari. Dia memutuskan cerai.

Pada titik ini, Gilang merasa hancur karena baginya Ambar dan anak-anaknya adalah sumber kebahagiannya. Dia melakukan berbagai cara untuk memengaruhi keputusan Ambar. Dia menangis, memohon maaf, menghiba. Akhirnya perceraian mereka gagal dan keluarga tetap utuh.

Kisah Ambar dan Gilang banyak terjadi di kehidupan nyata. Bahkan banyak yang jauh lebih kompleks dan goyang bagai *roller coaster*. Kehidupan perkawinan memiliki cerita dan tantangannya masing-masing. Problem datang silih berganti dan sumbernya bisa beragam. Bisa dari anak, dari tetangga, keluarga besar, pekerjaan, kondisi ekonomi. Masih panjang daftar penyebabnya kalau diteruskan. Satu yang pasti bahwa suami dan istri harus memiliki iktikad yang baik dan usaha yang sama keras untuk menghalau problem itu semua. Cara bisa saja berbeda dan ini perlu kita komunikasikan secara efektif.

Problem Keluarga

Problem keluarga Ambar dan Gilang dalam film *Noktah Merah Perkawinan* ini sebenarnya tidak serius. Tidak ada penelantaran ekonomi, kekerasan, atau perselingkuhan (walaupun

Gilang sedikit memberi harapan kepada Yuli yang ternyata merasa nyaman dengan komunikasi yang terjadi antar mereka). Tetapi masalah kecil akan menjadi besar tanpa komunikasi yang tuntas. Maksud Gilang untuk menjaga perasaan Ambar tidak tersampaikan karena komunikasi antara mereka selalu tidak sampai pada tujuan. Gilang adalah tipe orang yang ingin menghindar dari masalah dan tidak ingin bercekcok, sementara Ambar ingin segalanya terang benderang. Ambar menginginkan tidak boleh ada orang yang pertama tahu apa pun yang Gilang lakukan, bahkan ibu kandungnya sendiri. Mereka harus mandiri di dalam mengambil keputusan dan mencari solusi dari permasalahan.

Perbedaan cara pandang antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri seringkali terjadi. Mereka dibesarkan dari keluarga dan budaya serta perlakuan yang berbeda. Hal itu kemudian membentuk karakter mereka di saat menjalani pernikahan. Pertemuan dua insan dalam satu misi bersama ini tidak pernah berjalan mulus.

Komunikasi yang Baik adalah Kunci

`Komunikasi yang baik dan efektif adalah kunci untuk menyatukan. Mendiamkan kemudian masalah menumpuk akan menimbulkan respons yang berlebihan. “Saling mendiamkan sama buruknya dengan saling memaki” (*quote* dari Ayu Azhari sebagai *marriage counselor*). Dan saya setuju! Komunikasi dengan pasangan, dengan bahasa lisan maupun bahasa isyarat, secara santun dan beradab, harus terus dilakukan.

Komunikasi yang terus terjalin akan mempermudah pasangan menghadapi gelombang dan badai di dalam rumah tangga. *Feeling* Ambar yang mencurigai ada orang lain yang masuk dalam kehidupannya secepatnya ia antisipasi. Ambar tunjukkan sikapnya. Gilang merespons dengan sedikit tidak tegas. Dia tahu Ambar cemburu, tapi dia tidak cepat menghindar dari Yuli yang justru telah diputus oleh pacarnya karena kecurigaan bahwa Yuli main hati dengan Gilang.

Mereka lebih intens berkomunikasi karena terlibat proyek perbaikan taman di Café milik Kemal (Roy Sungkono), pacarnya Yuli. Tetapi pada akhirnya Yuli mundur teratur dan hancur sendiri karena Gilang menegaskan dan menunjukkan bahwa dia tidak mungkin ke lain hati. Cobaan adanya orang ketiga menjadi salah satu pengganggu utama di dalam pernikahan. Hal ini akan menjadi bencana, jika seorang suami atau istri yang sudah memiliki komitmen membiarkan perasaannya liar, menyasar orang lain di luar sana.

Suami Istri Punya Peran yang Sama

Ada banyak suami yang tidak seperti Gilang, malah membiarkan perasaan yang seharusnya tak bertuan itu tumbuh subur. Mereka bahkan menjadi pihak yang memulai menggoda. Menebar pesona dan melupakan komitmen dan janji suci yang sudah mereka sepakati bersama adalah jalan menuju jurang yang menghancurkan. Ambar sepanjang pernikahannya memilih cara untuk selalu membuka komunikasi jika mereka punya masalah.

Ada kesan Gilang tidak peduli karena masalah bagi Ambar bukan masalah bagi dia. Tetapi usaha Gilang untuk mempertahankan rumah tangga mereka justru ketika Ambar sudah berada di puncak kelelahan.

Ambar memutuskan untuk menggugat Gilang ke pengadilan. Dunia terasa gelap bagi Gilang. Tidak segan dia meminta maaf, menangis, dan merayu istrinya untuk membatalkan keputusan itu. Tidak banyak suami seperti Gilang yang tidak mengedepankan egonya pada titik ini. Permintaan cerai seorang istri malah ia anggap sebagai tantangan dan perendahan yang menghancurkan ego maskulinitas mereka.

Film Noktah Merah Perkawinan yang disutradarai oleh Sabrina Rochelle, yang merupakan adaptasi dari sinetron tahun 1990-an dan dibintangi oleh Ayu Azhari dan Cok Simbara ini, sukses menyampaikan pesan bahwa memang suami dan istri adalah dua sutradara yang memiliki peran yang sama terbungkus nilai kesalingan di dalam mengarahkan cerita bahtera rumah tangganya. Apakah keluarga menjadi surga atau neraka, terjaga terus atau hilang, pupus, mereka berdualah yang menentukan! **.**

BAB IV

Metodologi

dan Isu Hukum Keluarga

"One child,

one teacher,

one book,

and one pen can change the world"

(Malala Yousafzai)

Autoetnografi:

Pencarian Metodologis bagi Studi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (I)

AUTOETNOGRAFI sudah banyak dipakai pada penelitian di bidang-bidang lain, tetapi masih jarang dipakai pada hukum Islam termasuk hukum keluarga. Sejauh ini, untuk konteks Indonesia, baru tulisan Arskal Salim (2020) yang menggunakan metode ini untuk mengungkap perjalanannya sebagai pembelajar sekaligus ahli hukum Islam. Pada artikelnya yang berjudul "*From Ushul Fiqh to Legal Pluralism: An Autoethnography of Islamic Legal Thought*", Salim memperkenalkan *autoethnography* sebagai metode untuk mempelajari hukum Islam yang berdasarkan paradigma post-modernis. Sebagai bagian dari post-positivis, paradigma ini mengakui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman subyektif sama ilmiahnya dengan pengetahuan yang terbentuk dari angka yang obyektif (Salim, 2020, p. 82). Bagi dia, tulisan autoetnografi bersifat natural, profound, dan akademik karena memiliki dual karakter yang seimbang yaitu "personal sekaligus intelektual, evokatif dan analitis, deskriptif juga teoretis" (Salim, 2020, p. 104).

Tulisan ini bertujuan untuk melihat celah yang memungkinkan autoetnografi menjadi alternatif metode di dalam

studi hukum keluarga Islam khususnya pada dua aspek yang saling berhubungan yaitu sebagai sumber pengetahuan bagi pengembangan epistemologi studi keluarga dan sebagai inspirasi bagi pembaruan hukum keluarga Islam. Istilah autoetnografi pertama kali dikenalkan pada tahun 1979 oleh David Hayano yang berargumen bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan (Hayano, 1979). Uniknya, metode ini menjadikan orang yang sama sebagai peneliti sekaligus sebagai pihak yang diteliti. Jadi autoetnografi adalah metode yang menggunakan pengalaman pribadi peneliti sebagai data untuk menjelaskan atau menginterpretasikan praktik, kepercayaan, nilai, dan teks budaya tempat dia hidup (Ellis, 2004; Maréchal, 2010).

Metode ini berpusat pada "*reflexivity*" di dalam mencari makna dari pengalaman, pengetahauan, dan karya yang dimiliki oleh seorang individu dalam kehidupan sosialnya (Maréchal, 2010). Paradigma post-positivis melahirkan pendekatan kualitatif yang bersifat *interpretative* di dalam kerja penelitian. Paradigma ini sebagai kritik terhadap tidak memadainya pendekatan kuantitatif yang melihat pengetahuan semata-mata bersifat obyektif dan bersandar pada kepastian dan angka. Paradigma ini berkembang sedemikian rupa dan masuk juga dalam studi tentang agama dan masyarakat beragama. Sebagai pengalaman yang bersifat personal, pengalaman beragama adalah sumber pengetahuan yang tidak pernah pupus dan tidak terbatas (Bowen, 1998, 2012). Dalil agama (*resources*) bersifat statis, seragam dan terbatas sedangkan praktik agama (*practices*) berlangsung terus

menerus, beragam, dan tidak terbatas. Oleh karenanya, mempelajari agama melalui pengalaman individu akan memberikan nuansa dan wawasan yang lebih luas bagi pemahaman yang lebih lengkap terkait agama dan masyarakat beragama.

Pengalaman sebagai Sumber Pengetahuan

Ingat tulisan berjudul "*Layang Putus*?" Tulisan serial yang awalnya hanya di-*share* terbatas lewat media sosial penulis itu viral di tahun 2021 dan bahkan kemudian diangkat menjadi film. Netizen gesit mencari informasi terkait siapa dan apa di balik tulisan itu. Ternyata kisah yang disampaikan adalah pengalaman pribadi penulis. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter hewan yang diselingkuhi oleh suaminya padahal mereka sudah dikaruniai empat anak yang lucu-lucu.

Di Indonesia, kisah konflik keluarga selalu menarik perhatian publik, lebih-lebih lagi jika dilakukan oleh publik figur dan selebritis. Sebut saja kisah keluarga AA Gym, DEP (seorang motivator), DAS (Aktivis sosial), Virgoun dan Inara, Ari Wibowo dan Inge Nugraha dan banyak lagi. Bukan semata-mata untuk gosip, tetapi banyak pelajaran yang diambil dari kisah-kisah itu. Misalnya kekuatan seorang istri atau suami menghadapi konflik, KDRT, perpisahan, dan perselingkuhan. Kisah ini semua menjadi sasaran empuk industrri podcast, *infotainment*, Tik-Tok dan YouTube untuk meningkatkan *viewers* mereka. Di samping konflik, ada beberapa podcast yang juga khusus atau sering

menjadikan pengalaman keluarga selebritis sebagai konten, misalnya podcast pasangan Ussy-Andika, The Sungkar family, dan juga komedian UUT-istrinya. Podcast mereka lumayan populer walaupun tidak seviral kisah antagonis sebagaimana yang disebut sebelumnya. Namun, fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat punya level ketertarikan yang tinggi bagi kehidupan privasi keluarga, yang positif sebagai teladan, yang negatif untuk diambil pelajaran.

Bagi akademisi Hukum Keluarga Islam, kisah keluarga adalah sumber bahan ajar yang praktis sekaligus menarik. Banyak topik hukum keluarga yang bisa dikaitkan dengan kisah mereka baik ketika berbicara pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, Psikologi Keluarga, Fikih Perempuan, Sosiologi Keluarga maupun Antropologi Keluarga. Misalnya, ketika terjadi pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Alfin, putra salah seorang dai kondang yang kemudian berakhir cerai. Kisah ini menjadi bahan untuk membicarakan topik "batasan minimal usia pernikahan". Kisah syaikh Puji yang menikahi anak di bawah umur juga bisa menjadi bahan perbandingan. Kisah publik figur lainnya misalnya Aceng Fikri (Bupati Garut, Jawa Barat kala itu) dan Fanny Octaria yang menikah secara sirri dan bercerai pada hari keempat pernikahannya juga menjadi inspirasi bagi ide penelitian.

Buku yang ditulis oleh Latif Fauzi (2023) berjudul "*Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*" berangkat dari kisah ini. Sebagaimana yang Fauzi jelaskan pada bagian pengantar bukunya.

Kisah yang viral di tahun 2011 itu juga menjadi sumber kegelisahan akademik saya, sehingga terinsipirasi meneliti tentang pembayaran perkawinan sebagai bahan disertasi. Hal ini dipicu oleh *statement* Fikri, "saya telah membayar mahar yang mahal dan paling mahal bagi perempuan Garut, jadi jika saya merasa dia tidak cocok, saya bisa mengembalikan dia ke keluarganya, walaupun saya tidak akan meminta kembali mahar itu".

Pengalaman-pengalaman keluarga juga bisa menginisiasi gerakan pengabdian dosen. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa keluarga menjadi penentu bagi baik-buruknya masyarakat. Kesadaran ini kemudian menjadikan keluarga sebagai target untuk terlaksananya sosialisasi, pendidikan, dan peningkatan kesadaran bagi banyak gerakan sosial. Jadi begitu jelas bahwa kehidupan keluarga menjadi sumber inspirasi sekaligus target aksi yang selalu relevan bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun rekayasa sosial yang masih terus diupayakan.

Autoetnografi:
Pencarian Metodologis bagi Studi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (II)

Karakteristik Unik Penelitian Keluarga

KELUARGA sebagai unit sosial terkecil sekaligus terpenting memiliki karakteristik tertentu. Sebagian karakter itu memudahkan penelitian terhadap keluarga (poin 1-3), sedangkan yang lain justru menjadi tantangan (poin 4-6).

1. Pengalaman Semua Orang

ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengalami hidup sebagai anggota keluarga dan oleh karenanya dia diatur oleh Hukum Keluarga. Bahkan anak yatim dan piatu sejak lahir juga menjadi kajian bagi hukum keluarga. Bagaimana perwaliannya, bagaimana hartanya, apa hak dan kewajibannya dalam relasi perwalian dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum keluarga sangat dekat dengan kehidupan semua manusia. Ahli hukum lain misalnya hukum pidana, belum tentu mengalami aturan-aturan pidana, beda dengan hukum keluarga yang baik ahli atau tidak tetap mengalaminya.

2. Rentang Waktu tanpa Ujung

Scope dan fokus hukum keluarga terentang luas mencakup hal-hal yang terjadi bahkan sebelum kehidupan seseorang sampai setelah kematian. Hukum keluarga mengatur dengan aturan yang

berkait dengan cara dan institusi yang legal bagi lahirnya keturunan misalnya syarat dan rukun perkawinan, hukum keluarga juga mengatur bagaimana harta seseorang dipergunakan dan dibagi setelah kematiannya misalnya terkait harta waris. Hukum keluarga juga mengatur aspek-aspek yang terkait sepanjang kehidupan manusia, ketika menjadi anak, saudara, suami-istri, ayah-ibu, kakek-nenek. Jadi hukum keluarga mengatur berbagai aspek sepanjang, sebelum, maupun setelah kehidupan manusia.

3. Miniatur Kehidupan Sosial

Keluarga memang biasanya berada di sebuah bangunan fisik bernama rumah atau ruang domestik yang tidak begitu luas dibandingkan dengan ruang publik. Namun dinamika yang terjadi di dalam keluarga sangat berkaitan atau bahkan representasi dari apa yang terjadi di luar sana. Keluarga merupakan awal pembentukan nilai dan ujung dari berbagai permasalahan sosial di luar sana. Kehidupan keluarga memberikan pengaruh timbal balik bagi konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, di luar sana. Tidak berlebihan jika keluarga dinamakan sebagai representasi dari fenomena sosial yang terjadi dan sebaliknya.

4. Ruang Privasi

Walaupun keluarga sudah banyak menjadi sumber inspirasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masih banyak ruang di dalam keluarga yang belum terjamah terutama bagi peneliti sebagai *outsider* baik karena isunya sensitif, kode etik penelitian, ketertutupan subyek penelitian, dan aksesibilitas peneliti terhadap itu semua yang terbatas. Isu KDRT misalnya, tidak gampang

dijadikan bahan penelitian terutama jika menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk etnografi atau fenomenologi yang membutuhkan keterlibatan intens seorang peneliti di satu sisi dan kepercayaan penuh subyek yang diteliti di sisi lain untuk membagi kisahnya.

Hal-hal traumatik seperti perceraian dan akibatnya seperti konflik hak asuh anak, dan harta gono-gini relatif sulit diceritakan kepada orang lain. Di Indonesia, di mana bercerita mengenai hal-hal tabu seperti seksualitas dan kehidupan keluarga dianggap sebagai membuka aib memberikan tantangan tersendiri bagi peneliti kehidupan keluarga. Padahal, data-data kualitatif seperti itu sangat dibutuhkan untuk menganalisis normativitas kehidupan keluarga maupun deskripsi empiris dinamika kehidupan keluarga. Biasanya para peneliti hukum keluarga kemudian menjadikan orang-orang terdekat mereka, apakah itu keluarga, atau sahabat untuk menjadi informan penelitian.

5. Bersifat Relasional

Sebenarnya, meneliti keluarga seharusnya juga meneliti semua anggota keluarga. Sebab, kehidupan keluarga yang bersifat relasional. Terutama terkait keluarga inti yaitu bapak-ibu-anak. Karena kehidupan keluarga dialami bersama maka perspektif mereka masing-masing sangat penting untuk menangkap secara utuh dinamika dalam keluarga baik konflik, resistensi, maupun resiliensi. Dalam hal ini, peneliti hukum keluarga sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan data dari semua pihak yang terlibat terutama jika berkaitan dengan hal-hal yang

didefinisikan sebagai aib atau terjadi konflik di antara mereka. Oleh karena itu, di dalam penelitian hukum keluarga penting untuk melakukan *double unit analysis*, yaitu gender analisis untuk melihat pengalaman berbeda antara suami dan istri, maupun *inter-generational analysis* untuk melihat relasi orang tua dan anak.

6. Minimnya Suara Perempuan dan Anak

Patut diakui bahwa dalam beberapa aspek kehidupan keluarga masih *male-centred*. Akibatnya, banyak penelitian keluarga yang menganggap suara laki-laki sebagai kepala keluarga adalah representasi dari keluarga itu sendiri. Akibatnya, pengalaman dan suara perempuan sebagai istri dan anak sering kali lirih bahkan terbungkam. Pada beberapa aspek lain, justru laki-laki yang tidak banyak didengar, misalnya pada kasus KDRT, banyak penelitian yang mengungkap berbagai hal yang terkait dengan korban dalam hal ini mayoritas istri, tetapi tidak banyak yang melihat dari perspektif pelaku yang biasanya suami. Terjadilah apa yang dinamakan sebagai *under-representation* di satu sisi, dan *over-generalization* di sisi lain di dalam banyak studi hukum keluarga.

Pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan keunikan hukum keluarga itu untuk terus mengembangkan epistemologi studi hukum keluarga di era kontemporer ini? Tulisan ini mengusulkan metode autoetnografi di dalam studi hukum keluarga. Metode ini akan memaksimalkan tiga karakter hukum keluarga di atas yaitu: *experienced*, *timeless*, dan *social miniature*. Dalam waktu yang bersamaan, tantangan yang terkandung pada

ketiga karakter lainnya yaitu *private*, *relational*, and *gendered* dapat teratasi.

Autoetnografi: Metode Emansipatoris Studi Keluarga

Autoetnografi memiliki tiga aspek yang berkaitan dan seimbang yaitu: “refleksi, analisis, dan interpretasi” (Synder, 2015, p. 94). Refleksi artinya bersumber dari pengalaman peneliti sendiri. Analisis di sini artinya menghubungkan pengalaman individu tersebut (“I”) dan konteks sosial serta literatur yang terkait dengan pengalaman yang diceritakan (“other”). Sedangkan interpretasi adalah sebuah narasi yang tersusun dari kombinasi dan hubungan timbal balik antara “I” dan “other” itu sebagai sebuah tawaran pengetahuan. Jadi autoetnografi bukan sekedar cerita yang narsistik, tetapi mengambil *angle* tertentu dalam kehidupan pribadi yang berkaitan dengan konteks dan fenomena sosial yang menjadi kegelisahan akademik sehingga narasi yang dihasilkan mengandung makna dan pengetahuan yang bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Salah satu kritik yang banyak sekali diarahkan pada metode ini adalah terkait subyektifitasnya yang dikhawatirkan berlebihan. Ellis (2004) menjelaskan bahwa untuk meminimalisir subyektivitas ini, ukuran obyektivitas yang digunakan dalam ilmu pengetahuan positivis dapat dipinjam yaitu reliabilitas, validitas, dan dapat digeneralisasi.

Reliabilitas ini berhubungan dengan kredibilitas peneliti. Peneliti harus memastikan validitas cerita dengan memastikan bahwa pengalamannya adalah bukan fiksi melainkan sejarah hidup, yang berhubungan dengan konteks sosial dan berkonsultasi

pada referensi terkini. Sedangakan, dapat digeneralisir maksudnya adalah bahwa cerita itu hidup, dapat dipercaya, dan masuk akal sehingga pembaca merasa terhubung dengan cerita itu dengan pengalaman mereka sendiri. Jika ketiga hal ini dapat dilakukan maka tulisan autoetnografi dapat memberikan justifikasi, legitimasi, dan pengetahuan baru yang membantu orang lain untuk memahami dunia dan kehidupan mereka.

Metode ini sangat *compatible* digunakan di dalam penelitian atau studi hukum keluarga karena untuk memfasilitasi pengalaman yang teritegrasi tanpa batas dan privasi yang bersifat relasional dalam kehidupan keluarga menjadi sumber pengetahuan dan dasar epistemologis bagi pengembangan studi hukum keluarga. Selain itu, metode ini memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin tidak terjamah oleh peneliti *outsider* untuk secara sukarela membagi pengalamannya yang bersifat sangat pribadi sekalipun. Dengan demikian diharapkan *problem under-representation* dan *over-generalization* di mana ada pihak-pihak yang tertinggal untuk menyuarakan pengalamannya atau ruang-ruang privasi yang masih tidak terjamah dalam keluarga dapat terakomodir.

Di titik ini, karakter emansipatori-partisipatif hukum keluarga Islam dapat lebih lancar dan cepat diupayakan. Saya optimis, metode ini akan berkontribusi untuk memberikan berbagai analisis yang lebih seksama bagi studi hukum keluarga. Pada gilirannya, berbagai analisis dan perspektif ini dapat menjadi

dasar bagi reformasi hukum keluarga Islam sebagai hukum yang menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. **[]**

Integrasi Ilmu:

Menuju Implementasi Integrasi Keilmuan lewat Kerja Induktif (I)

TOPIK integrasi keilmuan di PTKI sudah lama menjadi wacana, tetapi belum terformulasi bentuk rupanya di dalam kerja-kerja keilmuan lembaga keislaman ini. Belum satu kata pada level pelaksanaan (Jahroni: 2020). Integrasi ilmu masih berkutat pada argumen filosofis atau ontologis dan belum terimplementasi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi (Muzakki: 2020). Oleh karenanya, menurut mereka, perlu segera diaplikasikan melalui huluisasi (epistemologi) dan hilirisasi (aksiologi) konsep tersebut sehingga dirasakan distingsi dan keunggulan PTKI serta berdayaguna bagi *stakeholders*.

Menurut hemat saya, salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan untuk menyusun petunjuk juklak-juknis integrasi keilmuan ini adalah memulai kerja induktif yang *bottom up*. Yaitu dengan mengumpulkan contoh-contoh aplikatif yang telah dilakukan oleh dosen PTKI dari berbagai program studi dan *background* keilmuan di dalam melakukan kerja-kerja integrasi ini. Percikan-percikan pengalaman baik yang sukses bahkan yang mungkin gagal di dalam eksperimentasi integrasi ini penting. Mereka akan menjadi basis data di dalam merumuskan langkah-langkah umum yang bisa memayungi kerja integrasi ini baik pada level pendidikan-pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Metode induktif seperti ini akan lebih mendekatkan

praktik integrasi keilmuan pada pelaksanaan ketimbang metode deduktif, yang *top down*, berkutat di konsep dan tataran filosofis yang telah sekian dasawarsa dilakukan. Bukankah Ushul Fikih sebagai metode istinbat hukum Islam dirumuskan belakangan? Padahal proses menarik hukum dari dalil-dalil Islam sudah berlangsung sejak turunnya Islam itu sendiri. Kerja induktif seperti *precedence* sejarah tersebut bisa menjadi inspirasi.

Masing-masing program studi memiliki penekanan dan karakter sendiri-sendiri. Jika kategorisasi ilmu agama dan ilmu umum sebagaimana disebutkan dalam "SK Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam" kita sepakati, maka kedua ilmu ini tentu juga memiliki *starting point* yang berbeda di dalam melakukan kerja integrasi ini. Agar terhindar dari apa yang dinamakan sebagai "Islamisasi" atau "ayatisasi" dari perpaduan ilmu agama dan umum, maka untuk kepentingan tulisan ini, saya ingin merumuskan bahwa integrasi ilmu bagi kedua jenis ilmu ini adalah "memahami ilmu agama dengan menggunakan perangkat ilmu umum dan sebaliknya". Perangkat yang dimaksud adalah bisa paradigma, teori, metodologi, maupun perspektif.

Dalam aplikasinya, ketentuan umum tersebut bisa diperluas dan dipersempit tergantung karakter cabang-cabang ilmu di bawah dua payung besar tersebut. Rumusan tersebut tentu masih perlu penajaman sana-sini, tetapi untuk simplifikasi ke arah menemukan aturan praktis, perlu dilakukan untuk memperkaya diskusi. *Pertama*, melakukan integrasi keilmuan adalah

pemapanan basis keilmuan dasar masing-masing dosen. Ini akan menjadi disiplin ilmu yang kemudian bergerak ke sana-kemari meminjam perangkat ilmu lain untuk memahami disiplin dasar tersebut. Di dalam melakukan kerja kolektif dalam integrasi keilmuan ini, masing-masing individu tidak melangkah keluar dari keahlian dasar yang dimiliki masing-masing. Karena, kalau tidak, kerja integrasi ini akan rancu dan tidak memiliki basis epistemologi yang jelas.

Yang bisa dilakukan adalah masing-masing menghadirkan basis keilmuan di atas meja lalu kemudian mendiskusikan paradigma, teori, metodologi, dan perspektif yang dipakai berdasarkan keragaman disiplin keilmuan tadi untuk menghasilkan *novelty* baik pada proses maupun hasil. Komunikasi akademis di dalam integrasi keilmuan ini dengan demikian memerlukan perumusan ilmu apa yang menjadi akar ilmu seorang akademisi. Lalu, mana yang menjadi cabang dan ranting. Disiplin ilmu yang menjadi dasar *area of expertise* seorang dosen biasanya terlihat dari pendidikan sarjananya (S1) karena level pendidikan ini memang secara *nature* adalah bentukan awal keilmuannya.

Di dalam pengembangan ilmunya, seorang akademisi pasti menemukan aspek-aspek dalam kajian itu di mana ia tidak merasa puas atau tidak tepat memahami atau menjelaskan sebuah fenomena. Ini terjadi karena ilmu secara fitrah memang saling berkaitan. Menolak integrasi dan interkoneksi dengan demikian adalah menolak hakikat keilmuan itu sendiri. Terutama filosofi

keilmuan PTKI yang meyakini bahwa semua ilmu bersumber dari yang Esa.

Dewasa ini, sudah banyak sekali ditemukan dosen PTKI yang berbasis ilmu agama dan pendidikan level magisternya menyeberang ke ilmu umum atau mengambil *double degree*, di dalam maupun di luar negeri. Dosen Fakultas Syariah yang kuliah di Fakultas Hukum, sosiologi, maupun antropologi di Perguruan Tinggi Umum. Dosen-dosen Fakultas Tarbiyah yang melanjutkan studi level magister hingga doktor di jurusan Manajemen Pendidikan, Instruksi Pembelajaran dan yang lain di Universitas Negeri Umum. Dosen Fakultas Dakwah yang mengambil jurusan komunikasi, *Public Relations*, Psikologi. Dosen Fakultas Ushuluddin yang melanjutkan kuliah di *Cultural Studies*, Filsafat dan lain-lain. Disadari atau tidak, kekayaan *background* keilmuan dosen PTKI ini menjadi *resources* yang sayang tidak dipergunakan. Disadari atau tidak, dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi-nya mereka telah menerapkan integrasi keilmuan walaupun mungkin dalam level beragam.

Sayangnya, kecenderungan dosen PTKI yang berbasis ilmu agama menyeberang seperti di atas tidak diimbangi dengan dosen yang berbasis ilmu umum untuk mempelajari lebih mendalam tentang ilmu agama. Data yang jelas tentang seberapa banyak dosen-dosen PTKI berbasis ilmu umum yang serius mengambil studi agama sebagai tambahan pengembangan keilmuannya pada level magister maupun doktoral memang belum tersedia. Tetapi

dalam pengamatan sehari-hari di kampus tempat saya mengabdi (UIN Mataram) hampir tidak dapat ditemukan.

Academic lag seperti ini terjadi mungkin karena keengganan personal tetapi lebih besar karena tidak adanya *road map* dan *guidelines* yang jelas tentang kerja integrasi keilmuan bagi kelompok dosen ini. Paling tidak, mereka tampaknya lebih gamang daripada dosen yang berbasis ilmu agama. Hal ini bisa juga terjadi karena secara kelembagaan maupun keilmuan, PTKI belum siap untuk menerima mahasiswa seperti mereka. Menerima dosen berbasis keilmuan umum bisa menjadi "media" dan juga "hasil" dari integrasi keilmuan. Tergantung bagaimana pilihannya. Tetapi yang pasti hal itu adalah bagian dari proses yang juga harus direncanakan dengan seksama.

Jika sumber daya dosen-dosen yang berangkat dari disiplin keilmuan yang berbeda berada pada level pemahaman yang sama dengan didukung oleh penguatan kelembagaan maka kerja induktif yang dimaksud akan sangat efektif untuk segera menemukan kata sepakat dan perspektif yang saling mengisi di dalam proyek besar integrasi keilmuan di PTKI. Upaya ini harus segera dimulai. Mengumpulkan data tentang perjalanan dan pengalaman keilmuan para dosen yang sudah tersedia adalah awal dari langkah besar kerja induktif ini.

Integrasi Ilmu:

Menuju Implementasi Integrasi Keilmuan lewat Kerja Induktif (II)

Cerita Integrasi Keilmuan dalam Studi Hukum Keluarga Islam

UNTUK mengoperasionalisasi apa yang dimaksud dengan “kerja induktif” dan “memahami ilmu agama dengan perangkat ilmu umum” pada tulisan sebelumnya, saya ingin berbagi pengalaman mengintegrasikan ilmu umum (ilmu sosial-humaniora) ke dalam ilmu agama yaitu hukum keluarga (*ahwal al Syahsiyyah*) yang merupakan basis keilmuan saya.

untuk memiliki pengetahuan ilmu sosial-humaniora yang memadai dimulai pada awal-awal pengalaman mengajar pada tahun 2000. Mata kuliah yang dipegang saat itu adalah Hukum Perdata Islam Indonesia yang sekarang bernama Hukum Keluarga Islam Indonesia. Substansi pembahasan mata kuliah ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia yang memuat masalah perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, dan hibah. KHI, selain memuat aturan-aturan yang bisa ditemukan di dalam fikih klasik juga tercantum pasal-pasal yang merupakan hasil ijtihad kontemporer yang belum secara jelas maupun tidak ada sama sekali di dalam pendapat para imam mazhab.

Munculnya aturan baru tersebut misalnya mengenai pencatatan perkawinan, perceraian di muka pengadilan, ahli waris pengganti merupakan tuntutan dinamika sosial maupun perbedaan budaya di mana hukum keluarga Islam ini diberlakukan. Sebagai Sarjana Syariah yang cara berpikirnya telah ter-*frame* sangat normatif, dan terkadang hitam-putih, salah-benar, batal-sah, halal-haram. Dalam kenyataannya, penjelasan akademik tentang materi hukum keluarga, tidak sesederhana itu. Pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terkait dengan hal tersebut banyak dilewatkan. Karena keterbatasan ini pula, maka kerja penelitian tidak bisa dirumuskan secara memadai.

Hukum yang memiliki fungsi *social control* dan *social engineering* sangat dekat dengan ilmu sosiologi. Keluarga yang merupakan institusi terkecil, tetapi terpenting dalam struktur sosial juga membutuhkan perangkat ilmu sosiologi di dalam memahaminya. Kesadaran ini yang kemudian mendorong saya untuk mengulang lagi jenjang magister dengan mengambil sosiologi hukum, konsentrasi kajian gender dan perempuan. Pilihan terakhir juga beralasan metodologis. Hukum perkawinan (hukum keluarga) adalah hukum yang paling sarat dengan isu ketimpangan gender. Tidak salah misalnya dua perempuan intelektual Amerika mengatakan bahwa “jika Anda ingin melihat bagaimana gender beroperasi di suatu masyarakat, hukum perkawinanlah tempat Anda memulai” (Kerber and Dehart, 2004).

Langkah memilih studi sosial-humaniora seperti ini memungkinkan saya untuk memperluas jangkauan analisis

terhadap materi hukum keluarga daripada sebelumnya. Misalnya ketika melihat keterkaitan materi hukum dengan politik hukum, dengan menggunakan *critical legal studies* atau *feminist legal theories*, akan terjawab mengapa sebuah aturan hukum masih menguntungkan salah satu jenis kelamin dan meninggalkan jenis kelamin yang lain. Jadi, menjelaskan aturan kebolehan poligami misalnya tidak melulu berkutat kepada dalil normatif yang ujung-ujungnya mengundang perdebatan tidak berkesudahan. Tetapi, bisa memahami latar belakang, konstruksi, dan struktur sosial masyarakat tentang mengapa dan bagaimana poligami beroperasi di dalam konteks masyarakat tertentu.

Dalam contoh di atas, apakah ada kesan studi agama dan studi umum tidak saling menguatkan atau memperjelas? Apakah yang satu terkooptasi oleh yang lain? Saya kira tidak. Yang terjadi adalah dialog antar ilmu yang kemudian memberikan cara pandang yang baru dan tidak saling menegasikan. Hukum keluarga Islam bisa dijelaskan secara kontekstual, sebaliknya ilmu umum mendapatkan kontribusi materi dan amplifikasi untuk memperkuat teori-teorinya.

Dalam pengembaraan akademik, saya merasa bahwa cara pandang sosiologis terhadap hukum juga tidak terlalu representatif. Ada gep-gep yang perlu diisi dengan cara pandang lain. Misalnya ketika membahas tentang mahar apalagi ketika dibandingkan bagaimana mahar ini secara aplikatif sangat beragam di dalam masyarakat muslim. Padahal dalil normatifnya sebenarnya sama. Muncul berbagai pertanyaan, apa faktor pembentuk utama?

Mengapa berbeda? Norma gender apa yang terwakilkan dalam setiap praktik yang beragam itu? Representasi dan ideologi apa yang menjadi dasar? Mengapa misalnya dalam konteks masyarakat tertentu mahar sangat mahal sedangkan yang lain tidak? Mengapa hanya laki-laki yang dibebankan, dan pada beberapa masyarakat dilengkapi juga dengan pembayaran-pembayaran lain selain mahar yang cukup memberatkan. Mengapa juga pada masyarakat tertentu bahkan mahar bisa disediakan oleh perempuan tetapi dalam akad ijab kabul tetap diatasnamakan laki-laki?

Bagi saya, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijelaskan secara sosiologis, *an-sich*. Tetapi juga perlu melibatkan perspektif budaya di mana manusia menjadi pusatnya. Ada sistem kekerabatan, ada kesepakatan individu, ada preferensi personal yang diasumsikan ikut mewarnai bekerjanya hukum keluarga, tentu selain faktor-faktor lain yang mungkin sangat beragam. Pilihan untuk melanjutkan S3 dengan memperdalam antropologi hukum berangkat dari kegalauan akademik tersebut. Perangkat kerja etnografis kemudian menjadi pilihan dalam kerja baru bertemunya berbagai disiplin ilmu ini dalam kepala saya di dalam melihat materi-materi hukum keluarga Islam. *Guess what*? Materi-materi seperti hak ijbar, mahar, perwalian dan sebagainya yang semula dianggap *taken for granted*, bisa membuka wawasan betapa kompleksnya kehidupan manusia dan hukum keluarga.

Kompleksitas kehidupan yang disadari inilah, menurut saya, yang akan menstimulasi novelty di dalam pengembangan studi agama. Karena dengan kesadaran tersebut, seorang akademisi akan terus mencari dan menjawab curiosity akademiknya. Dan pencarian ini meniscayakan integrasi ilmu yang tidak berkesudahan.

Buktinya? Sekarang, saya sedang berpikir untuk mendalami psikologi. Sebab untuk sementara ini, saya memandang bahwa aspek psikologi sangat menentukan juga di dalam pelaksanaan dan pembangkangan hukum masyarakat. Dari sisi lain dari integrasi keilmuan ini akan mendorong implementasi "tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat." Dan itu sangat religius!.

Peleburan Sekat Akademik:

Refleksi Forum Tadarus Litapdimas

TADARUS Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) yang diselenggarakan selama delapan sesi selama era pandemi 2020 mendapatkan respons melalui partisipasi yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari animo insan akademis PTKI yang sangat tinggi. Peserta membludak lewat webinar yang memediasi berlangsungnya acara ini, baik di *platform* Zoom maupun YouTube. Data profil peserta yang disampaikan oleh moderator pada sesi khataman (tadarus 8) memperlihatkan meluasnya cakupan kepesertaan acara ini baik dari jenis kelamin, usia, kepangkatan akademik, status kepegawaian, dan PTKI asal.

Satu hal yang menarik dari data dan proses berlangsungnya forum tersebut adalah meleburnya sekat akademik. Selama ini sekat akademik dirasakan dan diakui menjadi tantangan tersendiri bagi kaum akademisi di kalangan PTKI berupa ekslusivisme dan elitisme forum akademik termasuk di PTKI. Sekarang, nuansa inklusivisme dan egalitarianisme terasa melalui *platform* baru ini. Sekat-sekat yang terlebur itu kemudian berimplikasi pada lima hal positif berikut yang diharapkan menjadi *new normal* bagi pengembangan pengetahuan dan forum ilmiah ke depan di lingkungan PTKI.

Pertama, dari pelosok ke pusat (*from margin to centre)*. Forum litapdimas yang didesain melalui webinar dengan pola *first come, first serve* ini memberikan kesempatan kepada seluruh civitas akademika PTKI di mana pun berada untuk terlibat dalam forum bergengsi ini. Tidak ada pembatasan selain persyaratan memiliki kuota internet yang memadai. Civitas akademika dari PTKI di pusat pemerintah, kota metropolis, maupun dari pelosok dan sudut-sudut lain Indonesia memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan menyerap pengetahuan.

Selama ini, ada semacam kluster akademik berdasarkan posisi geografis yang membuat disparitas dan perbedaan akses kepada forum-forum bergengsi. Sekarang disparitas itu lebur. Tanpa webinar sulit rasanya sebuah forum diskusi ilmiah dihadiri oleh ribuan peserta tanpa kendala yang berarti.

Pemerataan akses ini tidak hanya pada level peserta tetapi juga pembicara. Beberapa pembicara bisa berpartisipasi dengan lancar walaupun berada di daerah yang berbeda dan berjauhan. Sesuatu yang membutuhkan energi, waktu lebih, dan biaya tanpa teknologi tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan Forum Tadarus Litapdimas telah memberikan akses yang merata bagi akademisi dari berbagai daerah. Meleburkan rasa tidak percaya diri bagi mereka yang kebetulan bertugas di PTKI yang secara kualitas masih jauh dari beberapa PTKI yang lebih dahulu dan bertempat di kota.

Kedua, memecah atap kaca (*breaking glass ceiling)*. Atap kaca adalah simbol yang digunakan sebagai ilustrasi hambatan

peningkatan karir bagi perempuan. Adalah menarik bahwa peserta tadarus perempuan lebih banyak daripada peserta laki-laki. Dua puluh tahun pengalaman menjadi dosen, saya belum pernah melihat forum akademik baik di tingkat daerah maupun pusat yang dihadiri oleh lebih banyak perempuan, kecuali jika forum itu dilaksanakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Perempuan karena peran gendernya sering mendapatkan lebih banyak hambatan untuk terlibat aktif dalam forum ilmiah. Meninggalkan rumah untuk menghadiri forum-forum tersebut apalagi akademisi perempuan di daerah yang harus ke ibu kota perlu mempertimbangkan banyak hal.

Perempuan sering kali dimandatkan oleh dunia partriarkhi sebagai "media" bagi terpenuhinya kebutuhan orang lain bukan "tujuan" untuk kebutuhannya sendiri. Tidak heran, banyak dari mereka yang tidak berkesempatan atau enggan untuk me-*recharge* intelektualismenya lewat forum-forum akademik seperti ini. Tadarus Litapdimas lewat webinar ini memungkinkan para akademisi perempuan yang selama ini sebagian besar masih pasif menjadi peserta aktif tanpa kekhawatiran meninggalkan berbagai tanggungjawab mereka di rumah. Layar laptop atau telepon genggam, memfasilitasi mereka untuk memecahkan atap kaca tersebut

Ketiga, dialog keilmuan tak berbatas (*borderless knowledge sharing*). Dalam forum ini, tumpah ruah akademisi dalam jenjang kepangkatan yang berbeda, bahkan mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dengan posisi yang setara. Dari asisten

ahli yang sedang memulai karir akademik sampai pada guru besar yang merupakan puncak tertinggi pencapaian akademik. Dari dosen yang masih berpendidikan S2 sampai mereka yang sudah meraih doktor.

Dialog yang terbuka dan setara terjadi sehingga *transfer of knowledge* berlangsung tanpa batas. Secara psikologis, forum semacam ini memberikan para pemula kesempatan melakukan pertukaran "wakaf ilmu" yang efektif dengan para begawan. Hal ini menjadi tradisi baru bagi mereka untuk berinteraksi akademik dengan level tinggi seperti ini—dan ini sebentuk *new normal* bagi dunia akademik. Forum ini menjembatani proses berbagi ilmu tanpa sekat-sekat psikologis. Lebih dari sekedar *knowledge transfer* tetapi juga *motivation transfer*. Hal tersebut bisa mendorong berkembangnya pengetahuan di lingkungan PTKI dengan semangat menggebu dari akademisi PTKI sebagai ujung tombak inovasi dan pengembangan studi agama di Indonesia. Forum ini juga bisa menjadi *uswah* dan inspirasi bagi mahasiswa serta pengalaman yang berharga bagi masyarakat umum.

Keempat, memperkenalkan lebih luas pendekatan interdisipliner dalam studi agama (*mainstreaming interdisciplinary approach*). Berbagai topik yang diketengahkan dengan pendekatan yang multidisipliner menguatkan upaya integrasi-interkoneksi ilmu pengetahuan dalam studi agama. Proyek ini yang, bagi saya pribadi, semula terdengar ambisius, tetapi sekarang menjadi tampak lebih realistis. Integrasi berbagai ilmu tidak lagi maya tetapi nyata. Kolaborasi akademisi dengan

keilmuan yang berbeda oleh karenanya menjadi kebutuhan ke depan. Dan ini akan membuat studi agama menjadi lebih berkembang. Tak ayal, hal ini akan mengangkat PTKI setara dengan universitas umum lainnya di Indonesia bahkan di dunia.

Kelima, studi agama juga tentang kemanusiaan (*religious studies is indeed about humanity*). Topik-topik yang disampaikan dalam forum ini menarik dengan bahasa yang telah disederhanakan oleh pembicara yang masing-masing pakar di bidangnya. Dari masalah kesehatan, teknologi, perempuan, moderasi beragama, sampai hubungan syariah dan negara dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Selama ini, bahasa akademik berbasis tulisan memang terasa "berat" bagi semua kalangan, sehingga kadang menyulitkan bagi jalannya interkoneksitas keilmuan. Nah, bahasa "lisan" yang sederhana ini, mampu menjembatani keterhubungan ilmu itu. Hal-hal tersebut membuat studi agama terasa lebih dekat dengan kehidupan.

Studi agama tidak lagi menjadi diskusi akhirat, ahli agama tidak lagi dipandang hanya bisa berdoa. Agama menjadi jawaban bagi permasalahan-permasalahan sosial dan kemanusiaan. Dan karir para sarjana agama ke depannya bukan lagi di menara gading.

Jika kelima hal tersebut bisa terus dilakukan, maka kita semua optimis bahwa Indonesia akan menjadi alternatif pusat peradaban Islam yang tercatat tinta emas sejarah.

Future Religion:

Relevansi Tema AICIS 2022 bagi Studi Hukum Keluarga Islam

ANNUAL International Conference on Islamic Studies (AICIS) tahun 2022 sudah memasuki kali ke-21, istimewanya akan dilaksanakan di dua pulau yaitu Lombok dan Bali. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram menjadi *host-university* di Lombok, pada tanggal 18-20 Oktober 2022 sedangkan perhelatan di Bali pada tanggal 1-4 November 2022 digawangi oleh Universitas Hindu Negeri (UHN) Denpasar.

AICIS 2022 dan Masa Depan Agama

Tema AICIS kali ini adalah "*Future Religion in G20*" yang mengusung tiga topik utama yaitu transformasi digital, manajemen pengetahuan, dan resiliensi sosial. Sebagaimana yang dijelaskan pada *flyer* AICIS 2022 bahwa tema tersebut dijadikan fokus untuk merespons perkembangan pemikiran terkait eksistensi dan fungsi agama di dunia global saat ini. Agama atau lebih khususnya spiritualitas di satu sisi adalah kesadaran pribadi yang sepanjang sejarah sangat beragam. Di sisi lain agama memiliki nilai universal yang mengarahkan manusia pada aspek spiritualitas yang mereka yakini.

Di masa kemajuan digital dan pasca pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia ini, fungsi agama sebagai perekat keberagaman dan penyubur nilai-nilai kemanusiaan terus mengalami tantangan. Hal ini perlu terus dikaji secara

multidisipliner untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi masa depan agama yang lebih baik. Studi Hukum Keluarga Islam sebagai salah satu disiplin ilmu dalam pengkajian agama juga akan menjadi topik yang didiskusikan.

AICIS 2022 dan KTT G20

AICIS 2022 ini sendiri merupakan salah satu *side events* dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (19 negara dan satu kawasan ekonomi, Uni Eropa) yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali tanggal 23-24 Oktober 2022. Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam G20 ini, sejak pembentukannya pada tahun 1999. Untuk pertama kalinya tahun 2022 Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi.

G20 adalah wadah bagi negara maju dan berkembang yang dibentuk untuk mendiskusikan berbagai masalah strategis terkait perekonomian dunia. Momen KTT G20 yang berurutan dengan AICIS ini mengirimkan pesan tersendiri kepada dunia bahwa Indonesia dan Islam di Indonesia adalah salah satu unsur penting, bahkan utama, di dalam pembentukan peradaban dunia.

Sebagai negara mayoritas muslim dan terbesar di dunia, Indonesia lewat Islamnya, diharuskan berperan penuh dan secara signifikan untuk mewujudkan masa depan agama yang lebih humanis dan mampu menjawab tantangan ke depan. Fungsi agama yang sedemikian penting pada level makro didasarkan pada bagaimana memastikan fungsi agama dipahami dan terimplementasikan pada level keluarga. Keluarga sebagai unit

sosial yang terkecil dan pusat pembentukan peradaban adalah *starting point* bagi terwujudnya agama sebagai penentu masa depan peradaban dunia.

Tema AICIS 2022 dan Relevansinya dengan Studi Hukum Keluarga Islam

Tema masa depan agama yang diusung pastinya sekaligus juga akan membahas masa depan keluarga muslim dan hukum keluarga Islam. Mengapa? Di dalam pandangan Islam, keluarga adalah unit terpenting yang menentukan bagaimana agama bisa menemukan ruang implementasinya secara *kaffah*. Hukum yang mengatur keluarga pun sangat detail, diatur di dalam sumber hukum Islam baik al-Qur'an maupun hadis. Paling tidak ada 70 ayat al-Qur'an yang rinci mengatur urusan perkawinan, perceraian, hibah, wasiat, dan wakaf serta yang terhubung dengan topik-topik tersebut. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan hukum lainnya, misalnya hukum pidana atau ekonomi Islam.

Dalam perkembangannya, hukum keluarga menjadi satu-satunya hukum Islam yang terus dipraktikkan, walaupun mengalami pengaruh dari sistem hukum lain, bahkan setelah Islam berkembang luas dan dikenalnya bentuk *nation-state* pasca kolonialisme. Sampai saat ini, hukum keluarga Islam secara konsisten menjadi pedoman bagi umat muslim yang ditegakkan melalui lembaga peradilan agama di masing-masing negara Islam, termasuk di Indonesia.

Masuk dalam kategori negara Islam adalah negara yang secara formal berdasarkan Islam maupun negara yang berpenduduk mayoritas Islam tanpa menyebutkan agama sebagai dasar negara seperti halnya Indonesia. Hukum keluarga adalah tempat berkontestasinya modernitas dan tradisionalitas. Di satu sisi hukum keluarga menjadi muara untuk mengatur keluarga di hadapan disrupsi sosial sebagai konsekuensi dari berbagai fenomena yang terjadi. Di sisi lain, keluarga juga diharapkan untuk menjadi benteng terakhir dari kebertahanan nilai, norma, dan praktik yang secara tradisi maupun kepercayaan lama terus dipegang. Pertemuan kedua hal yang tidak terhindarkan ini menjadikan berbagai isu dalam kehidupan keluarga menjadi rumit. Namun, hukum keluarga harus terus memainkan peranan untuk memperkuat institusi keluarga muslim di hadapan perubahan sosial yang terus melaju.

Problem kontestasi inilah yang menjadi titik di mana tiga topik utama (*digital transformation, knowledge management, and social resiliency*) yang diusung oleh AICIS ke-21 kali ini sangat relevan dengan studi hukum keluarga Islam. Berbagai dampak yang dimunculkan oleh adanya transformasi digital mengharuskan cara pandang baru yang melibatkan manajemen pengetahuan yang lebih menyodorkan solusi sehingga ketahanan keluarga sebagai unsur utama dari ketahanan sosial dapat diwujudkan.

Transformasi digital yang berkembang sedemikian rupa sejak revolusi industri 4.0 ini diluncurkan sejak 2016, terus-menggerus *privacy* kehidupan keluarga sedemikian rupa. Jarak antara publik

dan *private* lambat laun memudar dan berbagai isu di dalam keluarga tidak lagi menjadi urusan internal. Selain itu, pandemi covid -19 yang melanda dunia juga ikut memberikan sumbangsih yang tidak remeh terkait dengan transformasi kehidupan keluarga.

Selain pengaruh di atas, digitalisasi dan pandemi membawa pengaruh positif juga tentunya. Dengan semakin canggihnya teknologi, layanan terhadap urusan hukum keluarga tidak lagi semata-mata terjadi secara *offline* sebagaimana dulu. Sekarang pencatatan pernikahan di KUA maupun urusan perceraian di Pengadilan Agama bisa dilayani secara *online*. Hal ini mempermudah akses masyarakat untuk urusan-urusan mereka.

Teknologi juga menyodorkan banyak hal yang rumit bagi kehidupan keluarga. Menjadi orang tua dewasa ini semakin kompleks dengan munculnya banyak bentuk ancaman siber (*cyber threat*) terhadap relasi suami-istri maupun masa depan anak. Juga, definisi keluarga yang semula adalah sekumpulan orang yang hidup bersama yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mengalami pergeseran. Sudah semakin banyak keluarga yang hidup berjarak karena tuntutan kebutuhan, ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan.

Beberapa hal yang muncul tersebut harus direspons dengan manajemen pengetahuan terkait dengan hukum keluarga secara memadai. Studi Hukum Keluarga Islam harus terus dikembangkan dengan berdasarkan pada penelitian-penelitian ilmiah yang terus mengkaji dan menemukan solusi bagi berbagai isu yang dihadapi.

Metodologi pengkajian yang terbarukan dan disesuaikan dengan tuntutan harus terus menjadi bagian dari inovasi para ilmuwan pengkaji hukum keluarga agar permasalahan hukum keluarga bisa terus didalami dan diungkap secara mendalam.

Manajemen pengetahuan yang terus terbarukan tersebut tidak lain adalah untuk konsisten menjadikan keluarga sebagai garda terdepan mewujudkan ketahanan sosial. Kehidupan keluarga begitu kompleks walaupun banyak orang yang menilai bahwa keluarga hanya terbatas pada ruang fisik rumah yang didiami sedemikian sempitnya, dibandingkan dengan hiruk pikuk yang terjadi di ruang publik. Hanya saja perlu diingat, sebagai institusi sosial, ruang keluarga secara nonfisik tidak sesempit itu dan kehidupan keluarga tidak berdiri sendiri. Ruang domestik seperti keluarga terus berpengaruh dan mempengaruhi berbagai isu maupun kemajuan yang terjadi di ruang publik. Sehingga sungguh sangat pasti bisa dikatakan bahwa resiliensi sosial dapat terwujud jika resiliensi keluarga terus diupayakan.

Kita berharap *Annual International Conference on Islamic Studies* (AICIS) ke- 21 tahun 2022 sebagai ajang bergengsi yang akan mengetengahkan berbagai hasil kajian pala ilmuwan muslim dari berbagai negara ini bisa merekomendasikan cara pandang, wawasan, dan metode baru sebagai alternatif di dalam mengkaji lebih lanjut disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam.

Industrialisasi

Hulu ke Hilir dari Kacamata Akademisi Hukum Keluarga

"INDUSTRIALISASI bukan program gubernur, tetapi keharusan sejarah". Demikian, *closing statement* dari Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di acara *road-show* dan *talk-show* dengan Tema Millenial "Trigger Industrialisasi" di ASI Mbojo, Kota Bima, Rabu, 14 September 2022. Pernyataan gubernur tersebut betul, tidak ada pilihan memang. Tiba-tiba kita sudah berada pada era 5.0 yang sebenarnya sudah *post-industrial society*. Sederhananya menurut beliau, masyarakat kita ini terbagi menjadi masyarakat tradisional, masyarakat industrial, dan masyarakat digital. Industrialisasi adalah proses mengalihkan masyarakat tradisional menuju masyarakat industrial. Seperti apa gambarannya? Masyarakat tradisional yang *mode of production*-nya umumnya berburu dan bertani mengandalkan alat-alat tradisional pada proses produksi dan konsumsi. Oleh karenanya, prosesnya menjadi lama, nilai jualnya menjadi rendah dan ketersediaan makanan menjadi singkat. Masyarakat industrial membantukan atau bahkan menggantikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga produksi cepat dan harga meningkat. Pendeknya industrialisasi mengarahkan hal yang sebelumnya sulit, lambat, dan mahal menjadi mudah, cepat dan murah.

Peralihan dari masyarakat pertanian ke industri secara revolusioner sudah berlangsung sejak 3.0 pada saat komputer dan robot mulai diciptakan. Selanjutnya babak digitalisasi dan internet 4.0 merasuk menerjang kehidupan manusia dengan sangat deras. Kemajuan teknologi informasi saat itu fokus pada bagaimana penemuan-penemuan teknologi yang semakin mempermudah manusia.

Namun disadari kemajuan teknologi menyodorkan jarak dengan kehidupan manusia. Lalu masyarakat 5.0 (*society era*) dihajatkan untuk mendekatkan jarak itu dan menjadikan kesejahteraan manusia sebagai proyeksi sekaligus basis dari setiap langkah teknologi. Jadi jika sekarang di NTB masih bicara industrialisasi, mengalihkan masyarakat tradisional yang basis ekonomi kehidupannya dari pertanian sederhana kepada penggunaan alat-alat yang lebih maju (industri) untuk efektivitas produksi, sebenarnya terlambat. Tetapi langkah yang tertunda lebih baik daripada tidak sama sekali.

Industrialisasi bukan langkah yang mudah. Diperlukan kolaborasi pentahelix dan kajian transdisipliner yang sistematis dan memadai. Industrialisasi juga bukan hal yang berdiri sendiri. Ada proses pembuka yang dalam tulisan ini disebut hulu (pra industrialisasi) dan arah dampak yang disebut hilir industrialisasi (post-industrialisasi) terutama berkaitan dengan bagaimana industrialisasi menjadi jawaban dari kompleksnya tuntutan hidup masyarakat. Bukan sebagai bagian dari masalah yang menambah panjang jalan mencapai *society's well-being*. Dalam kolaborasi

pentahelix itu, akademisi harus mengambil bagian, sesuai dengan latar belakang keilmuan dan keahlian masing-masing, secara langsung ataupun tidak langsung. Akademisi hukum keluarga atau studi keluarga yang mungkin dikesankan jauh dari isu industrialisasi juga bisa mengambil bagian. Bagaimana caranya? Berikut gambarannya!

Kolaborasi Pentahelix dan *Psychological Block*

Kolaborasi yang melibatkan lima kelompok strategis ini adalah kebutuhan mendesak dewasa ini. Akademisi, pemerintah, media, masyarakat, dan pelaku usaha tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Akademisi mengkaji dan memberikan rekomendasi, pemerintah menindaklanjuti. Media mengatur jalannya informasi, masyarakat berpartisipasi aktif, dan pelaku usaha terus menjalankan bisnis secara kreatif dan inovatif. Pelaku usaha juga menjadi sumber kajian, kebijakan, informasi dan dukungan bagi empat kelompok sebelumnya.

Akan halnya dengan industrialisasi, kolaborasi pentahelix ini adalah keniscayaaan. Berbicara industrialisasi dari kacamata program pemerintah saja tidak cukup tanpa gandengan tangan seluruh kelompok tersebut. Kolaborasi pentahelix ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide, metode, strategi, dan komunikasi yang mendorong terwujudnya industrialisasi dalam bentuknya yang lebih menjawab kebutuhan kehidupan manusia dan nilai kemanusiaan. Terlibatnya berbagai kelompok strategis ini dalam prosesnya mungkin nampak kompleks dan lebih sulit. Tetapi proses yang sulit jika dijalani sesuai dengan kaidahnya akan

menghasilkan kegemilangan. Akademisi dari berbagai bidang dapat mengambil bagian. Mereka adalah kelompok cendekiawan yang harus membuka diri untuk berkolaborasi secara aktif-partisipatif dan berkontribusi untuk menjawab kompleksitas itu sendiri.

Jelaslah ketika bicara industrialisasi, maka kajian transdisipliner yang menganalisa hulu dan hilir industrialisasi itu mutlak harus dilakukan. Transdisipliner adalah lingkar lebih lanjut dari multidisipliner di dalam produksi ilmu pengetahuan. Pada level multidisipliner, kajian hanya melibatkan mereka yang memiliki disiplin ilmu yang beragam secara integratif dan saling memengaruhi. Sedangkan pada level transdisipliner para ilmuwan harus memastikan kajian mereka terejawantah ke dalam kebijakan yang implementatif. Oleh karenanya, arah dari pengetahuan dan inovasi adalah pada produksi yang dapat dirasakan daya gunanya oleh masyarakat. Tetapi upaya kolaboratif, kenyataannya, masih mendapatkan hambatan psikologis. Ego sektoral sering kali lebih terdepan dibandingkan dengan keinginan meretas masalah dari berbagai aspeknya. Sudah saatnya kolaborasi pentahelix ini terus didorong dengan memperbanyak ruang diskusi dan perjumpaan dan meluruhkan egoisme masing-masing.

Akademisi hukum keluarga misalnya, bisa mengambil bagian pada hal-hal yang terkait dengan hulu industrialisasi yaitu memulai melentingkan kesadaran akan pentingnya industrialisasi ini dari unit terkecil kehidupan sosial yaitu keluarga.

Demikian juga pada dampak dari industrialisasi yang menimbulkan perubahan sosial yang dahsyat. Disrupsi sosial pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi kehidupan keluarga. Urbanisasi, peningkatan pendapatan, mobilitas sosial mau tidak mau berdampak bagi kehidupan keluarga. Ini semua harus diantisipasi dan dipersiapkan.

Ambil contoh dari proses industrialisasi yang paling sederhana. Mengarahkan masyarakat untuk tidak menjual hasil pertanian sebagai bahan mentah tetapi sebagai bahan siap saji dengan kemasan yang menarik bukan perkara mudah. Singkong misalnya bisa diolah ke dalam berbagai panganan yang nilai jualnya lebih tinggi. Bambu yang terbuang begitu saja, bisa bernilai tinggi jika melibatkan kreativitas dan menggunakan mesin untuk memperbanyak produksi. Mendorong masyarakat untuk mau berkreasi berinovasi ini selayaknya dilakukan secara sistematis serta terprogram. Keluarga menjadi pilihan strategis untuk memulai itu.

Terlebih dalam konteks masyarakat Bima dengan budaya Mbojo misalnya yang masih sangat terobsesi dengan posisi sebagai abdi negara yang berseragam (ASN). Perpindahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industrial tidak terjadi secara langsung dalam masyarakat Bima. Yang terjadi sesungguhnya adalah dari masyarakat agraris menuju masyarakat birokratis di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang jauh lebih menjanjikan mobilitas dan kesejahteraan serta bergengsi ketimbang menjadi pelaku usaha yang tidak memiliki seragam.

Menuju masyarakat industri bagi mereka juga dihadang dengan *psychological block* yang rumit. Bagi masyarakat Bima, ASN dan polisi serta militer lebih memiliki otoritas dengan pensil dan senjatanya (*patalo ro bedi*).

Mereka lupa bahwa di balik pensil dan senjata, juga ada uang yang lebih *powerful* memberikan kuasa dan otoritas. Dan uang ini biasanya berada di bawah kendali pelaku usaha. Dalam konteks masyarakat yang memiliki kesadaran seperti ini, maka perlu diperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan hulu dan hilir industrialisasi sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Mengalihkan paradigma berpikir mereka perlu dilakukan dengan sistematis dan seksama. Pilihannya adalah menyasar keluarga sebagai basis bagi peningkatan kesadaran bahwa industrialisasi adalah tuntutan zaman bagi kehidupan yang lebih maju. Tentu saja dengan berbagai konsekuensi yang mengitarinya.

Kontribusi Akademisi Hukum Keluarga melalui La Rimpu

Pekerjaan akademisi bukan hanya mengajar tetapi juga meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kontribusi bidang ilmu tertentu kepada aspek yang mungkin saja dinilai berjarak dari keahliannya dapat dilakukan jika terjadi integrasi yang apik antara Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. Seperti hukum keluarga dengan industrialisasi yang tampak sekilas berjarak, bisa jadi bisa saling memasuki (*permeable*).

Pada tahun 2012, saya melakukan penelitian untuk menyusun disertasi dalam rangka memperoleh gelar doktor dari Western Sydney University, Australia. Penelitian itu fokus pada

bagaimana tradisi pernikahan di Bima bisa mengungkap nilai-nilai sosial dan agensi (kapasitas bertindak) individual. Salah satu temuan menarik dari penelitian itu adalah terungkapnya tradisi *ampa co'i ndai* di mana perempuan Mbojo dapat berkontribusi di dalam pembayaran pernikahan mereka berupa *co'i*. Ini terjadi terutama jika laki-laki yang akan menjadi pasangan memiliki pekerjaan sebagai abdi negara baik sipil maupun militer. Tradisi ini mengungkap bagaimana ekspektasi budaya terhadap pekerjaan dan profesi yang "pantas dan bergengsi" untuk dipilih.

Temuan tersebut menjadi inspirasi bagi kami untuk mendorong kewirausahaan ketika akhirnya mendirikan Yayasan La Rimpu, 2017. La Rimpu adalah singkatan dari Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan sebagai forum perjumpaan bagi perempuan Bima. Sekolah di alam terbuka yang bertemu di emperan rumah ini memilih proyek pertamanya di Renda-Ngali, dua desa bersebelahan yang sering terlibat konflik sosial. Sekolah ini menyasar perempuan untuk menjadi tokoh di dalam perubahan empat level kehidupan: diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai sarjana hukum keluarga, saya meyakini bahwa perubahan dalam level yang terbesar harus dimulai dari individu d

an unit terkecil.

Mengapa perempuan? Karena perempuan adalah sebenarnya pembentuk peradaban yang utama. Posisi mereka sebagai ibu mengharuskan mereka memiliki kompetensi personal dan sosial untuk mengarahkan generasi menjalani hidup sesuai tuntutan norma dan zaman. Mereka, bersama dengan pasangannya, adalah

pendidik sekaligus *role model* utama dan pertama bagi anak-anaknya. Ini bukan hal yang mudah. Tugas menjadi orang tua rumit tetapi harus dijalani. Institusi keluarga dapat berjalan dengan baik untuk berkontribusi bagi kesejahteraan kehidupan sosial jika dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Di sinilah akademisi hukum keluarga harusnya berperan. Mendampingi dan ikut mengarahkan keluarga menjalankan fungsi tersebut.

Fokus utama La Rimpu adalah menjadikan perempuan peserta sekolah ini sebagai agen perdamaian. Perdamaian dalam arti yang luas. Dengan menggunakan nilai kearifan lokal tiga M: *Manggawo* (meneduhkan), *Mahawo* (mendinginkan) dan *Marimpa* (menginspirasi), La Rimpu juga mendorong para perempuan peserta sekolah ini mengenali potensi dirinya untuk menjadi inspirator bagi keluarga. Selain menyelesaikan modul, sebagai kegiatan ekstrakurikuler La Rimpu memiliki program yang disingkat CEGAT (*Care*, *Entrepreneurship*, *Green*, *Art*, *Tourism*). La Rimpu membekali ibu-ibu komunitas ini kesadaran terkait dengan kepedulian sosial, kewirausahaan, lingkungan, seni dan budaya, serta kepariwisataan. Kesemuanya itu adalah *pre-requisite* (syarat awal) bagi mulusnya peralihan era di dalam kehidupan manusia.

Khusus terkait dengan kewirausahaan yang merupakan salah satu layer dari industrialisasi, La Rimpu mengambil peran untuk meningkatkan kesadaran bahwa pilihan-pilihan hidup dan profesi beragam tersedia. Dengan kreativitas dan inovasi dengan

menggunakan kemajuan teknologi, generasi millennial memiliki lebih banyak pilihan untuk dimasuki.

Berdasarkan data, generasi Z yaitu mereka yang berumur 8-24 tahun, adalah penduduk mayoritas saat ini (27.94%) dan akan menjadi penyumbang bonus demografi 2030 nanti, di mana usia produktif akan mencapai 64%. Mereka bukan hanya *trigger* industrialisasi tetapi harus menjadi pelaku utama.

Tanpa kesadaran yang ditanamkan terlebih dahulu melalui keluarga terkait program industrialisasi, maka kesiapan masyarakat di dalam menghadapi proses peralihan era kehidupan ini tidak berjalan mulus. Industrialisasi perlu dipersiapkan dari hulu ke hilirnya dan akademisi hukum keluarga dapat mengambil peran yang signifikan untuk ini.

La Rimpu
Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan

SUMBER TULISAN

Operasionalisasi Nilai Islam

- Islam dan Iman: *Meneladani Nilai Rukun Islam dan Rukun Iman untuk Relasi Ideal Pasutri – Arrahim.id*, 24 Juli 2021.
- Rukun Islam: *Tips Menghindari Masalah dari Rukun Islam - Arrahim.id*, 24 Juli 2021.
- Rukun Iman: *Tips Menyelesaikan Masalah dari Rukun Iman - Arrahim.id*, 24 Juli 2021.
- Puasa dan Kejujuran: *Memperkuat Integritas Personal, Mewujudkan Keadilan Sosial – alamtara.co,* 7 September 2023.
- Negosiasi Ruang: *Menjalankan Perintah Agama dan Mewujudkan Keadilan Gender – alamtara.co*, 7 September 2023.
- Pendidikan, Kesetaraan Gender, dan Pengentasan Kemiskinan – *alamtara.co,* 7 September 2023.
- Haji *Penguatan Jati Diri Perempuan Merdeka – alamtara.co,* 16 Agustus 2020.
- Bercadar**:** *Agensi, Literasi, dan Narasi Kebangsaan – alamtara.co,* 20 Juli 2020.

Perempuan dan Literasi

- Child-Free *Pilihan atau Pelanggaran? – alamtara.co,* 13 Februari 2023.

- Perempuan: *Kemampuan atau Keturunan? Refleksi Pemilukada di Nusa Tenggara Barat 2020 (I) – alamtara.co,* 12 Desember 2020.
- Perempuan: *Kemampuan atau Keturunan? Refleksi Pemilukada di Nusa Tenggara Barat 2020 (II) – alamtara.co,* 13 Desember 2020.
- Potret Literasi Mahasiswa – *rri.co.id,* 30 Agustus 2023.
- Muslimah Reformis**:** *Transformatif dan Humanis – alamtara.co,* 23 Juli 2020.
- Multidisipliner, Interdisipliner, dan Transdisipliner (MIT): *New Academic Mentality dan Bedah Pemikiran Prof. Amin Abdullah – alamtara.co,* 5 September 2023.
- Humanisme dan Kesetaraan Gender ala Cak Nur *(Bedah Pemikiran Lengkap Nurcholis Madjid) – alamtara.co,* 5 September 2023.
- Islam dan Pancasila: *Perspektif Maqashid Syariah Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D – Silapedia.com,* 11 Maret 2023.
- Noktah Merah Perkawinan: *Berjuang Bersama untuk Keutuhan – alamtara.co,* 22 September 2022.

Keluarga dan Parenting

- Kepemimpinan Kolaboratif *Rumah Tangga dan Prinsip Ketahanan Keluarga di Era Pandemi – alamtara.co,* 4 Juli 2021.
- Living in Bubbles: *Privasi Individual dan Intimasi Sosial di Era Pandemi – alif.id,* 31 Mei 2020.

- Hand Phone *Empat Puluh Jam tanpa HP, Sungguh Menyenangkan – alamtara.co,* 15 Juli 2021.
- Bukan Hanya Haji *Mudik Lebaran juga Perjalanan Spiritual – alamtara.co*, 27 Mei 2022.
- Narsisme *Ala Santriwati 90-an – alamtara.co,* 24 Oktober 2020.

Metodologi dan Isu Hukum Keluarga

- Autoetnografi: *Pencarian Metodologis bagi Studi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (I) – alamtara.co,* 9 Juli 2023.
- Autoetnografi: *Pencarian Metodologis bagi Studi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (II) – alamtara.co,* 12 Juli 2023.
- Integrasi Ilmu: *Menuju Implementasi Integrasi Keilmuan lewat Kerja Induktif (I) – Arrahim.id,* 3 Juni 2020.
- Integrasi Ilmu: *Menuju Implementasi Integrasi Keilmuan lewat Kerja Induktif (II) – Arrahim.id,* 3 Juni 2020.
- Peleburan Sekat Akademik: *Refleksi Forum Tadarus Litapdimas – Arrahim.id,* 26 Mei 2020.
- Future Religion: *Relevansi Tema AICIS 2022 bagi Studi Hukum Keluarga Islam – alamtara.co,* 26 September 2022.
- Industrialisasi *Hulu ke Hilir dari Kacamata Akademisi Hukum Keluarga – Suarantb.com,* 19 September 2022.

DAFTAR BACAAN

Abdullah, Amin. (2020). *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*. IBTimes dan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

Arif, S. (2022). *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqasid Syariah Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D*. Cakrawala dan Tarekat Sunan Anbiya Press.

Bowen, J. R. (1998). What is "Universal" and "Local" in Islam? Ethos.

Bowen, J. R. (2012). *A New Anthropology of Islam*. Cambridge University Press.

Ellis, C. (2004). "The Ethnographic I: A methodological novel about autoethnography". (Vol. 13). Rowman Altamira.

Encyclopaedia of Case Study Research (Vol. 2, pp. 43–45). SAGE Publications.

Fauzi, L. (2023). *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*. Brill Publication.

Hayano, D. M. (1979)." Auto-Ethnography: Paradigms, Problems, and Prospects. Human Organization". 38(1).

Kurniawati Hastuti Dewi (2015). *Indonesian Women and Local Politics: Islam, Gender, and Networks in Post-Suharto Indonesia.*

Madjid, Nucholish (1994). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Dian Rakyat.

Maréchal, G. (2010). *Autoethnography*. In Albert J. Mills, Gabrielle Durepos, & Elden Wiebe (Eds.).

Mulia, Mulia. (2019). *Muslimah Reformis*. Dian Rakyat.

Rachman, Budhy Munawar. (2020). *Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodrnan*. Nurcholish Madjid Society.

Salim GP, M. A. (2020). “From Usul Fiqh to Legal Pluralism: An Autoethnography of Islamic Legal Thought. Mazahib”.19(1), 79–106. https://doi.org/10.21093/mj.v19i1.2414. |

Snyder, M. M. (2015). “Leaning Into Autoethnography: A Review of Heewon Chang’s Autoethnography As Method”. The Qualitative Report, 20(2), 93-96.https://doi.org/10.46743/2160-3715/2015. 2009.

INDEKS

Islam, Perempuan, & Hukum Keluarga

Refleksi Autoetnografi

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh mereka yang tertarik melihat isu keperempuanan dan keluarga. Perspektif normatif baik yang bersifat ideologis (Islam) maupun sosio-legal (hukum keluarga) menjadikan pembicaraan tentang perempuan dan keluarga dalam buku ini terkait dengan isu-isu lainnya. Misalnya literasi dan politik. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa pemikiran metodologis maupun perspektif gender yang menegaskan bahwa topik perempuan dan keluarga bisa menjadi kajian yang terus menarik dan up-to-date. Oleh karena itu, buku ini sangat penting dibaca oleh mahasiswa hukum keluarga Islam sebagai referensi untuk melihat bagaimana Islam menjadi nilai di dalam kehidupan keluarga dan bagaimana perempuan menjadi subyek yang penting di dalam diskusi hukum keluarga.

Prof. Atun Wardatun, M.Ag., M.A., Ph.D lahir di Kota Bima pada tanggal 30 Maret 1977. Meraih jabatan fungsional sebagai Guru Besar di bidang Hukum Perdata Islam Indonesia Fakultas Syariah UIN Mataram, pada tahun 2021. Pendidikan pra sekolah dan dasarnya di mulai pada TK Darul Ma'arif di Bima pada tahun 1981-1982. Melanjutkan ke MI Nurul Ilmi pada tahun 1982 yang ditempuh selama 5 tahun dan tamat pada tahun 1987. Sejak 1987-1990 menempuh Pendidikan di MTSN 1 Padolo Bima. Selanjutnya mulai nyantri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum tepatnya di Pondok Pesantren Putri Al-Lathifiyyah sejak 1990-1993 sekaligus menempuh Pendidikan formal di MAN Tambak Beras Jombang. Pada tahun 1993-1997 menyelesaikan program sarjana di bidang Peradilan Agama di Universitas Islam Negeri Surabaya. Tahun 1998-2000 menyelesaikan program magister di Hukum Keluarga Islam dari UIN Sunan Kalijaga. Mengambil master yang kedua 2004-2006 di University of Northern Iowa dengan beasiswa Fulbright. Selanjutnya menyelesaikan program doctoral di Western Sydney University atas beasiswa Australian Leadership Awards (2012-2017).